



BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN

LAPORAN AKHIR

MONITORING DAN EVALUASI

INOVASI DAERAH

KABUPATEN BULUNGAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
KABUPATEN BULUNGAN

Jl. Gelatik, Tj. Selor Hilir, Tj. Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
77215, Indonesia

LAPORAN AKHIR
MONITORING DAN EVALUASI
INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN



Kata Sambutan

Penelitian ini memiliki fokus yang kuat pada Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan. Ini adalah sebuah upaya pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kami untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah kami, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah kami sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanan menuju kesejahteraan masyarakat, kami berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efisien, efektif, dan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

Kita telah menyaksikan perkembangan zaman yang begitu cepat, yang telah mendorong manusia untuk terus beradaptasi dan bergerak seiring dengannya. Perkembangan yang pesat ini telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari kita. Inovasi dilakukan oleh berbagai negara dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan beragam tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, inovasi bukan

sekadar suatu konsep, tetapi merupakan suatu upaya nyata untuk menghadapi perubahan zaman dan memastikan masa depan yang lebih baik.



Dalam konteks ini, pemetaan inovasi di tingkat daerah, seperti yang kita lakukan dalam Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan, adalah langkah penting dalam menjelajahi, memahami, dan menghargai kontribusi inovatif yang telah dilakukan. Melalui pemetaan ini, kita berharap dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana inovasi telah membentuk dan terus membentuk Kabupaten Bulungan, serta berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang inovasi di Kabupaten Bulungan, dan kami berkomitmen untuk terus berusaha menjadikan daerah kami lebih inovatif, efisien, dan efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang peduli dengan pembangunan daerah.

Bulungan, 2023

Bupati Bulungan
Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul "Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan". Buku ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif kami dalam menggali dan mendokumentasikan inovasi yang telah terjadi dalam kurun tiga tahun terakhir di Kabupaten Bulungan.

Dalam era dinamis ini, inovasi menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh suatu daerah. Bukan hanya sebatas perubahan teknologi, inovasi juga mencakup transformasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada Kabupaten Bulungan dengan tujuan menganalisis dan menggambarkan indeks inovasi daerah serta mengidentifikasi berbagai inisiatif dan bentuk inovasi yang telah diimplementasikan.

Buku ini merangkum upaya kami dalam mengurai kompleksitas inovasi daerah, baik dalam konteks kebijakan maupun implementasinya. Kami memahami bahwa inovasi, sementara memberikan peluang luar biasa untuk kemajuan, juga dapat membawa risiko jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, buku ini juga mengulas peraturan-peraturan terkait pelaksanaan Inovasi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan pandangan mendalam tentang perjalanan inovasi di Kabupaten Bulungan serta memberikan panduan bagi pembaca dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai untuk meningkatkan inovasi dalam konteks daerah. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para pembaca yang tertarik dalam studi mengenai inovasi daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kolaborasi dalam proses penyusunan buku ini. Semua jerih payah ini menjadi landasan bagi kami untuk terus bergerak maju dalam mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru mengenai pentingnya inovasi dalam mendorong kemajuan daerah. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.

Bulungan, 2023

**Kepala Bappeda
Iwan Sugiyanta, ST, MT**

Daftar Isi

Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Inovasi Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi.....	xiii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 Tinjauan Pustaka	9
2.1. Konsep-Konsep Inovasi	10
2.2. Regulasi dan Kebijakan Inovasi.....	13
2.3. Daya Saing Daerah	17
BAB 3 Metodologi.....	21
3.1. Pendekatan Penelitian	22
3.2. Jenis Penelitian	22
3.3. Teknik Pengambilan Sampel	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data	24
3.5. Teknik Pengolahan Data.....	24
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	24
3.5.2. Uji Validitas.....	25
3.5.3. Uji Reliabilitas.....	25
3.6. Teknik Analisis Data.....	26
BAB 4 Gambaran Umum	28
4.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	29
4.1.1. Kondisi Geografi dan Batas Wilayah Administrasi.....	29
4.1.2. Kondisi Demografi.....	31

4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	33
4.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	33
4.3. Konsepsi Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bulungan	38
4.4. Isu Strategis	48
4.4.1. Pengembangan SDM	48
4.4.2. Pengembangan Ekonomi Wilayah	49
4.4.3. Prasarana Dasar.....	49
4.4.4. Kebijakan Publik Pemerintahan dan Penegakan Hukum.....	49
4.4.5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.....	50
4.4.6. Program Prioritas Bupati 2021-2026	50
BAB 5 Hasil Pengolahan dan Analisis Data	55
5.1. Hasil Pengolahan Data.....	56
5.2. Hasil Analisis Data.....	76
BAB 6 Penutup	116
6.1. Kesimpulan	117
6.2. Rekomendasi.....	118
Kuisisioner dan Tabel per Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan	120

Daftar Gambar

Gambar 1. Ilustrasi Teknik pengambilan sampel	23
Gambar 2. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.....	36
Gambar 3. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024	39
Gambar 4. Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan	41
Gambar 5. Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan.....	42
Gambar 6. Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah di Kalimantan....	43

Daftar Tabel

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan.....	29
Tabel 2. Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan Kabupaten Bulungan	30
Tabel 3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan.....	31
Tabel 4. Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada masing- masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan	32
Tabel 5. PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2020	35
Tabel 6. Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan.....	35
Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2020.....	36
Tabel 8. Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2020	37
Tabel 9. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan	40
Tabel 10. Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020	44
Tabel 11. Jenis Institusi.....	57
Tabel 12. Kelompok Institusi.....	58
Tabel 13. Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD.....	59
Tabel 14. Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah.....	60
Tabel 15. Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi	61
Tabel 16. Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi	63
Tabel 17. Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator.....	64
Tabel 18. Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah.....	65
Tabel 19. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	66
Tabel 20. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini	67
Tabel 21. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.....	68
Tabel 22. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	69
Tabel 23. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.....	70

Tabel 24. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan.....	72
Tabel 25. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	72
Tabel 26. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana	73
Tabel 27. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	75
Tabel 28. Jenis Institusi * Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD Crosstabulation	76
Tabel 29. Jenis Institusi * Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah Crosstabulation	77
Tabel 30. Jenis Institusi * Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi Crosstabulation	78
Tabel 31. Jenis Institusi * Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi Crosstabulation.....	79
Tabel 32. Jenis Institusi * Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator Crosstabulation.....	80
Tabel 33. Jenis Institusi * Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah Crosstabulation	81
Tabel 34. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya Crosstabulation	83
Tabel 35. Jenis Institusi * Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini Crosstabulation.....	84
Tabel 36. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan Crosstabulation	85
Tabel 37. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Crosstabulation.....	86
Tabel 38. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan Crosstabulation	88
Tabel 39. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Crosstabulation	89
Tabel 40. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Crosstabulation.....	91

Tabel 41. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana Crosstabulation	92
Tabel 42. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan Crosstabulation	93
Tabel 43. Kelompok Institusi * Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD Crosstabulation	95
Tabel 44. Kelompok Institusi * Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah Crosstabulation.....	96
Tabel 45. Kelompok Institusi * Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi Crosstabulation	98
Tabel 46. Kelompok Institusi * Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi Crosstabulation	99
Tabel 47. Kelompok Institusi * Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator Crosstabulation.....	100
Tabel 48. Kelompok Institusi * Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah Crosstabulation	102
Tabel 49. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya Crosstabulation	103
Tabel 50. Kelompok Institusi * Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini Crosstabulation	105
Tabel 51. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan Crosstabulation	106
Tabel 52. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Crosstabulation	107
Tabel 53. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan Crosstabulation	109
Tabel 54. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Crosstabulation	110
Tabel 55. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Crosstabulation.....	112
Tabel 56. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana Crosstabulation	113

Tabel 57. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan Crosstabulation	114
--	-----

Daftar Inovasi Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi

No.	Nama Inovasi	Nama Institusi
1	Pantau Bulungan	Dinas Komunikasi, Informasi, Dan Persandian
2	TERPANA (Tim Reaksi Cepat Penanganan Gangguan Dan Bencana)	Satpol Pp & Pmk Kab. Bulungan
3	Simpat Tapara (Sistem Pelayanan Administrasi)	Kecamatan Tanjung Palas Utara
4	SILADUJIL (Aplikasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	Disduk Capil
5	Siap Ramlan	Dishub
6	SIMOTIVASI (Sistem Monitoring Dan Evaluasi)	Bagian Administrasi Pembangunan
7	Pembayaran Online Pdrd	Badan Pendapatan Daerah
8	Si Mak Ina Geram	Dinkes Bulungan
9	Gempita (Gerakan Masyarakat Pekerja Cinta Sehat)	Pkm Salimbatu
10	Bank Dahak	Uptd Puskesmas Long Beluah
11	Kampung Herbal	Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
12	Siabang Ramah	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
13	PENDASELWEB (Aplikasi Pendaftaran Dan Seleksi Calon Transmigran Berbasis Website)	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab Bulungan
14	Optikan (Optimilisasi Pemanfaatan Potensi Perikanan)	Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan
15	Sekinjau Semisa (Satu Untuk Semua)	Disduk Capil
16	Gerak Masdulah Sejiwa	Puskesmas Bumi Rahayu
17	Pemetaan Znt (Zona Nilai Tanah)	Badan Pendapatan Daerah
18	“Code Sobat” Quick Response Code Informasi	Puskesmas Tanjung Palas
19	E-Presensi Bulungan	Bkpsdm Kabupaten Bulungan
20	Ss Two (System Support Two)	Bkad
21	Kopi Janda	Uptd Puskesmas Long Beluah
22	Aplikasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
23	Rumah Belajar Desa	Dpmd
24	KAYAN MANTRA (Kampung Nelayan Mandiri Dan Sejahtera)	Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan

No.	Nama Inovasi	Nama Institusi
25	Trct Geber Nata (Tim Reaksi Cepat Tanggap Gerakan Bersih Drainase-Sanitasi)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan
26	Dilankit ((Pelepasan Implant Dengan Teknik Jungkit)	Uptd Puskesmas Tanjung Selor
27	Permen Bawang Dayak	Universitas Kaltara
28	Kopi Di Ati (Kenali Resiko Penyakit Diabetes Dan Hipertensi)	UPTD Puskesmas Long Beluah
29	Srikandi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bulungan
30	Optimalisasi Media Penyiaran Radio Sebagai Media Kie Program Bangga Kencana	Dpppappkb
31	Olabatik (Optimalisasi Pengelolaan Barang Logistik)	Bpbd
32	Gentong Mas Santun	Kecamatan Bunyu
33	Sidini (Sistem Pelaporan Bulanan Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
34	Jebol Anduk La	Disduk Capil
35	Germas Sadar Ecobrick	Dlh Kabupaten Bulungan
36	Sikat Stunting	Uptd Puskesmas Pimping
37	Gerakan BANGKIT (Bantuan Akses Pembayaran Digital/Non Tunai Pajak Dan Retribusi Daerah)	Badan Pendapatan Daerah
38	BERKESAN (Branding Dan Kemasan Olahan Hasil Perikanan)	Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan
39	Implementasi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Bulungan
40	Semangka (Segol Lemo Emak Mengka Ane')	Kantor Camat Tanjung Selor
41	Simpadu Tsel (Sistem Pelayanan Terpadu Tanjung Selor)	Kantor Camat Tanjung Selor
42	Simpelbel (Sistem Pelaporan Belanja Langsung)	Kantor Camat Tanjung Selor
43	Telur Ketan (Tanjung Selor Peduli Kelompok Rentan)	Kantor Camat Tanjung Selor
44	KEBUN TOBURI (Kebun Tanaman Obat Keluarga, Buah Dan Rekreasi)	Kantor Camat Tanjung Selor
45	Ayo Bersama	Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
46	Cap Kuda Mas (Cari Pasien, Kumpul Dahak, Dapat Emas)	Uptd Puskesmas Long Beluah

No.	Nama Inovasi	Nama Institusi
47	Sipenangkis (Sinergitas Data Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem)	Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan
48	Ayo Baper ODF (Ayo Bareng Percepat ODF)	UPTD Puskesmas Tanah Kuning
49	Tana Hati Acil (Pendekatan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil)	Puskesmas Bumi Rahayu
50	Mesin Pencacah Jangkos	Posyantek Sejahtera Mandiri Kecamatan Tanjung Selor
51	Belusa (Bulungan Peduli B2sa)	Dinas Ketahanan Pangan
52	Penting Dekati Gizi	Uptd Puskesmas Long Beluah
53	PINDAKAR ASN (Peningkatan Kedisiplinan Dan Pembinaan Karakter Bagi ASN Di Lingkungan Kecamatan Tanjung Palas)	Kecamatan Tanjung Palas
54	Fueld Card(Kartu Bbm)	Dishub
55	Stop "Wc Terbang" Dengan KERBAU JABLAY	PUSKESMAS LONG BANG
56	Aku Nikah	Dsiduk Capil
57	Pojok ESTEH PTM	UPTD Puskesmas Tanjung Selor
58	KACCER PLUS (Kunjungan Anak Cerdas Ceria Plus)	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
59	Si Ormas	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Bulungan
60	Sebatas Cinta (Sehat Bugar Masyarakat Prioritas, Cek Kesehatan Secra Rutin, Ikuti Aturan, Rajin Olahraga, Tetap Diet Seimbang, Atasi Penyakit Dengan Berobat Teratur)	Puskesmas Bumi Rahayu
61	WAH...ARUMI CANTIK (Wisata Long Beluah Arung Jeram Indah Dan Cantik)	Kecamatan Tanjung Palas Barat
62	Manajemen Pengelolaan Limbah/ Sampah	Kecamatan Tanjung Palas Barat
63	Sippda	Sekretariat Dewan
64	Kalender Sikat TB (Kalender Eliminasi TB Bersama Kader Dan Masyarakat)	Puskesmas Tanjung Palas
65	Papa Minta (Pelayanan Prima Administrasi Pertanahan)	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
66	Blue-E Tunia Pkb (Pengujian Kendaraan Bermotor)	Dishub
67	Teman DUKA KAMI	Disduk Capil
68	Caffein (Caffe Inklusi)	Yayasan Faqih Hasan Centre
69	Algosena (Alat Pengorengan Serba Guna)	Posyantek Karya Guna Kec Tg Palas
70	Berselimpung Data	Dinas Sosial Kabupaten Bulungan

No.	Nama Inovasi	Nama Institusi
71	"RATU SEJAGAT" Rawat, Terapi, Suluh Di Sentra Jaga Kesehatan HIV AIDS Terpadu	UPTD Puskesmas Tanjung Selor
72	Go Pertanian (Gerakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan)	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
73	Transmigrasi Enterpreneur	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Bulungan
74	"Pemanfaatan Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah (DEKRANASDA) Untuk Pemasaran Produk Unggulan (PERAMALAN) Di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan"	Kecamatan Peso Hilir
75	Akper PKP (Aksi Perubahan Pelatihan Arsip)	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bulungan
76	Sigesit	Sekretariat Dprd
77	Jembatan Si Kancil	Disduk Capil
78	Peningkatan Program Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Pojok Kependudukan	DPPPAPPKB
79	Kontes Catin	Dinkes Bulungan
80	Ya Siap RAT (Layanan Persiapan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
81	Siyanduduk Cerdas	Disduk Capil
82	Aku Beda (Asap Ku Lepas Bebek Ku Dapat)	Uptd Puskesmas Tanjung Selor
83	E-SAKIP BULUNGAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
84	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Kepada Masyarakat	Kecamatan Sekatak
85	Gerakan Bersama Peduli Odgj	Dinkes Bulungan
86	Tunggan (Alat Pertanian)	Posyantek Pamabisa Antutan
87	Peningkatan Penyimpanan Arsip Di Kecamatan Tanjung Palas Barat	Kantor Kecamatan Tanjung Palas Barat
88	Rapatbang (Rumah Pendampingan Anak Tumbuh Kembang Gemilang)	Yayasan Faqih Hasan Centre
89	Pos Gemas Umi Ayu (Posbindu Pegawai Puskesmas Bumi Rahayu)	Puskesmas Bumi Rahayu
90	Penataan Dan Penyimpanan Arsip Dokumen LPJ Keuangan	Kantor Kecamatan Tanjung Palas Barat
91	Pena (Pengetahuan Untuk Anak)	Forum Anak Daerah Kabupaten Bulungan

No.	Nama Inovasi	Nama Institusi
92	Mata Cermat (Masyarakat Desa Cerdas Menggunakan Obat)	Uptd. Puskesmas Long Bang
93	Sataraa (Satukan Tekad, Suarakan Hak Anak)	Forum Anak Daerah Kabupaten Bulungan
94	Take Bulungan Hijau (Transfer Anggaran Berbasis Ekologi)	Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan
95	Jasuke (Jamban Sehat Untuk Keluarga)	Uptd Puskesmas Sekatak
96	Ajari Ma Labuh (Anjungan Listrik Mandiri Pelabuhan)	Dishub
97	Sidiabisa (Sistem Informasi Desa Integrasi Bulungan Bisa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
98	Hi-Pip (Hai Pengawas Intern Pemerintah)	Inspektorat Bulungan
99	Matador (Makanan Tambahan Daun Kelor)	Puskesmas Pimping
100	Pil Manis	Dpmptsp
101	Belusa (Bulungan Peduli B2sa)	Dinas Ketahanan Pangan
102	Pak Sukir (Pengelolaan Tempat Khusus Parkir)	Dishub
103	Rotasi Elektrik (Informasi Obat Pasien Dengan Etiket Elektronik)	RSD Dr H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
104	Pelaut (Pelayanan Administrasi Umum Kepada Masyarakat)	Kecamatan Sekatak
105	Selap (Sistem Elektronik Retribusi Persampahan)	Dinas Lingkungan Hidup
106	Si Pabrik (Inovasi Sampah Melalui Ecobrick)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
107	Sistem Informasi Pelayanan Dan Publikasi	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
108	Good Fern (Media Tanam Akar Pakis Multiguna Untuk Pertanian Hidroponik Dan Organik)	Posyantek Kecamatan Bunyu
109	Patriot Bulungan (Pelayanan Pajak Dan Retribusi Online Terpadu)	Bapenda
110	KATROL OBH (Kantong Kontrol Obat Hipertensi)	Puskesmas Tanjung Palas
111	AMPAU HARAPAN BUNYU "Kampung Herbal Keluarga Harapan Kecamatan BUNYU"	Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
112	Smart Farming	Posyantek Bunyu
113	Bulungan Interaktif	DKIP
114	Apem Gelung (Alat Pemisah Janggal Jagung)	Posyantek Karang Agung

No.	Nama Inovasi	Nama Institusi
115	Asin Manis (SWGB) : Pelayanan Pasien Malnutrisi (Stunting, Wasting Dan Gizi Buruk)	RSD Dr H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
116	Optimalisasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan (Opera Pangan)	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
117	Membangun Sistem Informasi Desa	Dpmd
118	Kuning Untuk Kayan Sejiwa (Buku Monitoring Untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa) Di Puskesmas Antutan	Puskesmas Antutan

BAB 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini mengenai Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan. Dalam konteks inovasi daerah, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan inovasi dan efektivitasnya sangatlah penting. Institusi berperan signifikan dalam membentuk ekosistem inovasi, memberikan dukungan kepada inovator, dan memfasilitasi kolaborasi dalam jaringan tersebut (Godlewska et al., 2022). Sistem pengukuran kinerja di pemerintahan daerah penting untuk mengevaluasi dampak faktor-faktor kelembagaan terhadap inovasi dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Laila & Ermawati, 2021). Dengan menilai efektivitas inisiatif-inisiatif inovatif, seperti program percontohan kota yang bertujuan meningkatkan kinerja emisi karbon perkotaan, para pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan berharga untuk mendukung inovasi berkelanjutan dan merumuskan kebijakan (Long et al., 2022).

Reformasi birokrasi dan integrasi inovasi daerah menandakan peralihan menuju pendekatan yang lebih efisien dan modern dalam inovasi pemerintahan daerah (Deni et al., 2022). Kebijakan inovasi kolaboratif di tingkat pemerintahan daerah, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia, menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan kerjasama dalam mengembangkan kebijakan inovatif (Noor, 2023). Program inovatif seperti Program Energi Surya untuk Pengentasan Kemiskinan di China menunjukkan bagaimana inisiatif pemerintah dapat mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sambil mendorong inovasi dan peluang ekonomi (Jin & Dimiter, 2023).

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam sistem inovasi perkotaan, seperti yang dicontohkan di Indonesia, menekankan efek positif dari inovasi yang sukses pada pemerintah daerah dan masyarakat secara luas (Sutriadi et al., 2022). Inisiatif pemerintah daerah dalam mempromosikan ekonomi inovasi berkontribusi pada peningkatan sistem komunikasi, transfer pengetahuan, dan proses inovasi keseluruhan di daerah (Derlukiewicz et al., 2021). Respon inovatif oleh pemerintah daerah selama krisis, seperti pandemi COVID-19, menyoroti pentingnya strategi adaptif dan hasil pembelajaran untuk manajemen krisis yang efektif (Keyes et al., 2022).

Di era big data dan Internet of Things, tantangan dan langkah inovatif yang dihadapi oleh administrasi publik menekankan perlunya analisis data yang komprehensif dan pengambilan keputusan strategis untuk mendorong inovasi (Jin, 2022). Dampak utang pemerintah daerah terhadap inovasi perusahaan menekankan keterkaitan kompleks antara kebijakan keuangan dan hasil inovasi di daerah (Zhang & Jin, 2022). Inovasi dalam sistem manajemen regional, seperti implementasi sistem manajemen inovasi di wilayah Lubusz, menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk mendukung dan meningkatkan ekosistem inovasi (Malon, 2023).

Inovasi sendiri memiliki makna sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya (Rogers, 2003). Inovasi sebagai proses interaktif yang melibatkan banyak orang lain dan sering melibatkan orang lintas sektor (Leoncini & Montresor, 2008). Oleh karena itu, inovasi dimaksudkan sebuah proses yang melibatkan ide dan pendapat dari banyak orang yang berbeda. Inovasi membutuhkan keragaman dan kolektivitas pada saat yang sama, dimana keseimbangan antara keduanya merupakan aspek penting dari kegiatan inovatif saat ini. Keseimbangan ini dipengaruhi oleh pasar maupun kekuatan sosial dan organisasi lainnya (Sakti et al., 2018).

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Inovasi Daerah merupakan pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Inovasi Daerah sasaran diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, terbuka, memiliki nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengarahkan, seluruh Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, 2014). Pemerintah sebagai penggerak pembangunan dituntut untuk dapat menggerakkan masyarakat pada kemandirian dalam menempuh dan menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya dan maksimal. Konsekuensi logis yang diterima dari tuntutan semacam itu, adalah adanya kemampuan manajerial seorang pemimpin pada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Tuntutan adanya pemimpin pemerintah yang berkemampuan handal, bermoral tinggi, loyal dan berdedikasi dalam memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki, ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan di pemerintahan daerah. Setidaknya Laporan Indeks Inovasi Global 2023 dari World Intellectual Property Organization (WIPO) mencatat Indonesia di peringkat 61 dari 132 negara dengan skor total 30,3. Peringkat ini naik 14 posisi dari tahun 2022. Meskipun tren ini positif, capaian inovasi Indonesia masih di bawah enam negara lainnya di ASEAN. Dalam laporan Indeks Inovasi Global 2023, sembilan negara ASEAN termasuk dalam penelitian tersebut.

Untuk mewujudkan good governance, pemerintah perlu melakukan reformasi di berbagai sektor antara lain reformasi institusi pemerintahan, reformasi manajemen sektor publik dan reformasi birokrasi. Dampak dari tekanan tersebut, Indonesia mulai melakukan reformasi pemerintahannya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberi kerangka dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan pengaturan terhadap Pemda di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, maka penataan organisasi terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah menjadi suatu yang tak bisa dihindari untuk merubah paradigma lama yang sentralistik menuju ke arah yang lebih desentralistik.

Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada. Oleh karena itu, daerah

dengan segenap kemampuan yang ada, berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi ekonominya secara maksimal. Salah satu potensi ekonomi yang menjadi prioritas bagi pemasukan daerah adalah berasal dari pelayanan perizinan (Muallidin, 2011).

Jika menengok penelitian terdahulu, telah banyak beberapa yang melihat itu misalkan Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat sejumlah temuan yang relevan dalam konteks inovasi daerah di pemerintah daerah. Salah satunya adalah analisis inovasi perdesaan sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat juga menjadi fokus penelitian terdahulu. Dalam konteks ini, inovasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan penekanan pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan inovasi (Wahyudianto, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi di daerah tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, implementasi inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia juga menjadi topik yang relevan dalam konteks inovasi daerah. Analisis data berdasarkan kategori tertentu, seperti yang dilakukan dalam penelitian terdahulu, memberikan wawasan tentang bagaimana inovasi pelayanan publik dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah (Farhan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi yang tepat.

Adapun itu, implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Trenggalek juga menjadi sorotan dalam konteks inovasi daerah. Kabupaten Trenggalek telah berhasil menerapkan inovasi sistem PTSP, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di tingkat daerah (Tyasotyningarum & Putri, 2021). Keberhasilan implementasi inovasi seperti PTSP ini menunjukkan potensi besar inovasi daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terlihat bahwa inovasi daerah di pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan masyarakat hingga efisiensi layanan publik. Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, penerapan teknologi digital, dan fokus pada kebutuhan masyarakat, inovasi daerah dapat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan di tingkat lokal.

Kendati demikian, para penelitian diatas menekankan pada unsur tertentu yakni seputar ekonomi dan politik dalam keterkaitan inovasi tata kelola. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di atas, penelitian ini berusaha menelaah inovasi tata kelola dari beberapa sudut pandang pemerintahan daerah terutama pada daerah tertentu

Ditingkat negara-negara ASEAN posisi Indonesia untuk keseluruhan indeks sebagaimana tersebut di atas juga menunjukkan pada ranking yang hampir secara keseluruhan rendah. Hal ini bukan karena semangat berinovasi yang kurang tetapi ternyata negara lain yang lebih maju dalam berinovasi. Beberapa kondisi tersebut di atas, tentu saja berkorelasi dengan praktik- praktik penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini, dimana program- program reformasi birokrasi belum berorientasi kepada inovasi-inovasi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas didalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai tantangan dan perubahan paradigma tersebut di atas, sudah barang tentu harus diantisipasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui berbagai terobosan baru, ide-ide baru, sistem kerja baru dan program- program inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Bulungan dalam upayanya meningkatkan daya saing terus melakukan pengembangan inovasi daerah. Ada 5 Kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan laporan Peta Pembinaan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan data indeks inovasi Daerah dari 55 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Kalimantan sebanyak 9 atau 16% Pemerintah Kabupaten atau Kota yang memiliki predikat sangat inovatif. Kabupaen Tana Tidung merupakan salah satu Kabupaten di Kabupaten Bulungan yang masuk kategori sangat inovatif. Kabupaten Bulungan menjadi salah satu Kabupaten di Bulungan yang mendapat predikat Kabupaten yang kurang inovatif, sedangkan 3 Kabupaten/Kota diantaranya mendapat predikat belum mengisi data sehingga perlu adanya pembinaan berupa Inventarisasi dan identifikasi data, Pendampingan atau konsultasi dan advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan dan kolaborasi inovasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Dengan beberapa penjelasan diatas, penelitian ini berupaya melakukan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah utamanya di Kabupaten Bulungan guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Inovasi menjadi alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Fokus pada penelitian ini yaitu

Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas OPD yang terkait dengan tata kelola Pemerintahan, pelayanan publik serta daya saing daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Inovasi daerah merupakan pilar penting dalam percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan di setiap wilayah. Dari ulasan yang disampaikan sebelumnya, berikut dijabarkan beberapa rumusan masalah:

- 1) Bagaimana hasil uji reliabilitas dan validitas pemahaman inovasi daerah di Kabupaten Bulungan?
- 2) Bagaimana kesiapan inisiator dalam implementasi Inovasi Daerah bagi OPD dan UPTD di Kabupaten Bulungan?
- 3) Bagaimana kendala yang hadapi inisiator inovasi daerah dalam melakukan pengembangan dan penerapan inovasi daerah di kabupaten Bulungan?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan ini untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan Berdasarkan data indeks Inovasi Daerah yang diterapkan pada tahun 2019-2021. Pemetaan tersebut nantinya akan menjadi rujukan bagi daerah dalam melakukan replikasi, modifikasi, serta adaptasi dalam meningkatkan Inovasi Daerah dan menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam rangka merumuskan strategi peningkatan Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan dalam berbagai urusan pemerintahan. Adapun secara garis besar, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi gambaran terkait dengan capaian Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah berdasarkan hasil penginputan data indeks inovasi daerah.
- 2) Memberi gambaran tentang inisiatif inovasi daerah di Kabupaten Bulungan
- 3) Menjelaskan pemetaan tentang bentuk inovasi daerah
- 4) Menjelaskan capaian jumlah inovasi berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah
- 5) Memetakan nilai kematangan dari hasil indeks inovasi daerah dan kebijakan inovasi daerah pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menjamin

keberlangsungan inovasi daerah dan mendorong peningkatan nilai dalam indeks inovasi daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagai laporan hasil penelitian, maka disertasi ini ditulis dalam 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab pertama dijabarkan mulai kebijakan inovasi daerah secara global dan tingkat lokal, sampai pada penyelenggaraan pemerintahan daerah inovatif sebagai kebijakan nasional dan implementasinya pada tingkat daerah.
- 2) Bab Dua membahas mengenai kerangka pemikiran penelitian. Diawali dengan kajian literatur mengenai teori-teori tentang inovasi daerah dan penjelasan mengenai daya saing daerah.
- 3) Bab tiga memaparkan mengenai metodologi penelitian sebagai upaya atau Teknik dalam perspektif, dalam mengelola data.
- 4) Bab empat memaparkan hasil temuan lapangan yang berupa gambaran Karakteristik Indeks Inovasi Daerah Bulungan dan Inovasi Daerah Berdasarkan Bentuknya
- 5) Bab lima memaparkan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi dalam pemetaan dan penguatan inovasi daerah.

BAB 2

Tinjauan Pustaka



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep-Konsep Inovasi

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut (Mulyana, 2014), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering di gunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut (Aryanto et al., 2015) inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietaas dan lingkungan.

Hampir sama dengan inovasi organisasi menurut Sutarno (2012:134-135) yang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam

sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik, perlu dilakukan terobosan inovasi. Pada umumnya inovasi sering kali diartikan sebagai penemuan hal baru, namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta. Saat ini, nilai sektor bisnis memang saatnya diadopsi oleh sektor pemerintah “corporate value”. Belakangan hanya dalam institusi korporasi, namun juga dalam instansi pemerintah. Walaupun inovasi saat ini masih ada pro dan kontra, akan tetapi jika tidak dilakukan maka tidak akan pernah ada pembaharuan atau perubahan (Kasali, 2012); (Wulandari et al., 2019).

Kegiatan Inovatif sering kali disebut Inovasi. Roger dan Roger dalam (Purba, 2009) menyatakan, Inovasi biasanya dibatasi sebagai ide atau gagasan, praktik, dan objek atau benda yang dinyatakan baru oleh individu. Dalam arti lain, inovasi adalah sesuatu yang disengaja, baru, perubahan khusus yang dianggap lebih manjur untuk mewujudkan tujuan dari suatu sistem (Miles, 1973). Sedangkan, Inovasi merupakan pembaharuan, penemuan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan, metode, alat, produk atau yang lainnya (Robbins, 1997); (Purba, 2009). Pembaruan ini berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.

Pada umumnya inovasi dapat diklasifikasikan atas dua kelompok yakni pertama, penemuan baru (discovery) yang mencakup semua penemuan atas eksistensi dari suatu aspek kenyataan. Kedua, penemuan baru (invention) yang mencakup hasil-hasil penemuan apabila unsur-unsur budaya yang dikombinasikan menjadi satu bentuk yang tidak ada sebelumnya (Schaefer & Lamm, 1986); (Purba, 2009). Gagasan baru atau inovasi (innovation's) merupakan konsep yang yang dapat menjadi alat untuk

melakukan perubahan sosial. Gagasan baru dapat berwujud sebagai ide, pengetahuan ataupun peralatan fisik yang dapat dipelajari dan dipraktikkan untuk lebih memudahkan serta meningkatkan kesejahteraan hidup (Drucker, 1985); (Purba, 2009).

Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau obyek yang dipahami sebagai sesuatu yang baru oleh masing-masing individu atau unit pengguna lainnya untuk diadopsi. Karakteristik yang terdapat dalam inovasi dapat dijelaskan sebagai berikut (Rogers et al., 2019):

1) *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2) *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompetibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3) *Complexity* (Kerumitan)

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4) *Triability* (Kemungkinan Dicoba)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fasi “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5) *Observability* (Kemudahan Diamati)

Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Inovasi telah menjadi diskusi yang populer baik di kalangan akademisi, pemerintah, praktisi, dan masyarakat di seluruh dunia saat ini. Inovasi yang semula hanya digunakan dalam berbagai aktivitas di sektor swasta atau bisnis, justru perkembangannya saat ini inovasi juga digunakan di sektor publik. Menurut (Valkama et al., 2013), aktivitas-aktivitas inovasi yang dilakukan di sektor publik tidak terlepas dari adanya perubahan global dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ilmuwan administrasi publik dan organisasi sektor publik dalam merespon perkembangan teknologi dan ekonomi dunia saat ini (Asmara & Rahayu, 2019).

2.2. Regulasi dan Kebijakan Inovasi

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang

Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan. Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

Kebijakan inovasi daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas

pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum (Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan

Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Inovasi daerah yang dimaksud dalam bab tentang inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai stakeholders dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Pandangan-pandangan pembaharuan ini menjauhkan tipe penyelenggaraan manajerial yang otokratik maupun paternalistik.

Administrasi dan manajemen pemerintahan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada semua tingkat dan satuan organisasi, diisi dengan manusia dan sumber-sumber daya lainnya yang harus dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap tahapan penting proses penyelenggaraan tugas-tugas tersebut akan adaptif terhadap perkembangan, jika terbuka peluang adanya pembaharuan dan/atau inovasi.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

Selanjutnya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Untuk selanjutnya Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat.

Di dalam salah satu pasal disebutkan juga bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada 8 prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

2.3. Daya Saing Daerah

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya aing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global. Situasi global yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari lembaga litbang, Perguruan Tinggi, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata (Ristek-BRIN, 2020).

Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah

dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta keberlanjutan. Dengan tujuan dari pengukuran Indeks Daya Saing daerah, antara lain yaitu pertama, mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kedua, menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Ketiga, sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia. Keempat, menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Dan kelima, menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah (Ristek-BRIN, 2020).

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu. World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Institute for Management

Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial. European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal (Ristek-BRIN, 2020).

Sebuah negara atau sebuah region (Kabupaten/Provinsi) disebut kompetitif jika mengembangkan perusahaan beroperasi untuk berkompetisi dengan penuh keberhasilan dalam perekonomian global dan pada sisi lain mendukung peningkatan upah dan standar kehidupan pada penduduk secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang dimana bangsa atau region memberdayakan sumber daya manusia, modal dan sumber daya alamnya. Produktivitas diukur dari peningkatan upah berkesinambungan (sustainable wages), pertumbuhan kesempatan kerja (job growth), dan standar hidup (standar of living). Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri sebuah region berkompetisi dalam industri sejenis. Region berkompetisi dalam hal menawarkan sebuah lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha. Konsep mengenai daya saing terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Kesamaan pandangan tersebut adalah bahwa tujuan akhir dari upaya untuk meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan (standart of living) dari masyarakat yang ada di dalam perekonomian tersebut. Sementara itu, konsep dan tujuan kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yang tidak hanya dapat diwakili oleh kinerja pertumbuhan ekonomi saja, tetapi oleh banyak indikator-indikator ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhinya. Sedangkan perbedaannya adalah terpusat pada wilayah, dimana daya saing daerah mencakup daerah (bagian dari suatu negara), sedangkan daya saing nasional mencakup negara. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah (Ristek-BRIN, 2020).

Institute for Management Development menilai kemampuan daya saing negara didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu pertama, kinerja perekonomian, terdiri dari 83 kriteria yang mencakup ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga. Kedua, efisiensi pemerintah, terdiri dari 70 kriteria yang mencakup keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusional, peraturan perundangan dunia usaha dan kerangka kerja masyarakat. Ketiga, efisiensi dunia usaha, terdiri dari 71 kriteria yang mencakup produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, perilaku dan nilai-nilai. Dan keempat, infrastruktur, terdiri dari 114 kriteria yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Dan European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu Institusi, Stabilitas makroekonomi, Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dasar, Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup, Efisiensi pasar tenaga kerja, Luas pasar, Ketersediaan teknologi, Kemudahan usaha, dan Inovasi (Ristek-BRIN, 2020).

BAB 3

Metodologi



BAB III

METODOLOGI

3.1. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, (2011), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Dalam tujuan penelitian ini, yaitu untuk terkumpulnya data secara kuantitatif mengenai Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode survey. Menurut Singarimbun dan Effendi (2008), mengatakan bahwa “penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”. Metode survei ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sesuatu secara keseluruhan dari wilayah atau objek penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut berlaku umum untuk seluruh wilayah yang menjadi sasaran.

3.2. Jenis Penelitian

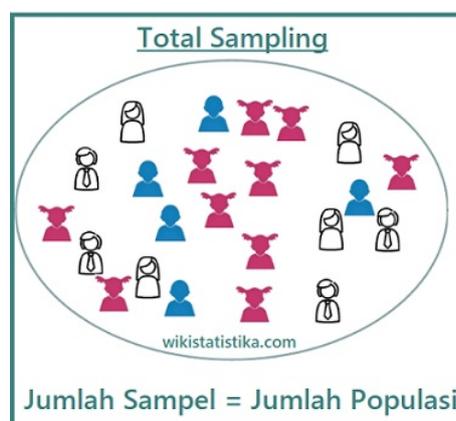
Kajian ini merupakan kajian dengan jenis penelitian survei. Penelitian Survei adalah penelitian dengan memberi suatu batas yang jelas tentang data. Jenis penelitian survei ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui deskripsi kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2011), Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau

kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penyusunan kajian ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Lokasi Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bulungan Bulungan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling yaitu pengambilan sampel di mana seluruh populasi diambil sebagai data sampel untuk diukur atau diobservasi. Umumnya teknik ini digunakan apabila populasi relatif kecil atau ketika biaya pengambilan sampel relatif kecil jika dibandingkan dengan biaya pengumpulan data yang akurat. Teknik pengambilan sampel dengan metode total sampling biasanya digunakan dalam survei atau studi populasi yang terbatas jumlahnya, atau penelitian yang melibatkan populasi dalam jumlah kecil lainnya.



Gambar 1. Ilustrasi Teknik pengambilan sampel

Menurut Arikunto (2006) apabila subjek penelitian memiliki jumlah kurang dari seratus, maka lebih baik diterapkan metode total sampling yaitu semua populasi menjadi sampel dalam penelitian. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih. Pendapat tersebut sesuai dengan Roscoe dalam Sugiyono (2011), dimana ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Dari keseluruhan populasi atau responden yang didapatkan berjumlah 50 responden, maka sesuai pendapat diatas jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil seluruhnya dari jumlah populasi. Sehingga didapatkan jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 50 responden.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan instrumen berupa kuisiner. instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa kuisiner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Arikunto (2006) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai inovasi daerah di Kabupaten Bulungan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

3.5. Teknik Pengolahan Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisa deskriptif merupakan salah satu jenis data yang dimaksudkan adalah untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau karakteristik dari masing-masing variabel penelitian secara tunggal yang menggunakan analisis distribusi frekuensi, presentase, dan rata-rata (mean), serta standar deviasi.

Beberapa rumus yang digunakan :

1. **Rumus Presentase**

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Presentase

F : Frekuensi Jawaban Responden

N : Jumlah Responden/Sampel

2. **Rumus Rata-Rata (mean)**

$$M = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

M : Rata-rata

X : Nilai / Harga

N : Jumlah Data

3. **Perhitungan Interval**

Pada perhitungan interval ini menggunakan pendapat menurut Kiswanto³⁸ :

a) Jumlah Kelas Interval (K)

$$K = 1 + 3,3 (\text{Log } N)$$

b) Rentang Data (R)

$$R = \text{Nilai data tertinggi} - \text{Nilai data terendah}$$

c) Lebar Interval

$$I = R/K$$

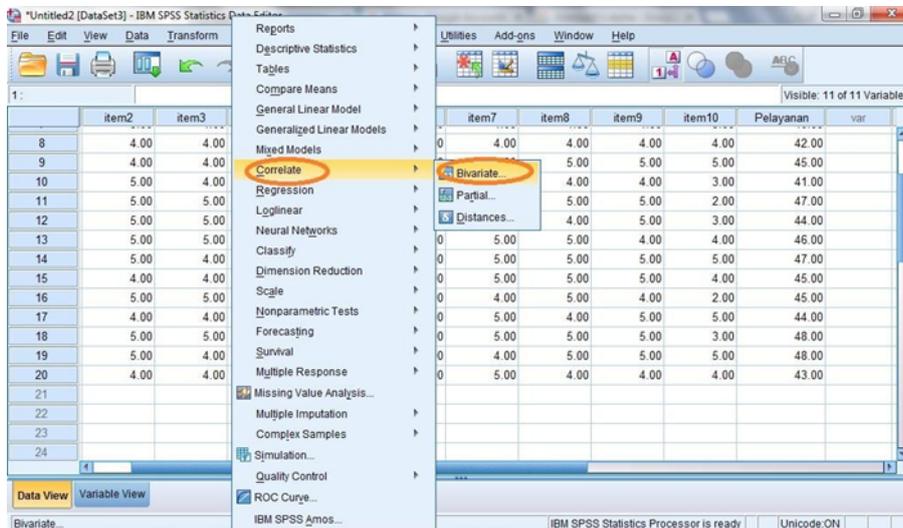
3.5.2. Uji Validitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS ini menggunakan Korelasi Product Moment. Validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesiner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Sebelum kita melakukan pengujian, baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu kuesiner bisa dikatakan valid dan reliabel. Penjelasan berikut:

Pertama, uji validitas

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung dan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan tidak valid. R hitung dicari dengan menggunakan program spss, sedangkan r tabel dicari dengan cara melihat tabel r dengan ketentuan r minimal adalah 0,3 (lihat buku sugiyono, 2011).

Berikut adalah tampilan uji validitas menggunakan SPSS



Hasil pengujian Validitas

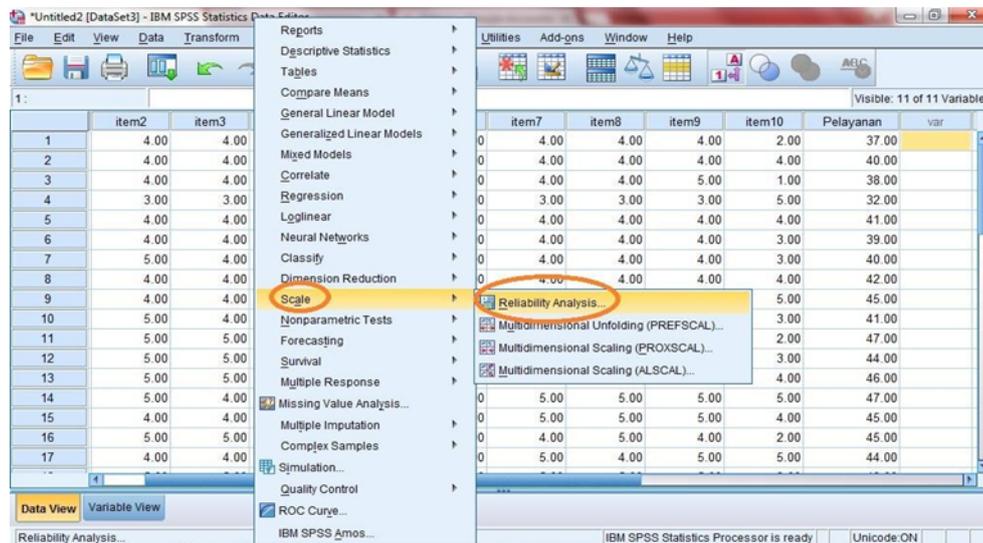
Correlations											
	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10	Pelayanan
item1	1	.615 ^{**}	.735 ^{**}	.801 ^{**}	.390	.437	.259	.632 ^{**}	.348	-.087	.703 ^{**}
		.004	.000	.000	.084	.084	.270	.016	-.192	.714 ^{**}	.001
		N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item2		1	.740 ^{**}	.800 ^{**}	.628 ^{**}	.349	.339	.629 ^{**}	.412	-.281	.704 ^{**}
			.004	.000	.000	.003	.131	.166	.003	.071	.286
			N	20	20	20	20	20	20	20	20
item3			1	.914 ^{**}	.446	.366	.446	.617 ^{**}	.404	-.439	.670 ^{**}
				.000	.000	.000	.049	.119	.044	.278	.083
				N	20	20	20	20	20	20	20
item4				1	.830 ^{**}	.438	.387	.693 ^{**}	.480	-.301	.761 ^{**}
					.000	.000	.000	.112	.001	.032	.197
					N	20	20	20	20	20	20
item5					1	.719 ^{**}	.642 ^{**}	.695 ^{**}	.479	-.139	.731 ^{**}
						.084	.003	.048	.014	.001	.032
						N	20	20	20	20	20
item6						1	.719 ^{**}	.719 ^{**}	.640 ^{**}	.160	.810 ^{**}
							.084	.003	.002	.026	.001
							N	20	20	20	20

3.5.3. Uji Reliabilitas

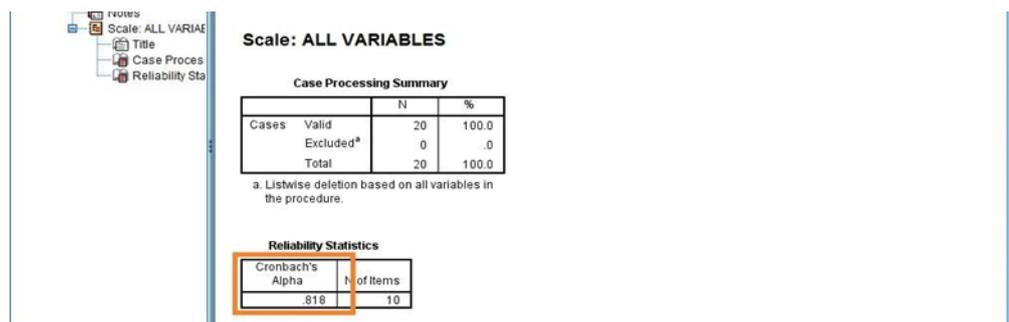
Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka cronbach alpha dengan ketentuan nilai cronbach alphan minimal adalah 0,6. Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan spss lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan

kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel.

Gambar Uji Reliabilitas:



Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel.



3.6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan perangkat software SPSS. Hasil analisis SPSS akan menampilkan beberapa informasi dari serangkaian hasil uji. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi), distribusi, dan representasi bergambar (grafik).

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan coding sebagai proses penganalisaan. Prosedur pengelolaan data setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Merujuk pada Prasetyo (2006) pengolahan data dilakukan dengan pertama, Pengkodean data (data coding) Pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah dari kuisisioner dengan ketentuan yang ada, . kedua, adalah Pembersihan data yaitu memastikan seluruh data sesuai dengan data yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah Tabulating. Tabulating adalah memasukan data kedalam tabel-tabel tertentu dan mengitungnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada responden disetiap kuisisioner yang telah ada, sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data.

BAB 4

Gambaran Umum



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

4.1.1. Kondisi Geografi dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bulungan secara astronomis, terletak antara 2° 09' 19" – 3° 34' 48" Lintang Utara dan 116° 04' 41" – 117° 57' 56" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulungan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan;

- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau;
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.

Luas Wilayah Kabupaten Bulungan sekitar 13.181,92 km² yang terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Peso dengan luas wilayah mencapai 3.142,79 km² atau 23,84% dari luas Kabupaten Bulungan. Diurutan kedua ada Kecamatan Sekatak dengan luas wilayah mencapai 1.993,98 km² atau 15,13%, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah mencapai 1.755,74 km² dan Kecamatan Peso Hilir dengan luas wilayah 1.639,71 km². Sementara itu Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu dengan luas wilayah sebesar 198,32 km² atau 1,50% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan, Kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Utara. Selain wilayah daratan yang berada di Pulau Kalimantan, Kabupaten Bulungan juga memiliki wilayah daratan yang berupa pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 86 pulau yang tersebar di tujuh Kecamatan (Tabel 1).

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
1. Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	7
2. Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	-
3. Peso Hilir	Long Tunggu	1.639,71	12,44	-
4. Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	15

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
5. Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	1
6. Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	3
7. Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	-
8. Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	1
9. Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	59
10. Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	0
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Secara Administrasi 10 Kecamatan di Kabupaten Bulungan di bagi menjadi 81 Kelurahan dan Desa. Dilihat dari jumlah desa per kecamatan (Tabel 2.2) ada dua hal yang menarik, pertama kesenjangan luas desa relatif sangat besar, kedua selama lima tahun terakhir tidak terjadi pemekaran desa dalam kecamatan yang wilayahnya luas (BPS, Kabupaten Bulungan, 2021) sebagai Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2. Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Proporsi luas Desa (%)
Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	3	0,50%
Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	10	2,38%
Peso Hilir	Long Tunggu	1.639,71	12,44	6	2,07%
Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	22	0,69%
Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	9	1,48%
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	5	1,62%
Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	3	1,58%
Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	8	1,21%
Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	6	1,02%
Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	9	0,57%
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	81	100,00%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Pemerataan Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bulungan masih menghadapi permasalahan isolasi wilayah. Dampaknya, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih terisolir belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya untuk infrastruktur dasar. Indikator yang digunakan untuk menilai status isolasi wilayah adalah letak geografis yang berhubungan dengan infrastruktur perhubungan, dan

proporsi rata-rata luas wilayah desa. Berdasarkan indikator tersebut, desa-desa yang terisolasi terdapat di Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat.

Kondisi demikian harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan untuk lima tahun mendatang (RPJMD 2021-2026) yang akan diimplementasikan oleh kepala daerah hasil pemilihan umum daerah mendatang. Pemekaran jumlah desa untuk kecamatan dengan rata-rata proporsi luas desa >1,5% perlu didorong, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menurunkan derajat isolasi wilayah. Rata-rata proporsi luas desa yang ideal berdasarkan data empiris untuk Kabupaten Bulungan adalah sekitar 1% dari luas wilayah kabupaten yang mencapai 13.181,92 km². Jadi ada lima kecamatan di Kabupaten Bulungan yang layak melakukan penambahan jumlah desa, tentunya dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Sehingga, pemekaran jumlah desa tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah daerah.

4.1.2. Kondisi Demografi

Data kependudukan merupakan salah satu informasi sangat penting untuk menjelaskan tentang gambaran umum suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 sebanyak 151.844 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama sepuluh tahun >8,66% (Tabel 2.9) . Berdasarkan tabel 2.9 terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah kecamatan Tanjung Palas Timur, dan sebaliknya satu kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk negatif yaitu Kecamatan Peso Hilir.

Tabel 3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan penduduk/Tahun		
	2010	2018	2019	2020	2010-2018	2018-2019	2019-2020
Bunyu	11.139	11.609	11.495	11.689	0,36	-0,98	9,09
Peso	4.327	4.053	4.033	4.400	-0,75	-0,49	7,88
Peso Hilir	3.484	3.833	3.832	4.134	1,11	-0,03	-0,37
Sekatak	9.278	8.859	8.928	10.824	-0,42	0,78	4,31
Tanjung Palas	14.029	16.543	16.829	17.556	2,22	1,73	24,04
Tanjung Palas Barat	5.832	6.379	6.440	6.416	1,16	0,96	3,20
Tanjung Palas Tengah	7.527	10.519	10.812	11.567	4,85	2,79	6,98
Tanjung Palas Timur	8.651	13.465	14.527	18.020	7,55	7,89	21,23
Tanjung Palas Utara	8.954	10.320	10.405	10.651	1,80	0,82	1,68

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan penduduk/Tahun		
	2010	2018	2019	2020	2010-2018	2018-2019	2019-2020
Tanjung Selor	39.439	50.624	52.432	56.569	3,66	3,57	7,31
Total Kab. Bulungan	112.660	136.204	139.733	151.844	2,67	2,59	8,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan aspek distribusi penduduk, Kecamatan Tanjung Selor merupakan wilayah yang menampung jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh kecamatan tanjung palas dan Tanjung Palas Timur, sedangkan kecamatan Bunyu menduduki urutan keempat. Tetapi berdasarkan kepadatan penduduk, Kecamatan Bunyu menduduki peringkat kedua sebagai wilayah kecamatan yang berpenduduk padat setelah Kecamatan Tanjung Selor (Tabel 2.10).

Sedangkan berdasarkan ratio jenis kelamin (L/P), semuanya mempunyai nilai ratio L/P > 100, yang berarti jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan (Tabel 2.10). Ketersediaan tenaga Manusia (SDM) didukung oleh data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Bulungan sudah memasuki era bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif (usia 15 tahun hingga 64 tahun) mencapai 68,03%, dan sisanya 27,62% merupakan kelompok usia muda (usia < 15 tahun) dan jumlah paling kecil merupakan penduduk kelompok umur ≥ 65 tahun (4,34%).

Tabel 4. Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada masing- masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Distribusi Jumlah Penduduk (%)		Kepadatan (org) Penduduk/km ²			Ratio Jenis Kelamin L/P		
	2018	2019	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bunyu	8,52	8,22	58,54	57,96	58,94	115,6	113,7	113,7
Peso	2,98	2,89	1,29	1,28	1,40	115,5	115,7	127,3
Peso Hilir	2,81	2,74	2,34	2,34	2,52	117,8	118,2	128,7
Sekatak	6,50	6,39	4,44	4,48	5,44	111,7	110,2	116,4
Tanjung Palas	12,15	12,04	9,42	9,59	10,00	108,3	109,9	110,8
Tanjung Palas Barat	4,68	4,61	5,99	6,05	6,03	120,2	120,9	117,7
Tanjung Palas Tengah	7,72	7,74	16,83	17,30	18,51	110,3	111,1	112,3
Tanjung Palas Timur	9,89	10,40	10,54	11,37	14,10	118,1	118,1	131,4
Tanjung Palas Utara	7,58	7,45	12,80	12,90	13,21	109,9	110,3	110,1
Tanjung Selor	37,17	37,52	74,69	77,36	83,46	115,6	109,7	110,9
Total Kab. Bulungan	100,00	100,00	10,33	10,60	11,52	111,7	112,0	115,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain: capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Meski indikator - indikator di atas tidak memotret secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum.

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 18,71 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 18,29 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 25,23 persen (angka ini mengalami penurunan dari 27,58 persen di tahun 2016). Selanjutnya

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,23 persen (meningkat dari 17,27 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,01 persen (menurun dari 14,26 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,88 persen (meningkat dari 11,61 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,20 persen (meningkat dari 7,53 persen di tahun 2016).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Industri Pengolahan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Meningkatnya peranan sektor Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor merupakan salah satu efek yang ditimbulkan karena pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan mengingat statusnya sebagai Ibukota Provinsi.

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atss dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 129,03 juta rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 128,75 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan inflasi, secara nominal nilai PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 79,94 juta rupiah menjadi 81,76 juta rupiah pada tahun 2019.

Tabel 5. PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
Nilai PDRB/GRDP (Triliun Rupiah/Trillion rupiahs)						
- ADHB/at current price	12,98	13,63	15,27	16,80	18,30	18,72
- ADHK/at 2010 Constant Price	9,72	10,00	10,57	11,11	11,63	11,55
PDRB per Kapita/ Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)						
- ADHB/at current price	100,29	102,88	112,43	120,95	128,75	129,03
- ADHK/at 2010 Constant Price	75,10	75,43	77,86	79,94	81,76	
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price						
	-0,33	0,44	3,22	2,67	2,29	
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)						
	129	133	136	130	142	151
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)						
	2,61	2,44	2,44	2,29	2,34	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

Ket : * Angka Sementara/preliminary Figures,

Angka Sangat Sementara/very preliminary Figures

C. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 13,08 ribu jiwa (kondisi Maret 2020) atau sebesar 9,06 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selama 2017 -2020 garis kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2017, tercatat garis kemiskinan Kabupaten Bulungan sebesar Rp.398.397,00/kapita/bulan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,06 persen menjadi Rp. 472.569/kapita/bulan.

Tabel 6. Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan

Tahun	Garis Kemiskinan Rupiah/Kapita/Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	398.397	13,40	9,93
2018	413.294	13,03	9,44
2019	448.548	12,40	8,78
2020	472.569	13,08	9,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021

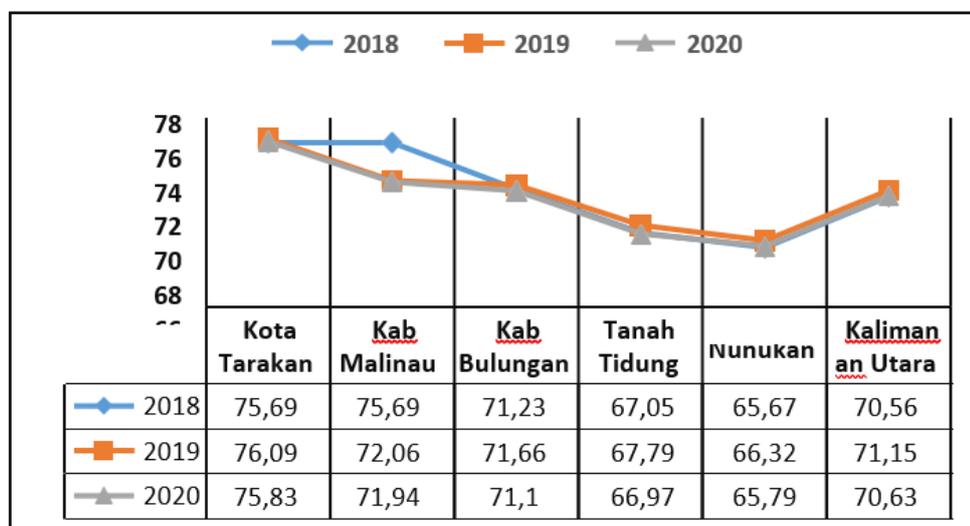
D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulungan pada tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bulungan mencapai 71,10. Terjadi penurunan -0,56 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2019 (71,66 tahun 2019 menjadi 71,10 tahun 2020).

Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2018	71,23
2019	71,66
2020	71,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2021



Gambar 2. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, 2021

Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai 75,83. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing-masing adalah IPM Kabupaten Malinau (71,94) dan IPM Kabupaten Bulungan (71,10).

Tabel 8. Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2020

Uraian	2018	2019	2020
Indikator IPM			
Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,55	72,60	72,66
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,98	12,99	13,00
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,93	8,94
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000Rp)	9.310	9.648	9.121
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,23	71,66	71,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa, angka harapan hidup Kabupaten Bulungan mencapai 72,66 pada tahun 2020, angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tahun 2020, penduduk Bulungan memiliki harapan untuk hidup selama 72-73 tahun. Angka harapan hidup merupakan indikator capaian bidang kesehatan, dengan demikian Kabupaten Bulungan memiliki capaian tingkat kesehatan yang cukup baik.

Angka harapan lama sekolah menunjukkan angka yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak usia tujuh tahun karena mengikuti program wajib belajar pemerintah. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Bulungan mencapai 13,00 tahun, nilai tersebut melebihi target pemerintah. Artinya penduduk Bulungan dapat menempuh pendidikan formal dari usia tujuh tahun (sekolah dasar) selama 12 tahun (hingga sekolah menengah atas). Sedangkan Angka Rata-rata lama sekolah Bulungan pada tahun 2020 mencapai 8,94 tahun artinya, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah yang ditempuh seseorang yang berusia 25 tahun keatas hanya sebesar 8,94 tahun. Dilihat berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulungan, sasaran peningkatan IPM pada capaian saat ini masih dibawah 9 tahun, artinya rata-rata lama sekolah seorang siswa belum dapat mencapai masa kelulusan SMP.

Rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP) di Kabupaten Bulungan tahun 2020 mencapai Rp. 9.121.000,- mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 9.648.000,- Angka ini berguna untuk mengukur dimensi standar hidup layak dalam IPM dan memberikan gambaran mengenai paritas daya beli penduduk di wilayah Kabupaten Bulungan.

4.3. Konsepsi Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bulungan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi nyata pada saat perencanaan pembangunan disusun. Potensi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan secara umum lebih banyak timbul dari adanya potensi daerah yang belum dimanfaatkan atau diberdayakan secara optimal, kelemahan internal yang belum teratasi secara maksimal, besarnya peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta antisipasi yang belum maksimal dari adanya ancaman eksternal.

Permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari evaluasi pencapaian target-target pembangunan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Permasalahan pembangunan ini salah satunya dapat diperoleh dari hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya, dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Bupati baik dalam periode tahunan maupun pada akhir masa jabatan Bupati.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Bulungan untuk lima tahun mendatang masih relevan dengan arahan yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025, yaitu:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Pengembangan Ekonomi Wilayah;
- 3) Prasarana Dasar;
- 4) Kebijakan Publik Pemerintahan dan Penegakan Hukum;
- 5) Penataan Ruang dan Lingkungan.

Adapun isu utama pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk lima tahun mendatang, dari lima isu tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penetapan isu-isu strategis tersebut di atas relevan dan sinergis dengan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri dari tujuh agenda, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Gambar 4.1).



Gambar 3. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024

Sumber : RPJMN 2020-2024

Pada periode tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Kalimantan akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Tabel 9. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Kalimantan Barat	1	Kota Pontianak*	Kalimantan Selatan	1	Kabupaten Barito Kuala
	2	Kabupaten Kubu Raya		2	Kota Banjarmasin
	3	Kabupaten Ketapang		3	Kabupaten Banjar
Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Lamandau		4	Kota Banjar Baru
	2	Kabupaten Kotawaringin Timur		5	Kabupaten Tanah Laut
	3	Kabupaten Katingan		6	Kabupaten Tanah Bumbu
	4	Kota Palangkaraya*		7	Kabupaten Kota Baru
Kalimantan Timur	1	Kota Balikpapan*	Kalimantan Utara	1	Kota Tarakan*
	2	Kota Samarinda*			
	3	Kabupaten Kutai Kartanegara			
	4	Kabupaten Penajam Paser Utara			
Koridor Pemerataan					
Kalimantan Utara	1	Kabupaten Malinau	Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Kotawaringin Barat
	2	Kabupaten Nunukan		2	Kabupaten Pulang Pisau
	3	Kabupaten Bulungan		3	Kabupaten Seruyan
	4	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Barat	1	Kabupaten Sambas
Kalimantan Timur	1	Kabupaten Paser		2	Kota Singkawang*
	2	Kabupaten Kutai Barat		3	Kabupaten Bengkayang
	3	Kabupaten Kutai Timur		4	Kabupaten Landak
	4	Kabupaten Bontang		5	Kabupaten Mempawah
	5	Kabupaten Berau			

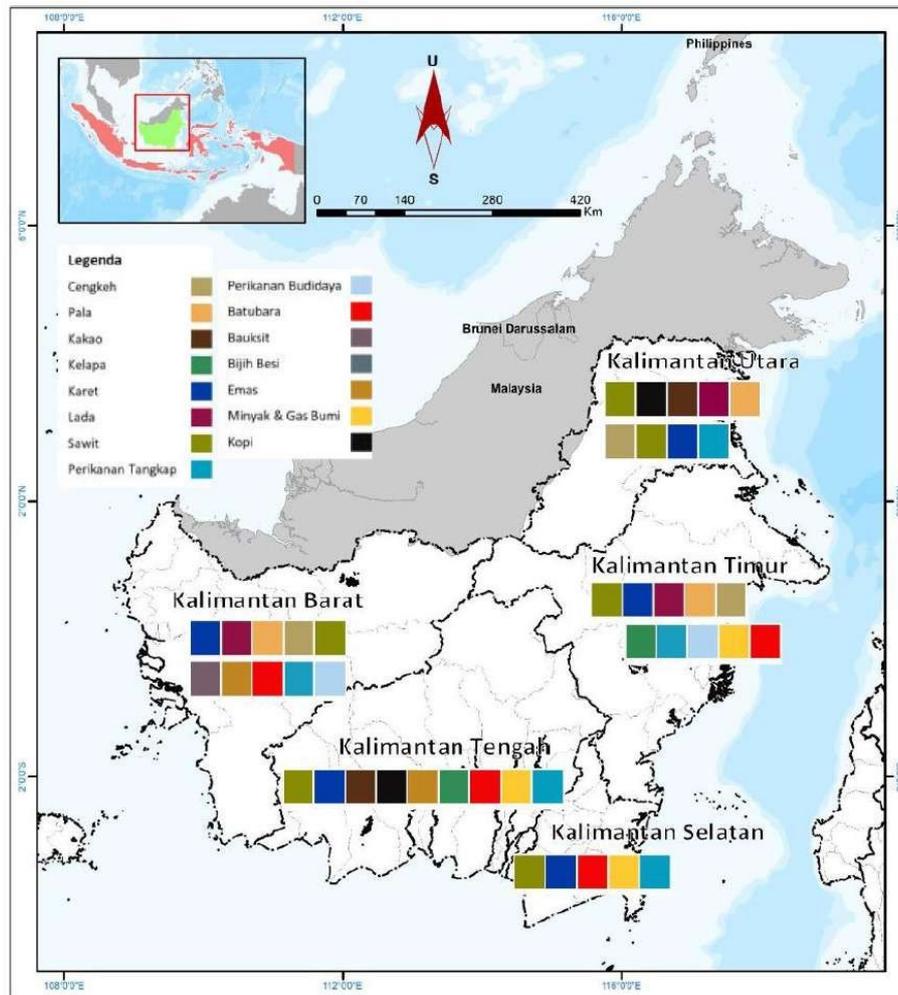
Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

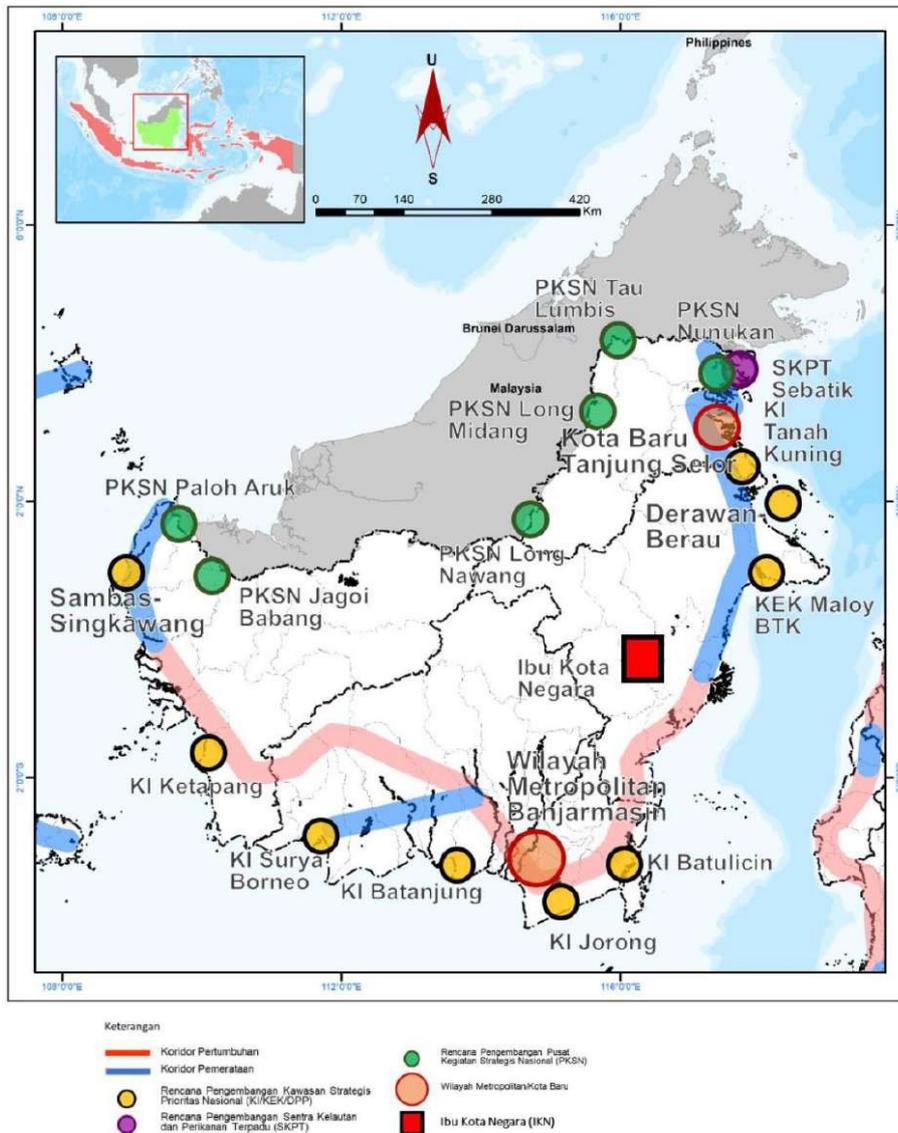
Sumber: Lampiran 4 RPJMN 2020-2024 - Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan pada komoditas kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh dan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Proyek prioritas kawasan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Bulungan, antara lain Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning, pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, dan Pengembangan Bandara Tanjung Harapan.

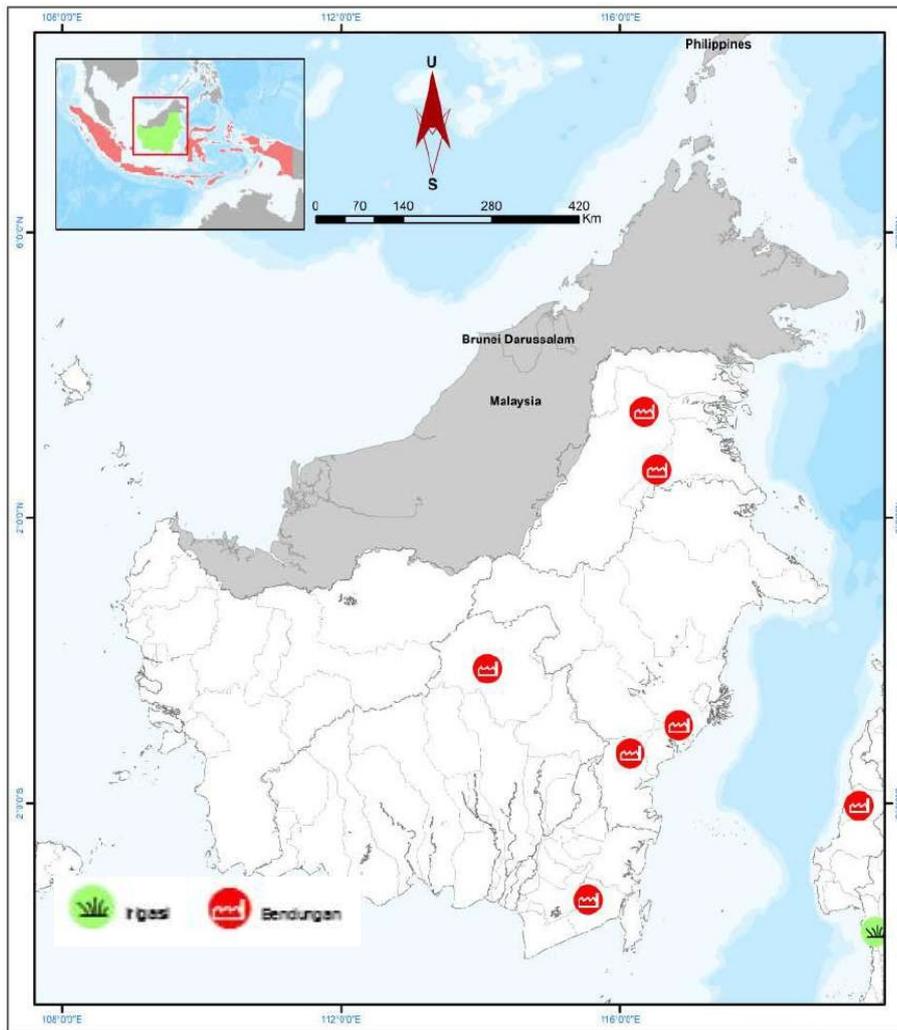
Peta-peta sebaran rencana pengembangan komoditas unggulan, kawasan strategis, dan infrastruktur pengairan berdasarkan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan
 Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 5. Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan
 Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 6. Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah di Kalimantan

Sumber: RPJMN 2020-2024

Sementara berdasarkan arahan gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam Rapat Koordinasi Gubernur, disampaikan beberapa isu strategis dalam pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

- 1) Masih rendahnya kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai
- 2) Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
- 3) Masih terkonsentrasinya penduduk di pusat pertumbuhan ekonomi
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lahan
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, perikanan dan kelautan
- 6) Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global

- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan pendidikan
- 8) Belum terpenuhinya kebutuhan energi dan air baku
- 9) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan transportasi karena belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana transportasi
- 10) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan tata kelola air baku
- 11) Masih rendahnya ketersediaan jaringan listrik
- 12) Terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan komunikasi dan informatika

Peningkatan kualitas SDM merupakan modal yang sangat penting untuk akselerasi pembangunan daerah di segala bidang karena Kabupaten Bulungan telah memasuki era bonus demografi (Tabel 4.2). Keberhasilan pada sektor ini akan berdampak positif pada empat isu-isu lainnya, tetapi jika sebaliknya, terjadi kegagalan akan menimbulkan dampak negatif, dan secara nasional akan mendukung Agenda 1, 3, 4, 6, dan 7. Menonjolnya isu peningkatan kualitas SDM ini dapat dilihat pada gambaran dan dinamika demografi Kabupaten Bulungan tahun 2019 (Tabel 4.2).

Tabel 10. Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/Tahun)	Ratio Jenis Kelamin L/P
1. Bunyu	11.495	8.22	57.96	-0.98	113.7
2. Peso	4.033	2.89	1.28	-0.49	115.7
3. Peso Hilir	3.832	2.74	2.34	-0.03	118.2
4. Sekatak	8.928	6.39	4.48	0.78	110.2
5. Tanjung Palas	16.829	12.04	9.59	1.73	109.9
6. Tanjung Palas Barat	6.440	4.61	6.05	0.96	120.9
7. Tanjung Palas Tengah	10.812	7.74	17.30	2.79	111.1
8. Tanjung Palas Timur	14.527	10.40	11.37	7.89	118.1
9. Tanjung Palas Utara	10.405	7.45	12.90	0.82	110.3
10. Tanjung Selor	52.432	37.52	77.36	3.57	109.7
Total Kab. Bulungan	139.733	100.00	10.60	2.59	112.0

Sumber: BPS, Kabupaten Bulungan 2021

Berdasarkan gambaran dan dinamika demografi pada Tabel 4.2 tersebut di atas diketahui bahwa kondisi Kabupaten Bulungan kurang/tidak ideal. Sebab ada wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah (<10 jiwa/km²), dan pertumbuhan penduduknya justru negatif atau rendah, yaitu Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Bunyu.

Kondisi ini diperkirakan mempunyai kaitan erat dengan terbatasnya penyediaan prasarana dasar, khususnya prasarana jaringan jalan dan akses listrik. Pada sisi lain, ada wilayah kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, hal ini berkaitan dengan posisi kecamatan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja. Secara khusus, untuk Kecamatan Bunyu pertumbuhan penduduknya yang negatif, kondisi tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh adanya pemutusan hubungan kerja dari beberapa perusahaan yang beroperasi di kecamatan tersebut. Perpindahan penduduk di daerah ini juga dapat didorong oleh peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas.

Pembangunan daerah di Kabupaten Bulungan tentunya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, yang secara berkesinambungan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah yang disertai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulungan. Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini menjadi hambatan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bulungan yang lebih baik bagi semua. Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya GAP antara kinerja pembangunan saat ini dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Bulungan dalam 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan data-data statistik daerah, dan berdasarkan pemenuhan aspek kinerja pembangunan daerah, didapat beberapa permasalahan pokok yang sampai saat ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kabupaten Bulungan, beberapa permasalahan yang ada, antara lain :

1) Perlunya dukungan infrastruktur wilayah

Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur wilayah mempunyai peranan sangat penting terutama dalam melayani pergerakan orang, barang dan jasa, serta menjalankan roda ekonomi daerah. Namun demikian, pendanaan yang terbatas merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat.

2) Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama bagi pembangunan daerah dalam memajukan kemampuan dan daya saing masyarakat. Semakin baik kualitas SDM semakin besar pula peluang untuk dapat berkembang dan berinovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan implementasi hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan daerah Bulungan. Belum meratanya kualitas SDM dapat mengurangi kemajuan daerah, terlebih dalam era globalisasi baik persaingan dalam dunia kerja maupun kegiatan bisnis dibutuhkan SDM yang unggul, namun bila kualitasnya rendah, maka peluang untuk bersaing menjadi lemah bahkan akan terpinggirkan oleh tenaga kerja dari daerah lain maupun negara tetangga.

3) PAD yang belum optimal

Perlu dilakukan penggalan dan peningkatan sumber-sumber PAD yang saat ini baru mencapai sekitar 5% dari APBD, sehingga sebagian besar APBD daerah ini sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, APBN dan APBD provinsi. Dengan tetap memperjuangkan sumber pendanaan yang lebih besar dari APBN dan APBD Provinsi untuk pembangunan daerah, selain itu perlu adanya upaya yakni dengan memaksimalkan BUMD yang telah ada dengan

menambah penyertaan modal maupun dengan melakukan pembentukan BUMD-BUMD yang dipandang dapat meningkatkan PAD baik BUMD yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas), ataupun sector-sektor yang lainnya.

4) Meningkatnya kebutuhan energi

Dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung oleh penyediaan energi listrik yang memadai. Kapasitas terpasang hanya sekitar 6,00 MW dengan beban puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini.

5) Angka kemiskinan

Tugas berat dan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam yang ada, namun lebih kepada pola perilaku dan budaya kehidupan yang bersahaja. Kegiatan masyarakat yang bersifat ekstraktif (mengambil tanpa perlakuan) lebih dominan ketimbang yang bersifat budi daya.

6) Kualitas lingkungan hidup

Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha, kerusakan hutan mangrove dan resiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat.

7) Penurunan kontribusi sektor pertanian

Salah satu tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan (berdaulat pangan) adalah menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi pertaniannya terutama pada subsektor tanaman pangan. Suatu daerah dikatakan berdaulat pangan tecermin dari kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerahnya. Meskipun secara umum sektor pertanian Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan peran dalam kontribusi ekonomi daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun jika melihat 4 tahun ke belakang, kontribusinya masih fluktuatif, bahkan di tahun 2017 kontribusi sektor pertanian lebih besar dibandingkan kontribusi pada tahun 2020. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kontribusi sektor pertanian

khususnya subsektor tanaman pangan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian, belum optimalnya pengembangan produksi pertanian berbasis potensi lokal, dan masih minimnya fasilitasi pemerintah untuk pengembangan industri hulu - hilir sektor pertanian guna mengolah komoditas tanaman pangan daerah.

4.4. Isu Strategis

Hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan diperoleh masukan yang sangat menarik, yaitu:

- 1) Isu utama pembangunan lima tahun mendatang untuk Kabupaten Bulungan dan seluruh daerah di Indonesia adalah Dampak Pandemi Covid-19 (Keppres 9 Tahun 2020);
- 2) Ditetapkannya Tanjung Selor sebagai Kota Baru (Perpres 18 Tahun 2020).

Kedua isu tersebut dengan berbagai konsekuensinya akan menjadi faktor pengendali kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2024. Sehingga penjabaran isu-isu strategis yang diarahkan oleh RPJPD 2005- 2025 Kabupaten Bulungan dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 harus selalu mempertimbangan dampak kedua isu tersebut di atas (Covid-19 dan penetapan Kota Baru Tanjung Selor).

4.4.1. Pengembangan SDM

Peningkatan kualitas SDM merupakan materi dalam isu pengembangan SDM, karena sesuai dengan status Kabupaten Bulungan yang telah memasuki era bonus demografi, maka peningkatan kualitas SDM harus mendapat perhatian agar SDM yang tersedia benar-benar menjadi sumber daya pembangunan untuk mereduksi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Peningkatan kualitas SDM baik melalui pendidikan formal, informal dan nonformal, dan khusus untuk angkatan kerja yang putus sekolah perlu dikembangkan pelatihan vokasi melalui kegiatan BLK yang sesuai dengan kebutuhan dan peluang kerja yang tersedia.

Selain peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas SDM, sebab evaluasi capaian kinerja pembangunan diketahui bahwa upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya balita masih sangat perlu ditingkatkan.

4.4.2. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Bulangan masih menghadapi kendala isolasi wilayah. Adanya beberapa wilayah yang terisolir (dari prasarana perhubungan darat) menyebabkan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut menjadi terhambat.

Pengembangan ekonomi wilayah selain membuka isolasi wilayah juga harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di masing-masing wilayah tersebut, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam pemilihan komoditi harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kondisi sosial kultural masyarakat, dan tentunya peluang pasar. Pengembangan produksi pangan secara umum perlu dilakukan di semua wilayah kecamatan, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan untuk daerah yang potensial untuk pengembangan produksi pangan dalam skala besar perlu didorong menjadi lumbung pangan untuk mewujudkan rice food estate di Kabupaten Bulungan.

4.4.3. Prasarana Dasar

Pengembangan dan peningkatan prasarana dasar yang menjadi isu utama yang selalu dimunculkan dalam diskusi dengan tokoh masyarakat adalah penyediaan listrik, air bersih, dan prasarana jalan. Khususnya untuk kecamatan yang masih banyak memiliki wilayah terisolir, ketiga prasarana dasar tersebut yang sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM (baik aspek pendidikan maupun kesehatan) dan percepatan kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat diminimalisir.

4.4.4. Kebijakan Publik Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum merupakan indikator pembangunan yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Indikator yang digunakan dapat berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal), SPP (Standar Pelayanan Prima), dan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Implementasi pelayanan tersebut dapat dipublikasikan oleh setiap OPD kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk POS (Prosedur Operasional Standar).

4.4.5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Implementasi peraturan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten akan menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sebab setiap pelanggaran dan penyimpangan dari peraturan tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan umumnya memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas berat pada isu lingkungan di Kabupaten Bulungan adalah pada pengawasan dan penegakan peraturan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha. Kondisi demikian harus menjadi perhatian serius pada periode pembangunan mendatang, agar dampak kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

4.4.6. Program Prioritas Bupati 2021-2026

Untuk memberikan arahan pasti terkait dengan tahapan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan atau pada masa jabatan Bupati Bulungan 2021-2026, maka Bupati menetapkan arahan program prioritas yang menjadi rencana kunci dalam pembangunan jangka menengah ini. Program Prioritas Bupati yang dicanangkan untuk pembangunan jangka menengah 2021-2026, antara lain:

A. Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)

Program Mandau Tani ini adalah integrasi program pertanian dalam artian luas untuk mewujudkan kabupaten Bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terpadu hulu-hilir pada aspek kelembagaan. Tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pertama ini antara lain:

- Mewujudkan misi pertama, dan penguatan untuk misi keempat, dan
- Memastikan integrasi antar-SKPD teknis dapat berjalan dengan maksimal termasuk terkait koordinasi dengan stakeholder lain yang bekerjasama

B. Satu Desa Satu Produksi

Program ini dilakukan dengan mengupayakan setiap desa memiliki produk unggulan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan pangan lokal sesuai dengan potensi dan klasterisasi wilayah. Produk merupakan hasil integrasi hulu-hilir. Sebagai contoh dimulai dari hasil

komoditi pangan sebagai hulu hingga pengolahan produk UMKM sebagai hilir. Tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan ini antara lain:

- Meningkatkan industri rumah tangga/UMKM yang memproduksi aneka ragam pangan dan olahan lokal sebagai sumber penopang perekonomian masyarakat, dan
- Penyerapan hasil produksi pertanian dalam arti luas, serta meningkatkan nilai jual produk hasil pertanian

C. Jaminan Hasil Produksi Pertanian

Program ini memiliki deskripsi bahwa jaminan pembelian produk hasil produksi pertanian yang sejalan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. Tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan ini antara lain:

- Memberikan kepastian pembelian terhadap hasil produksi, sehingga upaya memperoleh produk unggulan berbasis potensi wilayah dapat terpenuhi,
- Menjaga kontinuitas produksi, dan
- Meningkatkan permintaan masyarakat terhadap hasil produksi pertanian lokal melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, yang meliputi peningkatan pengetahuan, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

D. Beasiswa Vokasi Berbasis Potensi Wilayah

Program ini dilakukan dengan pemberian beasiswa Pendidikan vokasi untuk peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Sumber pendanaan beasiswa tidak bergantung pada APBD namun lebih mengutamakan program-program pendanaan non-APBD. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program prioritas ini antara lain:

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM desa/wilayah, dan
- Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bulungan

E. Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat

Program ini merupakan program untuk pelatihan SDM (petani, nelayan, pelaku usaha UMKM, tenaga kerja) secara teknis dengan memanfaatkan konsep kerjasama Pentahelix. Tujuan yang diharapkan dari program prioritas ini adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis SDM sesuai bidang usaha/kerja
- Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Bulungan secara teknis sesuai bidang keahlian

F. Benuansa religi

Program prioritas ini adalah program pemberian insentif pada guru mengaji, guru sekolah minggu, dll. Serta fardhu kifayah dengan melembagakan/memberikan wadah berbadan hukum sebagai dasar hibah kemudian peningkatan kualitas dan kapasitas serta peran rumah ibadah. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program prioritas ini adalah menunjang pembentukan SDM berkarakter di luar sektor formal pendidikan yang religius.

G. Mantap Pelayanan Dasar

Program prioritas mantap pelayanan dasar ini dilakukan dengan pemantapan infrastruktur penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat. Penguatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pemantapan ketersediaan listrik, dan air bersih. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program prioritas ini, antara lain adalah memberikan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas kepada masyarakat.

H. Desa Pintar Desa Digital

Program prioritas Desa Pintar Desa digital ini adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk pengembangan potensi desa, serta percepatan akses dan layanan informasi, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan pada sektor ekonomi kreatif. Tujuan yang diharapkan dari program prioritas ini antara lain:

- Meningkatkan daya saing desa,
- Meningkatkan konektivitas khususnya akses informasi dan pemasaran, dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan Desa

I. Bulungan Reaksi Cepat

Program Bulungan Reaksi Cepat ini adalah program layanan yang bertujuan memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat mendesak, di antaranya masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, hingga masalah kedaruratan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik. Tujuan dari pelaksanaan program prioritas ini antara lain:

- Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun penyampaian permasalahan yang bersifat darurat, dan
- Menghadirkan negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bulungan lebih dekat dan cepat tanggap terhadap permasalahan masyarakat

J. Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)

Program Kredit Mesra ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan memperkuat UMKM dengan memberikan keringan dalam proses administrasi terkait dengan UMKM yang lebih sederhana. Tujuan dari program prioritas ini, antara lain:

- Meningkatkan perekonomian masyarakat, dan
- Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru yang terintegrasi dengan visi dan misi

K. Mitra Bulungan Berdaulat

Program prioritas ini adalah program penerapan konsep pentahelix yang melibatkan birokrasi, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta media dalam mewujudkan visi Bulungan Berdaulat Pangan berbasis Kearifan Lokal. Mitra Bulungan Berdaulat dapat berperan sebagai sumber pendanaan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, maupun berperan sebagai pelaksana terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan. Tujuan dari program prioritas ini antara lain:

- Meningkatkan perekonomian masyarakat,
- Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru yang terintegrasi dengan upaya mewujudkan bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal, dan
- Menjadi sumber inovasi pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan

L. Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal

Program prioritas ini adalah program pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan dan mempertahankan fungsi ekologi guna menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan dari program prioritas ini antara lain:

- Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang ramah lingkungan,
- Mempertahankan fungsi ekologi guna kelestarian lingkungan hidup, dan

- Menumbuhkan destinasi wisata yang dapat menjadi penciri Kabupaten Bulungan

M. TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)

Program TAKE ini adalah program yang menjadi bagian dari ADD yang merupakan manifestasi dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melestarikan lingkungan hidup. Penetapan indikator DaPorMasBerNer (Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Berbasis Kinerja). Tujuan dari program prioritas ini adalah;

- Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup, dan hutan kemasyarakatan antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintahan Desa , dan
- Mempertahankan fungsi ekologi sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup

N. Desa Inovatif

Program Desa Inovatif ini dilaksanakan melalui pemberian insentif pada desa yang memiliki program inovatif dan strategis dalam upaya mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bulungan. Tujuan dari program prioritas ini antara lain adalah untuk meningkatkan sinergi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Pemerintah Desa.

O. Mal Pelayanan Publik

Program Prioritas Mal Pelayanan Publik ini merupakan perwujudan pelayanan satu pintu untuk sleuruh jenis produk layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan. Tujuan dari program prioritas ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.

BAB 5

Hasil Pengolahan dan Analisis Data



BAB V

HASIL PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Hasil Pengolahan Data

Bab ini merupakan bagian penting dari kajian mengenai pemetaan inovasi daerah. Pada bab ini, pembaca akan disajikan uraian mendalam mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini, serta pembahasan rinci tentang temuan-temuan tersebut. Bab ini membahas kajian pemetaan inovasi daerah berdasarkan unit-unit analisis yang telah ditetapkan sebelumnya. Unit-unit analisis tersebut mencakup karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini, pemahaman mengenai inovasi daerah, ekosistem inovasi di daerah tersebut, serta strategi-strategi yang diterapkan dalam menggalakkan inovasi di tingkat daerah.

Penting untuk memahami bahwa dalam bab ini, akan diuraikan secara komprehensif mengenai masing-masing unit analisis yang menjadi fokus penelitian. Karakteristik responden yang terlibat akan dikaji untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai profil para pelaku dan pemangku kepentingan dalam konteks inovasi daerah. Selanjutnya, pemahaman tentang inovasi di tingkat daerah akan diuraikan untuk mengungkapkan persepsi dan pengetahuan yang dimiliki oleh mereka terkait inovasi dan dampaknya.

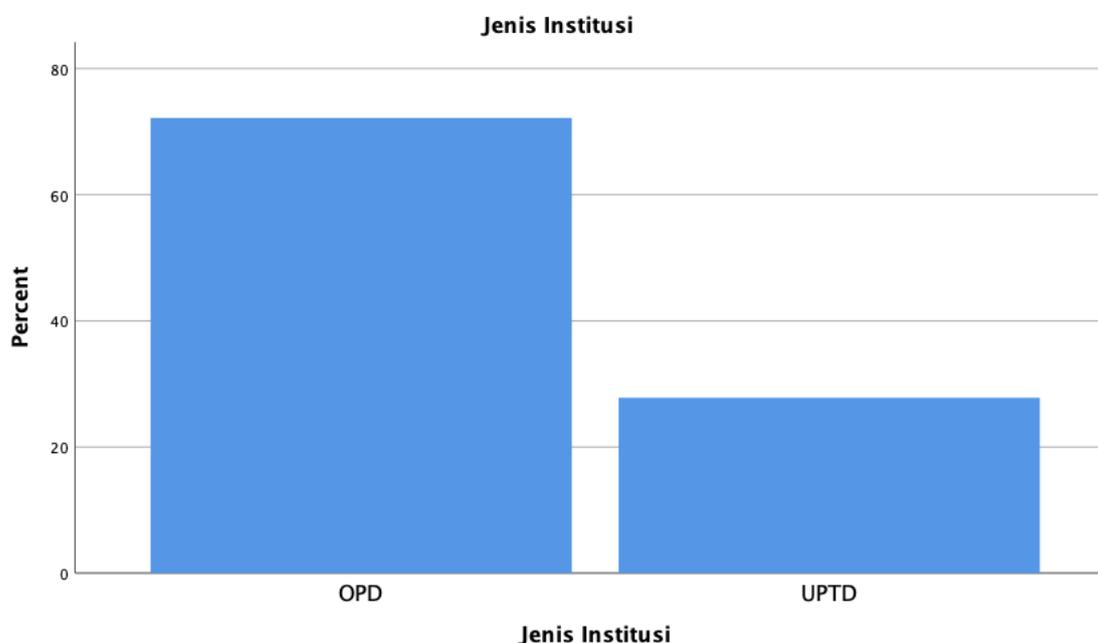
Bab ini juga akan mengulas ekosistem inovasi di Kabupaten Bulungan yang menjadi subjek penelitian. Faktor-faktor yang membentuk dan memengaruhi ekosistem inovasi, seperti lembaga-lembaga pendukung, kolaborasi antarstakeholder, serta infrastruktur pendukung inovasi, akan dikaji secara mendalam untuk menggambarkan kondisi inovasi di lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, strategi inovasi di daerah juga akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bab ini. Berbagai pendekatan dan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah atau entitas terkait dalam mempromosikan inovasi akan dianalisis dengan seksama.

Selain itu, dalam bab ini juga akan dipersembahkan analisis tabel silang yang mencakup hubungan dan pola-pola menarik antara karakteristik responden, pemahaman inovasi, ekosistem inovasi, dan strategi inovasi. Analisis ini akan

memberikan sudut pandang yang lebih holistik terhadap keterkaitan antara berbagai variabel yang ada dalam penelitian ini. Serta terakhir, ulasan membahas Implikasi dari temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengambilan keputusan dalam mengembangkan inovasi di daerah, baik dari segi kebijakan maupun praktik pelaksanaannya. Semua uraian dan analisis dalam bab ini diharapkan akan memberikan wawasan mendalam serta sudut pandang yang komprehensif terkait pemetaan inovasi di Kabupaten Bulungan.

Tabel 11. Jenis Institusi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OPD	122	72.2	72.2	72.2
	UPTD	47	27.8	27.8	100.0
	Total	169	100.0	100.0	

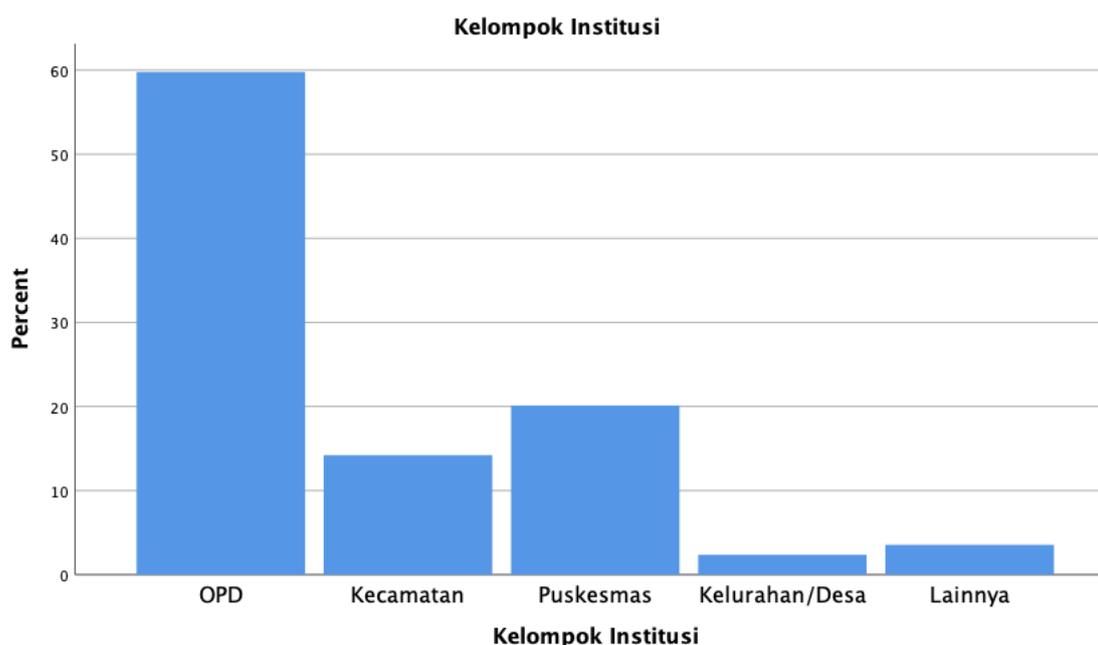


Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 11 mengenai jenis institusi, terlihat bahwa dari total 169 institusi yang disurvei, mayoritas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah 122 institusi atau 72,2% dari total. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari 47 institusi atau 27,8% dari total.

Proporsi yang lebih besar dari OPD menunjukkan bahwa kebanyakan inovasi dan inisiatif kemungkinan besar berasal dari OPD dibandingkan dengan UPTD. Total persentase kumulatif mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa data yang disajikan mencakup seluruh populasi institusi yang disurvei tanpa ada yang terlewatkan.

Tabel 12. Kelompok Institusi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OPD	101	59.8	59.8	59.8
	Kecamatan	24	14.2	14.2	74.0
	Puskesmas	34	20.1	20.1	94.1
	Kelurahan/Desa	4	2.4	2.4	96.4
	Lainnya	6	3.6	3.6	100.0
	Total		169	100.0	100.0

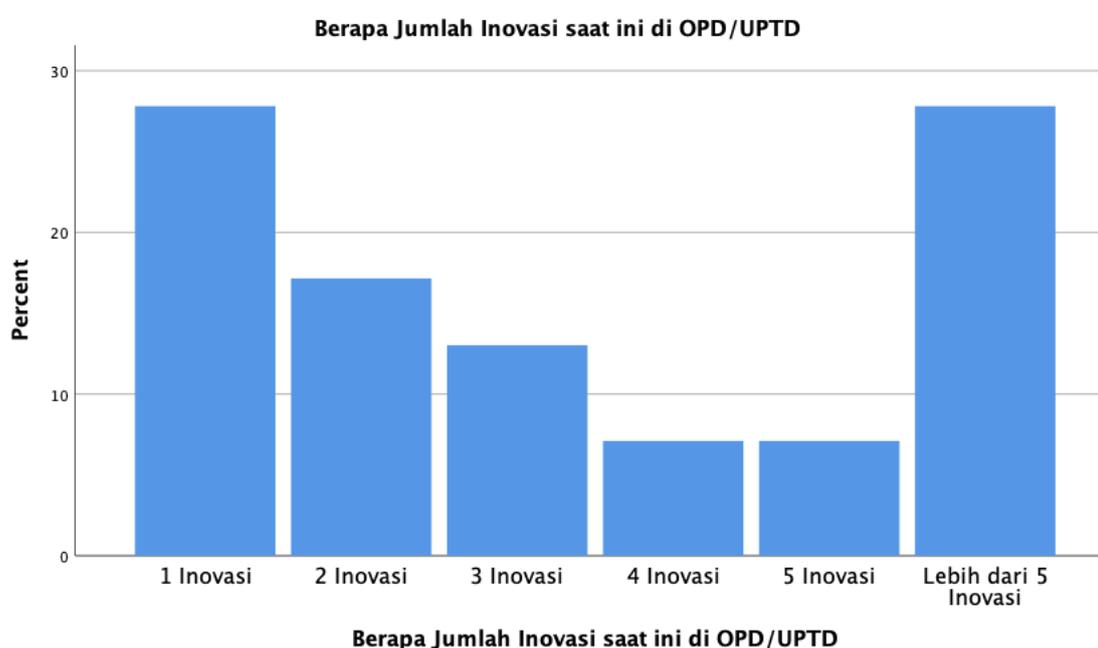


Tabel 12 menunjukkan distribusi frekuensi dan persentase kelompok institusi yang terlibat dalam penelitian ini. Berdasarkan data tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kelompok dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 101 responden atau 59,8% dari total responden. Kecamatan menempati posisi kedua dengan 24 responden, yang mewakili 14,2% dari total responden. Selanjutnya, Puskesmas berada di posisi ketiga dengan 34 responden atau 20,1%. Kelurahan atau Desa memiliki jumlah responden yang lebih sedikit, yakni hanya 4 responden atau 2,4%. Kategori "Lainnya" mencakup 6 responden, yang menyumbang 3,6% dari total. Secara keseluruhan, total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 169 orang, dengan seluruh kategori institusi menyumbang 100% dari data yang dikumpulkan. Distribusi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan berbagai institusi dalam penelitian, menunjukkan bahwa OPD memiliki kontribusi yang paling signifikan, diikuti

oleh Puskesmas dan Kecamatan, sementara Kelurahan/Desa dan institusi lain memiliki peran yang lebih kecil dalam konteks penelitian ini.

Tabel 13. Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Inovasi	47	27.8	27.8	27.8
	2 Inovasi	29	17.2	17.2	45.0
	3 Inovasi	22	13.0	13.0	58.0
	4 Inovasi	12	7.1	7.1	65.1
	5 Inovasi	12	7.1	7.1	72.2
	Lebih dari 5 Inovasi	47	27.8	27.8	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 13, mengenai jumlah inovasi yang ada saat ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terlihat adanya distribusi yang cukup beragam dalam jumlah inovasi yang diimplementasikan. Dari total 169 entitas yang disurvei, 27,8% atau 47 entitas melaporkan hanya memiliki satu inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar entitas masih berada pada tahap awal dalam pengembangan dan implementasi inovasi.

Selanjutnya, 17,2% atau 29 entitas melaporkan memiliki dua inovasi, mengindikasikan adanya peningkatan dalam upaya inovasi di beberapa entitas. Sebanyak 13,0% atau 22 entitas melaporkan memiliki tiga inovasi, yang menunjukkan

adanya progres dalam diversifikasi dan pengembangan lebih lanjut dari inovasi yang dilakukan.

Sebanyak 7,1% atau 12 entitas masing-masing melaporkan memiliki empat dan lima inovasi. Proporsi ini menunjukkan bahwa ada sejumlah entitas yang sudah lebih maju dalam hal jumlah inovasi yang diimplementasikan, tetapi jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan total populasi.

Yang menarik adalah bahwa ada 27,8% atau 47 entitas yang melaporkan memiliki lebih dari lima inovasi. Persentase ini setara dengan entitas yang hanya memiliki satu inovasi, menunjukkan bahwa ada sejumlah entitas yang sangat proaktif dan progresif dalam pengembangan inovasi. Mereka mungkin memiliki strategi inovasi yang lebih terstruktur dan sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung berbagai inisiatif inovatif.

Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar entitas masih dalam tahap awal atau sedang dalam pengembangan inovasi, ada juga sejumlah signifikan entitas yang telah mencapai tingkat inovasi yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan adanya potensi pertumbuhan yang signifikan dalam bidang inovasi di OPD dan UPTD, tergantung pada dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk mendorong lebih banyak entitas agar dapat mengembangkan dan mengimplementasikan lebih banyak inovasi.

Tabel 14. Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	159	94.1	94.1	94.1
	Tidak Ada	10	5.9	5.9	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 14, dapat dilihat bahwa dari total 169 institusi yang disurvei, 159 institusi atau 94,1% melaporkan adanya inovasi, sementara hanya 10 institusi atau 5,9% yang melaporkan tidak adanya inovasi.

Deskripsi ini menunjukkan bahwa mayoritas institusi memiliki inovasi dalam operasionalnya. Tingginya persentase institusi yang melaporkan adanya inovasi menunjukkan adanya budaya inovasi yang kuat dan komitmen terhadap pengembangan dan penerapan ide-ide baru di banyak institusi.

Sebaliknya, persentase kecil dari institusi yang melaporkan tidak adanya inovasi (5,9%) mungkin menunjukkan adanya hambatan tertentu dalam pengembangan inovasi di institusi tersebut, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan, atau tantangan lainnya yang perlu diatasi untuk meningkatkan kapasitas inovasi mereka.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mendorong inovasi di institusi-institusi tersebut telah berhasil di sebagian besar entitas, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam membantu institusi yang belum mampu mengimplementasikan inovasi.

Tabel 15. Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	112	66.3	66.3	66.3
	Tidak Ada	57	33.7	33.7	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



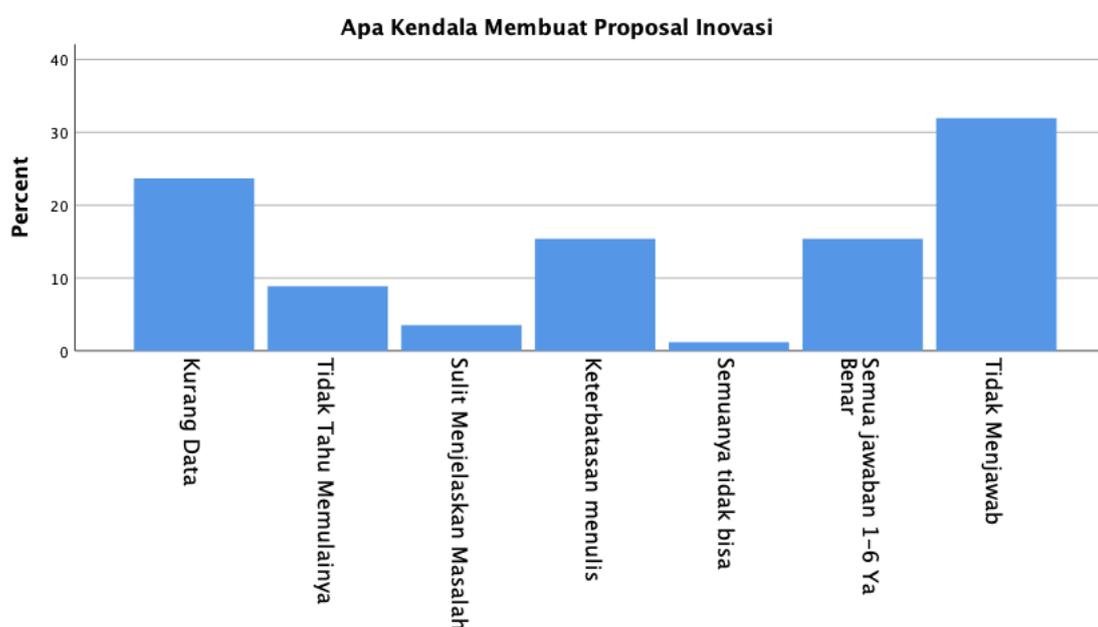
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 15 mengenai keberadaan proposal inovasi, terlihat bahwa dari total 169 inovasi yang diidentifikasi, mayoritas inovasi, yakni 112 atau 66,3%, sudah memiliki proposal inovasi. Ini menunjukkan bahwa dua pertiga dari inovasi yang ada telah melalui tahap perencanaan dan dokumentasi yang lebih formal, yang dapat meningkatkan kemungkinan sukses dalam implementasi dan evaluasi inovasi tersebut.

Sebaliknya, terdapat 57 inovasi atau 33,7% yang belum memiliki proposal inovasi. Ketidakhadiran proposal ini bisa menunjukkan beberapa hal, termasuk potensi kurangnya perencanaan yang terstruktur atau sumber daya yang tidak memadai untuk menyusun proposal formal.

Total persentase kumulatif mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa data ini mencakup keseluruhan inovasi yang disurvei tanpa ada yang terlewatkan. Dengan adanya 66,3% inovasi yang sudah didukung oleh proposal, ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam perencanaan dan pengelolaan inovasi di OPD/UPTD. Namun, perlu ada perhatian lebih terhadap 33,7% inovasi yang belum memiliki proposal untuk memastikan bahwa semua inovasi memiliki dasar yang kuat untuk implementasi dan pengembangan lebih lanjut.

Tabel 16. Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Data	40	23.7	23.7	23.7
	Tidak Tahu Memulainya	15	8.9	8.9	32.5
	Sulit Menjelaskan Masalah	6	3.6	3.6	36.1
	Keterbatasan menulis	26	15.4	15.4	51.5
	Semuanya tidak bisa	2	1.2	1.2	52.7
	Semua jawaban 1-6 Ya Benar	26	15.4	15.4	68.0
	Tidak Menjawab	54	32.0	32.0	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



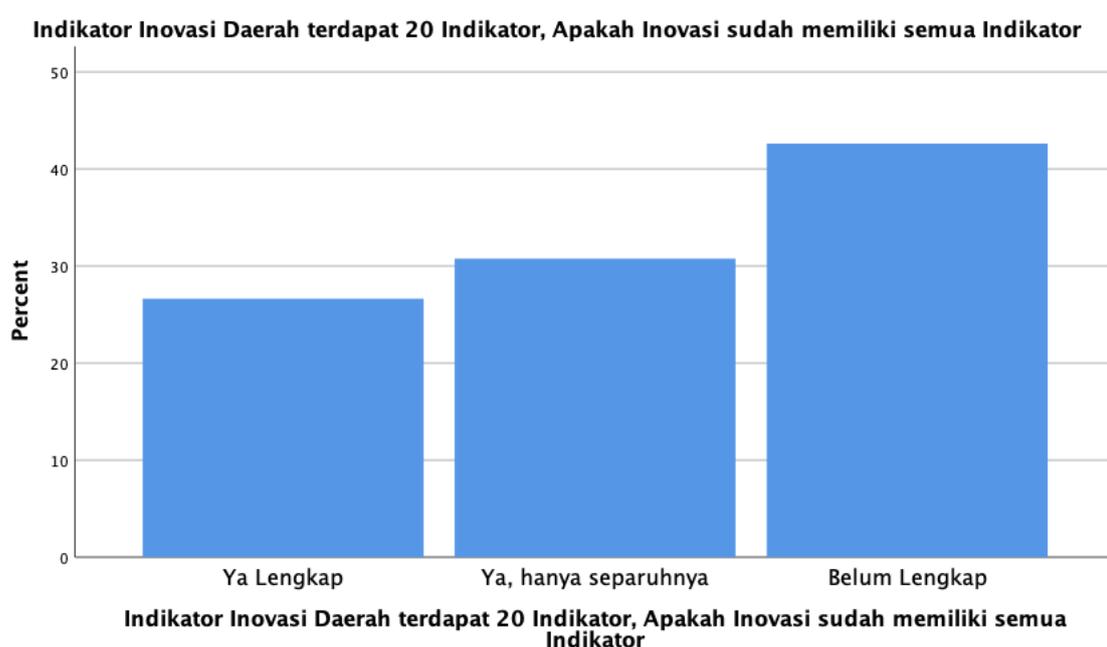
Analisa Kendala Membuat Proposal Inovasi

Tabel 16 menunjukkan kendala yang dihadapi dalam pembuatan proposal inovasi berdasarkan frekuensi dan persentase responden. Dari total 169 responden, 40 orang atau 23,7% mengidentifikasi kendala utama sebagai kurangnya data yang diperlukan. Selain itu, 15 orang (8,9%) mengaku tidak tahu bagaimana memulai proposal, sementara 6 orang (3,6%) merasa kesulitan dalam menjelaskan masalah yang dihadapi. Keterbatasan menulis menjadi kendala bagi 26 orang (15,4%), dengan jumlah yang sama juga merasa bahwa semua jawaban yang disediakan adalah benar. Dua orang (1,2%) merasa tidak mampu menangani semua kendala tersebut. Sebanyak 54 responden (32,0%) memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan beragam masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan proposal

inovasi, dengan data yang menunjukkan pentingnya dukungan data dan keterampilan menulis yang memadai.

Tabel 17. Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya Lengkap	45	26.6	26.6	26.6
	Ya, hanya separuhnya	52	30.8	30.8	57.4
	Belum Lengkap	72	42.6	42.6	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



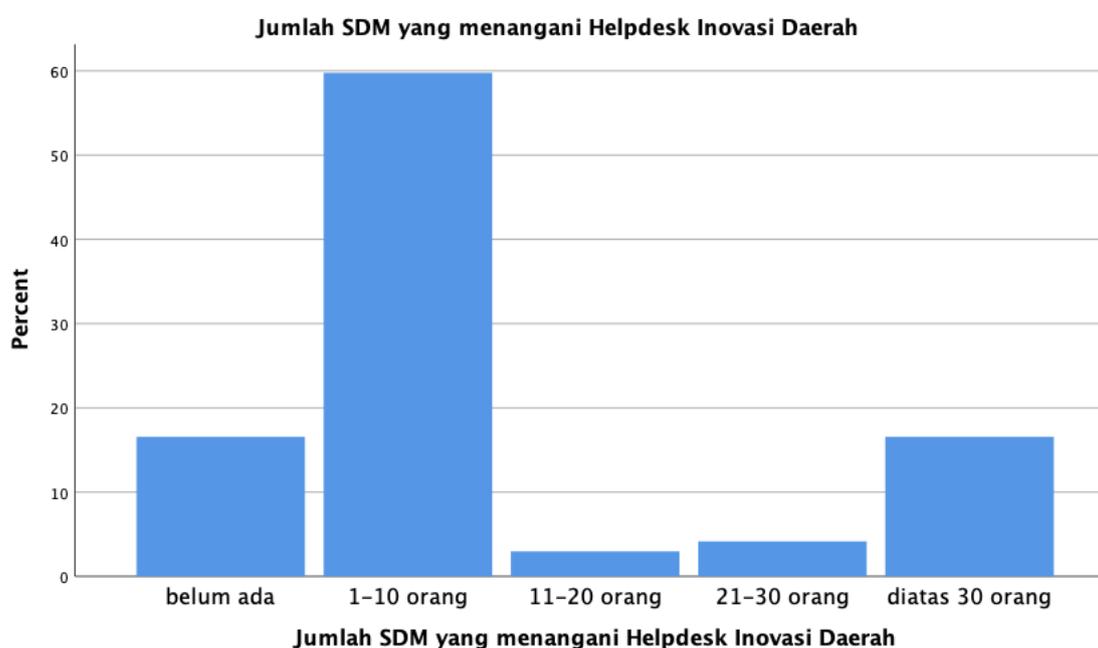
Tabel 17 menyajikan data mengenai tingkat kelengkapan indikator inovasi daerah yang terdiri dari 20 indikator. Dari total 169 entitas yang disurvei, 45 entitas atau 26,6% melaporkan bahwa inovasi mereka sudah lengkap dengan semua indikator yang diperlukan. Sebaliknya, 52 entitas atau 30,8% menyatakan bahwa inovasi mereka hanya mencakup separuh dari indikator yang diperlukan, menunjukkan adanya ketidaklengkapan dalam penerapan indikator secara menyeluruh.

Sebanyak 72 entitas, atau 42,6% dari total, mengindikasikan bahwa inovasi yang mereka terapkan belum lengkap dengan semua indikator. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam hal penerapan indikator inovasi yang lebih komprehensif. Persentase kumulatif mencapai 100%, mencerminkan bahwa data ini

mencakup seluruh populasi survei dan memberikan gambaran yang jelas mengenai status kelengkapan indikator inovasi di daerah.

Tabel 18. Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	belum ada	28	16.6	16.6	16.6
	1-10 orang	101	59.8	59.8	76.3
	11-20 orang	5	3.0	3.0	79.3
	21-30 orang	7	4.1	4.1	83.4
	diatas 30 orang	28	16.6	16.6	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 18 mengenai jumlah sumber daya manusia (SDM) yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah, terdapat variasi signifikan dalam alokasi SDM di berbagai institusi. Dari total 169 institusi yang disurvei, 59,8% atau 101 institusi memiliki antara 1 hingga 10 orang SDM yang menangani fungsi Helpdesk. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar institusi memiliki tim kecil yang mengelola bantuan dan dukungan terkait inovasi daerah.

Sebaliknya, 16,6% atau 28 institusi tidak memiliki SDM khusus yang menangani Helpdesk, mengindikasikan adanya kekurangan dalam kapasitas dukungan untuk inovasi di institusi tersebut. Selain itu, 16,6% institusi lainnya melaporkan memiliki lebih dari 30

orang SDM yang menangani Helpdesk, yang menunjukkan adanya institusi dengan sumber daya lebih besar untuk mengelola dukungan inovasi.

Sebagian kecil institusi, yakni 4,1% atau 7 institusi, memiliki antara 21 hingga 30 orang SDM, sementara hanya 3% atau 5 institusi yang memiliki antara 11 hingga 20 orang SDM. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar institusi cenderung memiliki tim Helpdesk yang relatif kecil, dengan beberapa institusi yang lebih besar mempekerjakan lebih banyak SDM untuk menangani tugas-tugas tersebut. Secara keseluruhan, distribusi ini mencerminkan adanya perbedaan yang jelas dalam kapasitas dukungan Helpdesk di berbagai institusi terkait inovasi daerah.

Tabel 19. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang sesuai	5	3.0	3.0	3.0
	Sesuai	138	81.7	81.7	84.6
	Sangat sesuai	26	15.4	15.4	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



Tabel 19 menyajikan hasil survei mengenai pendapat responden tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Dari total 169 responden, sebagian besar, yaitu 138 responden atau 81,7%, menilai bahwa persyaratan pelayanan adalah sesuai dengan jenis pelayanannya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas

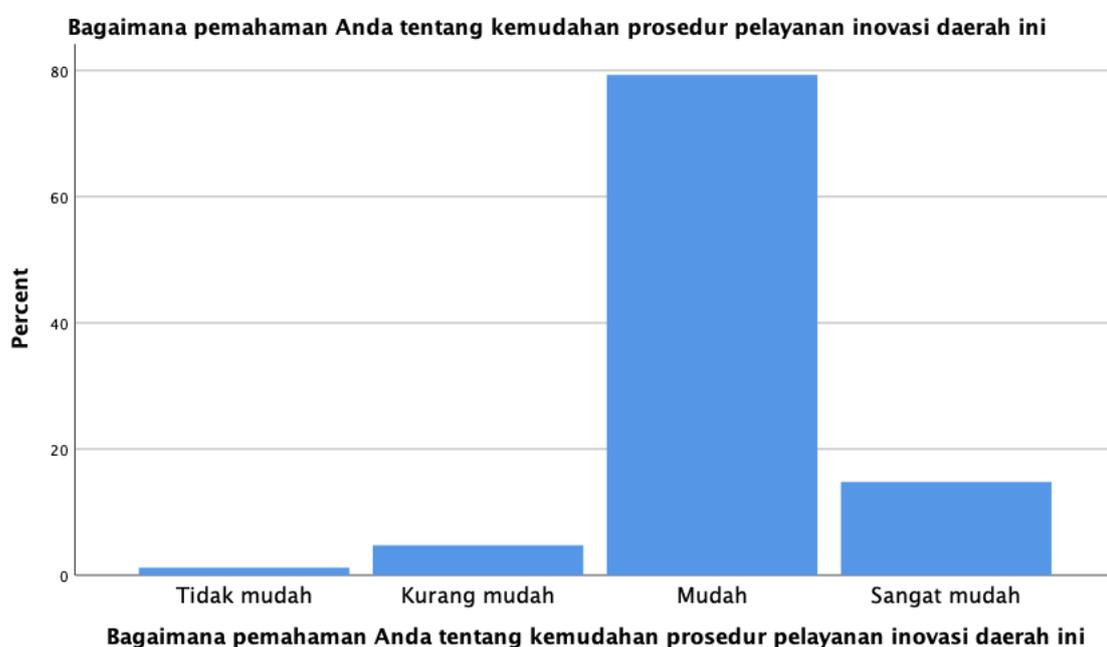
responden merasa bahwa persyaratan yang ditetapkan untuk pelayanan yang diterima mereka sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan.

Sebanyak 26 responden atau 15,4% menilai bahwa persyaratan pelayanan sangat sesuai dengan jenis pelayanannya, menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang tinggi di antara sebagian kecil responden terkait kesesuaian persyaratan dan pelayanan. Sebaliknya, hanya 5 responden atau 3,0% yang merasa bahwa persyaratan pelayanan kurang sesuai dengan jenis pelayanannya.

Distribusi jawaban ini menunjukkan bahwa secara umum, kesesuaian antara persyaratan dan jenis pelayanan diterima dengan baik oleh sebagian besar responden, dengan mayoritas merasakan kesesuaian yang memadai hingga sangat sesuai. Hal ini dapat menjadi indikator positif bahwa sistem pelayanan yang ada sudah memenuhi harapan dan kebutuhan sebagian besar pengguna layanan.

Tabel 20. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak mudah	2	1.2	1.2	1.2
	Kurang mudah	8	4.7	4.7	5.9
	Mudah	134	79.3	79.3	85.2
	Sangat mudah	25	14.8	14.8	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 20 mengenai pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah, mayoritas responden menganggap bahwa prosedur tersebut relatif mudah. Dari total 169 responden, sebanyak 134 orang (79,3%) menilai prosedur pelayanan sebagai "Mudah". Ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa bahwa proses untuk mengakses atau menerapkan inovasi daerah tidak terlalu rumit.

Sebanyak 25 responden (14,8%) bahkan menyatakan bahwa prosedur tersebut "Sangat mudah", menandakan adanya kelompok signifikan yang merasa bahwa tidak ada kendala berarti dalam mengikuti atau memanfaatkan prosedur inovasi daerah.

Namun, ada juga 8 responden (4,7%) yang merasa prosedur tersebut "Kurang mudah" dan 2 responden (1,2%) yang menilai "Tidak mudah". Walaupun persentase kelompok ini kecil, mereka memberikan indikasi adanya beberapa tantangan atau kesulitan yang dihadapi oleh sebagian kecil peserta dalam hal kemudahan prosedur.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa prosedur pelayanan inovasi daerah umumnya dianggap mudah diakses oleh mayoritas responden, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemudahan bagi seluruh pengguna.

Tabel 21. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang cepat	14	8.3	8.3	8.3
	Cepat	133	78.7	78.7	87.0
	Sangat cepat	22	13.0	13.0	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



Tabel 21 menyajikan data mengenai penilaian terhadap kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Dari total 169 responden, mayoritas, yaitu 133 responden atau 78,7%, menilai bahwa pelayanan yang diberikan adalah cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa waktu pelayanan sudah memadai dan sesuai dengan harapan mereka.

Sebanyak 22 responden atau 13% memberikan penilaian bahwa pelayanan sangat cepat, yang menunjukkan bahwa ada segmen kecil namun signifikan dari populasi yang merasa bahwa pelayanan yang diterima melebihi ekspektasi mereka dalam hal kecepatan. Di sisi lain, 14 responden atau 8,3% menilai pelayanan kurang cepat, mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam aspek kecepatan pelayanan pada bagian tertentu.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden puas dengan kecepatan pelayanan yang diberikan, namun masih terdapat beberapa area yang mungkin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kepuasan pelanggan lebih lanjut.

Tabel 22. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup mahal	5	3.0	3.0	3.0
	Murah	49	29.0	29.0	32.0
	Gratis	115	68.0	68.0	100.0

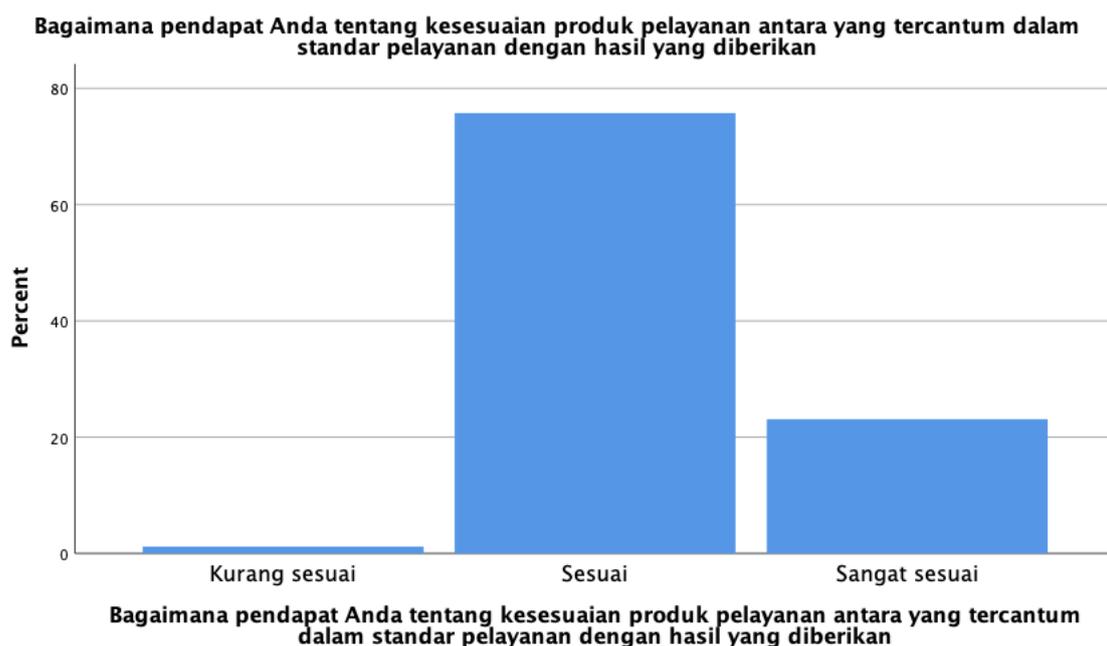
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total	169	100.0	100.0	



Tabel 22 menyajikan pendapat responden mengenai kewajaran biaya atau tarif dalam pelayanan. Berdasarkan data yang ditampilkan, sebagian besar responden, yaitu 115 orang atau 68%, merasa bahwa biaya atau tarif pelayanan adalah gratis. Sementara itu, 49 responden, yang setara dengan 29%, berpendapat bahwa biaya tersebut murah. Hanya 5 responden, atau 3%, yang menganggap biaya atau tarif tersebut cukup mahal. Secara keseluruhan, 100% responden memberikan tanggapan yang mencakup ketiga kategori yang disediakan, dengan distribusi yang menunjukkan dominasi pandangan bahwa pelayanan tidak memerlukan biaya.

Tabel 23. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang sesuai	2	1.2	1.2	1.2
	Sesuai	128	75.7	75.7	76.9
	Sangat sesuai	39	23.1	23.1	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



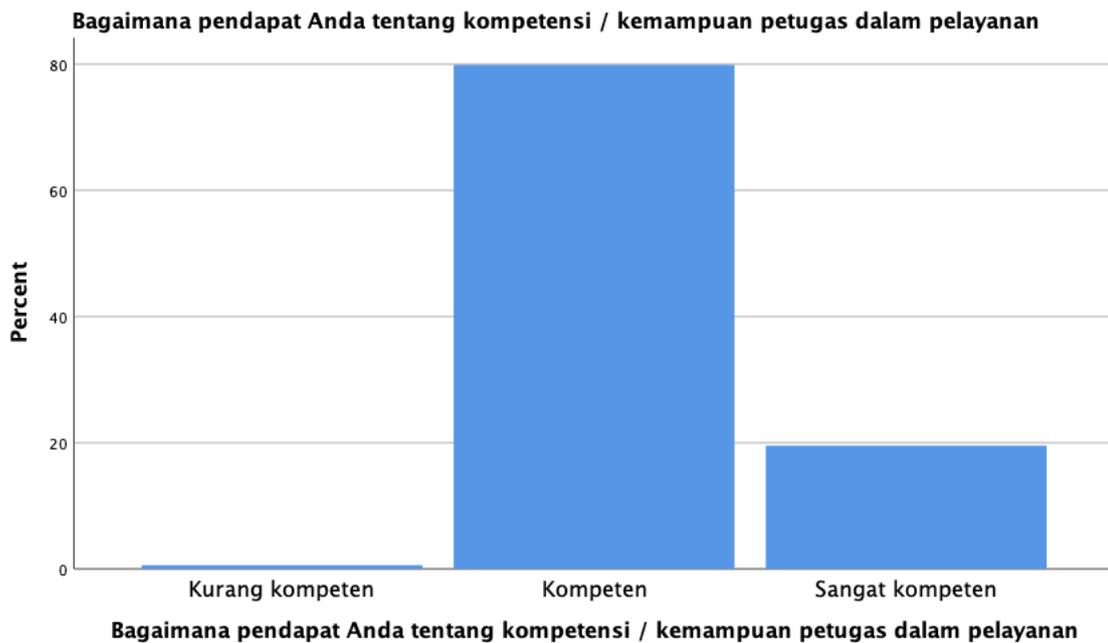
Tabel 23 menyajikan data tentang penilaian kesesuaian produk pelayanan antara standar pelayanan yang tercantum dengan hasil yang diberikan. Dari total 169 responden, mayoritas memberikan penilaian positif terhadap kesesuaian produk pelayanan. Sebanyak 128 responden, atau 75,7%, menganggap bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pelayanan yang diterima memenuhi ekspektasi yang diharapkan berdasarkan standar yang ada.

Selain itu, 39 responden, atau 23,1%, menilai pelayanan yang diberikan sangat sesuai dengan standar. Penilaian ini menandakan bahwa ada sejumlah responden yang merasa pelayanan yang diterima tidak hanya memenuhi standar tetapi juga melebihi ekspektasi mereka.

Sebaliknya, hanya 2 responden, atau 1,2%, yang merasa bahwa pelayanan yang diberikan kurang sesuai dengan standar. Persentase ini sangat kecil, menandakan bahwa secara umum, tingkat kepuasan terkait kesesuaian produk pelayanan relatif tinggi di antara para responden. Total persentase kumulatif mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh data valid dan mencakup keseluruhan pandangan responden tentang kesesuaian produk pelayanan.

Tabel 24. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang kompeten	1	.6	.6	.6
	Kompeten	135	79.9	79.9	80.5
	Sangat kompeten	33	19.5	19.5	100.0
	Total	169	100.0	100.0	

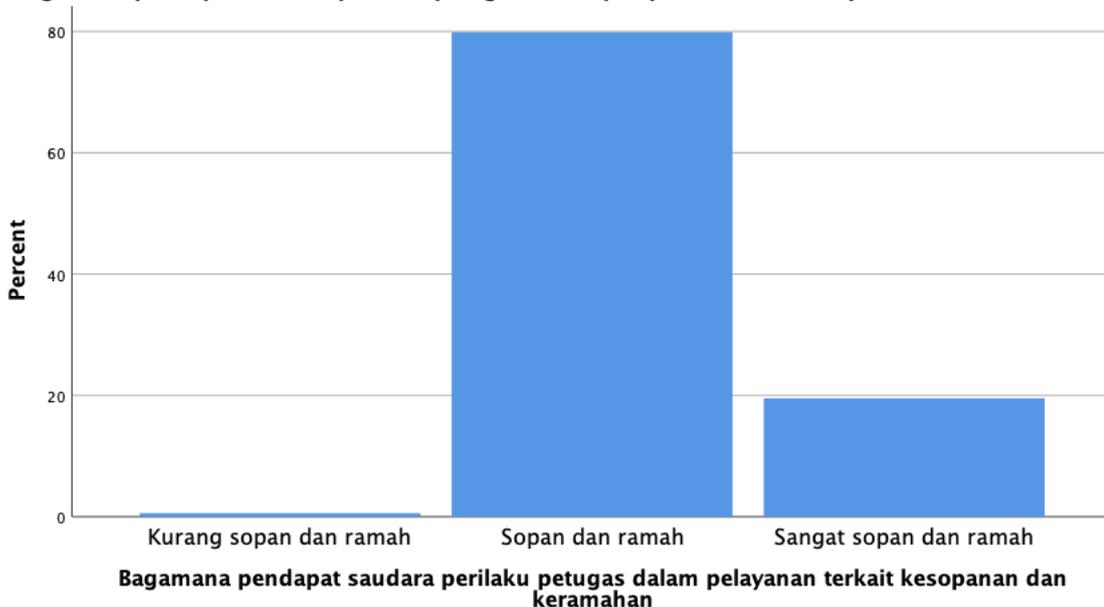


Berdasarkan Tabel 24, data mengenai pendapat responden tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan menunjukkan distribusi yang jelas. Dari total 169 responden, hanya 1 orang atau 0,6% yang menilai petugas sebagai kurang kompeten. Sebagian besar, yaitu 135 responden atau 79,9%, menganggap petugas sebagai kompeten. Sementara itu, 33 responden atau 19,5% menilai petugas sangat kompeten. Akumulasi persentase menunjukkan bahwa 80,5% responden menilai petugas setidaknya kompeten, dan seluruh responden, atau 100%, memberikan penilaian yang mencerminkan berbagai tingkat kompetensi dari petugas tersebut. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan positif mengenai kompetensi petugas dalam pelayanan.

Tabel 25. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang sopan dan ramah	1	.6	.6	.6
	Sopan dan ramah	135	79.9	79.9	80.5
	Sangat sopan dan ramah	33	19.5	19.5	100.0
	Total	169	100.0	100.0	

Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan



Berdasarkan data pada Tabel 25 mengenai pendapat responden terhadap perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki penilaian positif terhadap sikap petugas. Dari total 169 responden, sebanyak 135 orang atau 79,9% menilai petugas sebagai "sopan dan ramah." Selanjutnya, 33 responden atau 19,5% menyatakan bahwa petugas adalah "sangat sopan dan ramah." Hanya 1 responden, yang setara dengan 0,6%, yang berpendapat bahwa petugas "kurang sopan dan ramah." Dengan demikian, hampir seluruh responden memberikan penilaian yang baik terhadap perilaku petugas, dengan total 99,4% dari responden merasa bahwa petugas memiliki sikap yang sopan dan ramah.

Tabel 26. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	20	11.8	11.8	11.8
	Baik	128	75.7	75.7	87.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Baik	21	12.4	12.4	100.0
Total	169	100.0	100.0	



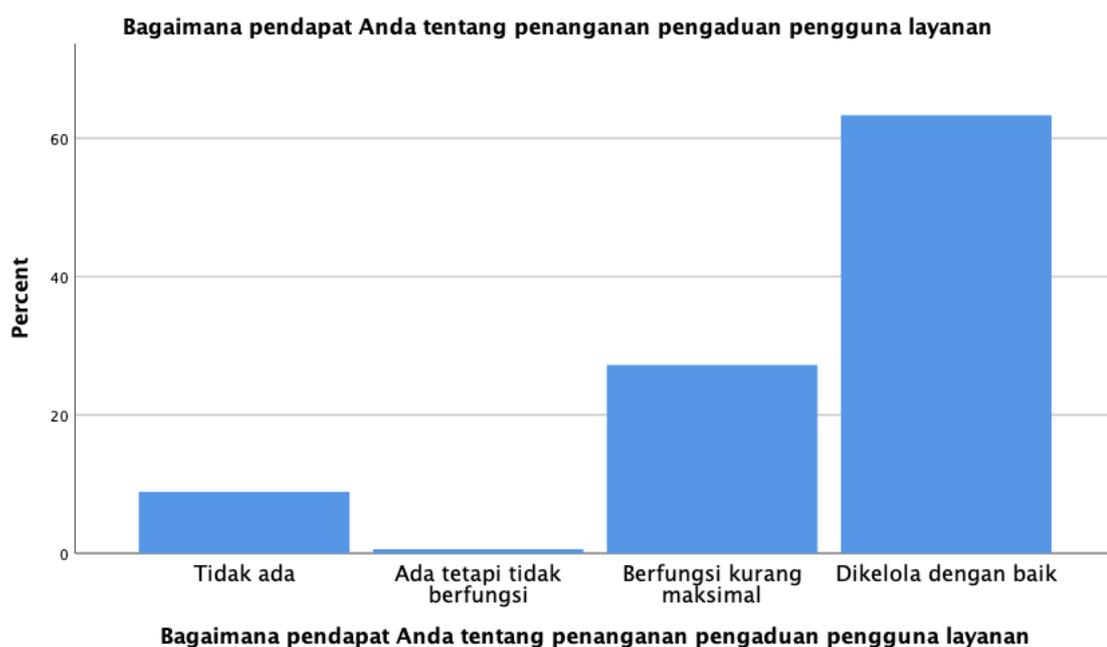
Berdasarkan data dalam Tabel 26 yang menilai kualitas sarana dan prasarana, hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kualitas sarana dan prasarana sebagai baik. Dari total 169 responden, 128 orang atau 75,7% menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di antara sebagian besar responden terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Sebanyak 21 responden atau 12,4% menilai sarana dan prasarana sebagai sangat baik, mengindikasikan adanya kelompok responden yang memiliki penilaian sangat positif terhadap kualitas tersebut. Sementara itu, 20 responden atau 11,8% menganggap sarana dan prasarana hanya cukup, menunjukkan adanya beberapa kekhawatiran atau area yang mungkin perlu perbaikan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kualitas sarana dan prasarana umumnya diterima dengan baik oleh sebagian besar responden, meskipun ada ruang untuk perbaikan bagi sebagian kecil lainnya. Persentase kumulatif mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh responden memberikan penilaian terhadap kualitas sarana dan prasarana tanpa ada yang terlewat.

Tabel 27. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada	15	8.9	8.9	8.9
	Ada tetapi tidak berfungsi	1	.6	.6	9.5
	Berfungsi kurang maksimal	46	27.2	27.2	36.7
	Dikelola dengan baik	107	63.3	63.3	100.0
	Total	169	100.0	100.0	



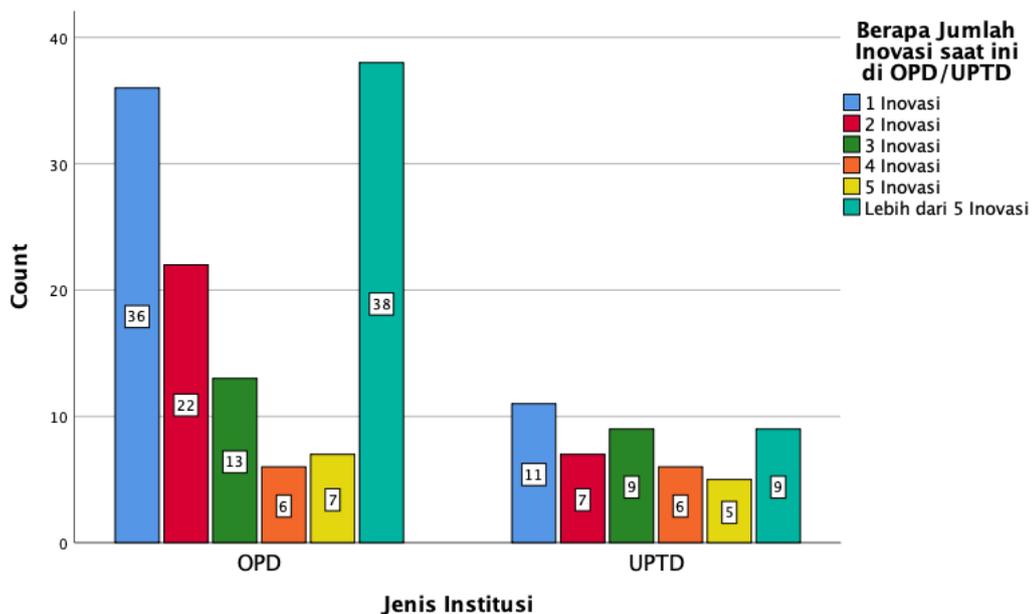
Tabel 27 menyajikan data mengenai pendapat responden terkait penanganan pengaduan pengguna layanan. Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas responden, yakni 107 orang atau 63,3%, menilai bahwa penanganan pengaduan dikelola dengan baik. Sebagian kecil, yaitu 46 orang atau 27,2%, merasa bahwa penanganan pengaduan berfungsi kurang maksimal. Hanya 15 orang atau 8,9% yang berpendapat bahwa tidak ada penanganan pengaduan sama sekali, dan sangat sedikit, yakni 1 orang atau 0,6%, merasa bahwa penanganan yang ada tetapi tidak berfungsi. Data ini menunjukkan bahwa pandangan umum mengenai penanganan pengaduan pengguna layanan relatif positif, meskipun ada beberapa responden yang merasa bahwa efektivitasnya masih perlu diperbaiki.

5.2. Hasil Analisis Data

Potensi Inovasi Daerah mengacu pada peluang-peluang dan kemampuan Kabupaten Bulungan untuk menghasilkan ide-ide baru, konsep-konsep kreatif, program-program inovatif, atau solusi-solusi yang dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan di wilayah tersebut. Potensi inovasi daerah mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah lokal, mengembangkan solusi-solusi yang relevan, dan menerapkannya dengan cara yang kreatif dan efektif.

Tabel 28. Jenis Institusi * Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD Crosstabulation

Count		Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD						Total
		1 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	4 Inovasi	5 Inovasi	Lebih dari 5 Inovasi	
Jenis	OPD	36	22	13	6	7	38	122
Institusi	UPTD	11	7	9	6	5	9	47
Total		47	29	22	12	12	47	169



Tabel 28 memperlihatkan distribusi jumlah inovasi di berbagai jenis institusi, yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Berdasarkan data, total ada 169 inovasi yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, OPD memiliki kontribusi terbesar dengan 122 inovasi, sedangkan UPTD mencatat 47 inovasi.

Pada OPD, mayoritas institusi memiliki lebih dari 5 inovasi, yaitu sebanyak 38 institusi. Selain itu, terdapat 36 institusi dengan 1 inovasi, 22 institusi dengan 2 inovasi,

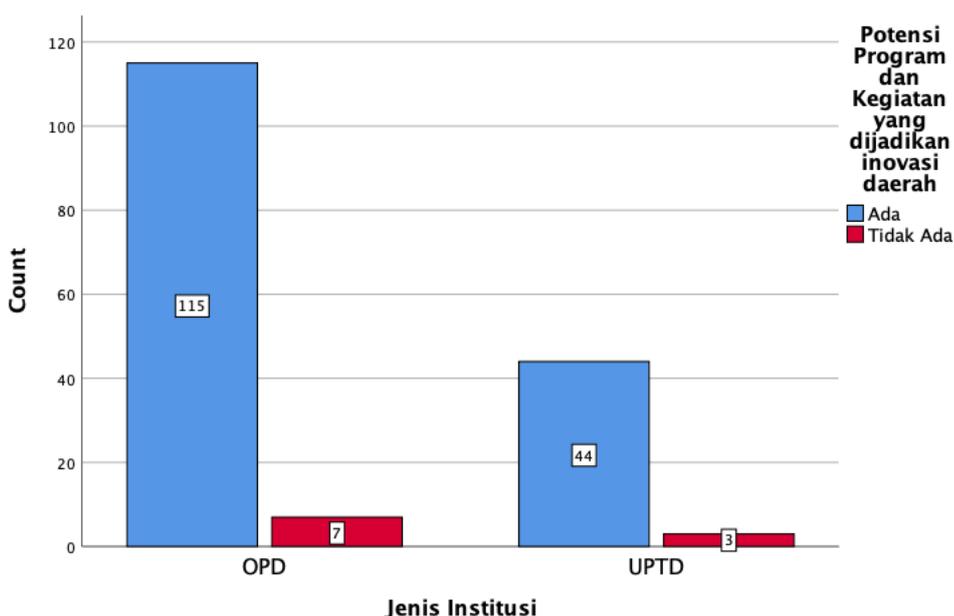
13 institusi dengan 3 inovasi, 6 institusi dengan 4 inovasi, dan 7 institusi dengan 5 inovasi.

Di sisi lain, UPTD menunjukkan distribusi yang berbeda dengan hanya 9 institusi yang memiliki lebih dari 5 inovasi. Selain itu, ada 11 institusi dengan 1 inovasi, 7 institusi dengan 2 inovasi, 9 institusi dengan 3 inovasi, 6 institusi dengan 4 inovasi, dan 5 institusi dengan 5 inovasi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa OPD cenderung memiliki jumlah inovasi yang lebih banyak dibandingkan dengan UPTD, dengan konsentrasi inovasi yang lebih tinggi pada kategori "lebih dari 5 inovasi" di OPD.

Tabel 29. Jenis Institusi * Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah Crosstabulation

Count		Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah		Total
		Ada	Tidak Ada	
Jenis Institusi	OPD	115	7	122
	UPTD	44	3	47
Total		159	10	169

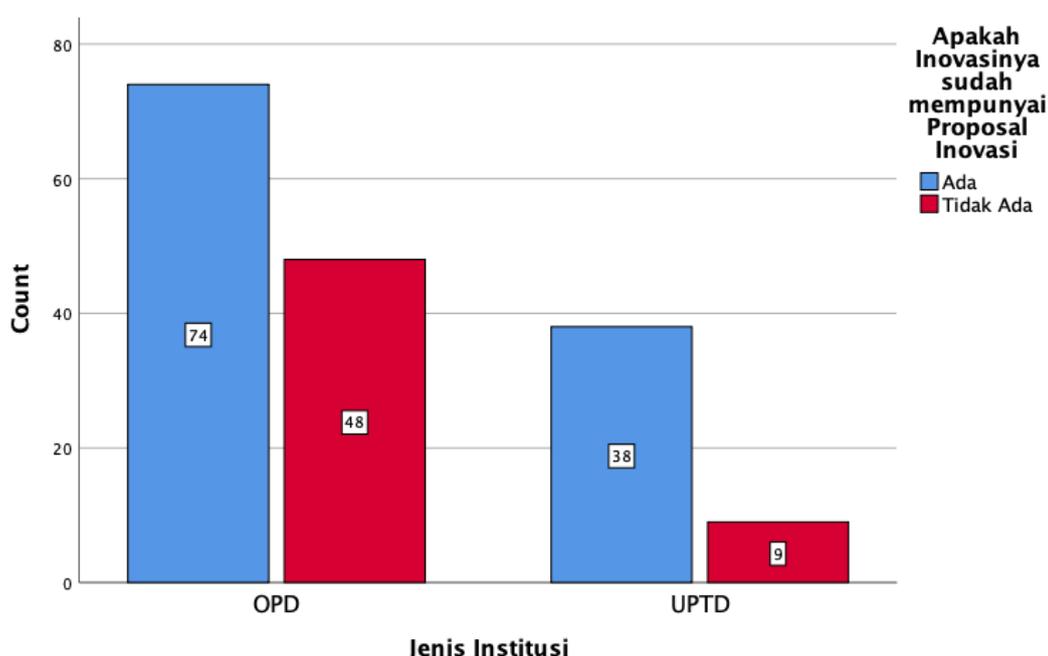


Tabel 29 menyajikan data mengenai jenis institusi dan potensi program serta kegiatan yang dapat dijadikan sebagai inovasi daerah. Dari total 169 institusi yang disurvei, 122 di antaranya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 47 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Di antara OPD, 115 institusi (94,3%) memiliki potensi

program dan kegiatan yang bisa dijadikan inovasi daerah, sementara 7 institusi (5,7%) tidak memiliki potensi tersebut. Untuk UPTD, 44 institusi (93,6%) menunjukkan adanya potensi untuk inovasi, sedangkan 3 institusi (6,4%) tidak memiliki potensi tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 159 institusi yang memiliki potensi untuk dijadikan inovasi daerah, sedangkan 10 institusi tidak memiliki potensi tersebut. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar institusi baik OPD maupun UPTD memiliki potensi untuk berkontribusi dalam inovasi daerah.

Tabel 30. Jenis Institusi * Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi
Crosstabulation

Count		Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi		Total
		Ada	Tidak Ada	
Jenis Institusi	OPD	74	48	122
	UPTD	38	9	47
Total		112	57	169

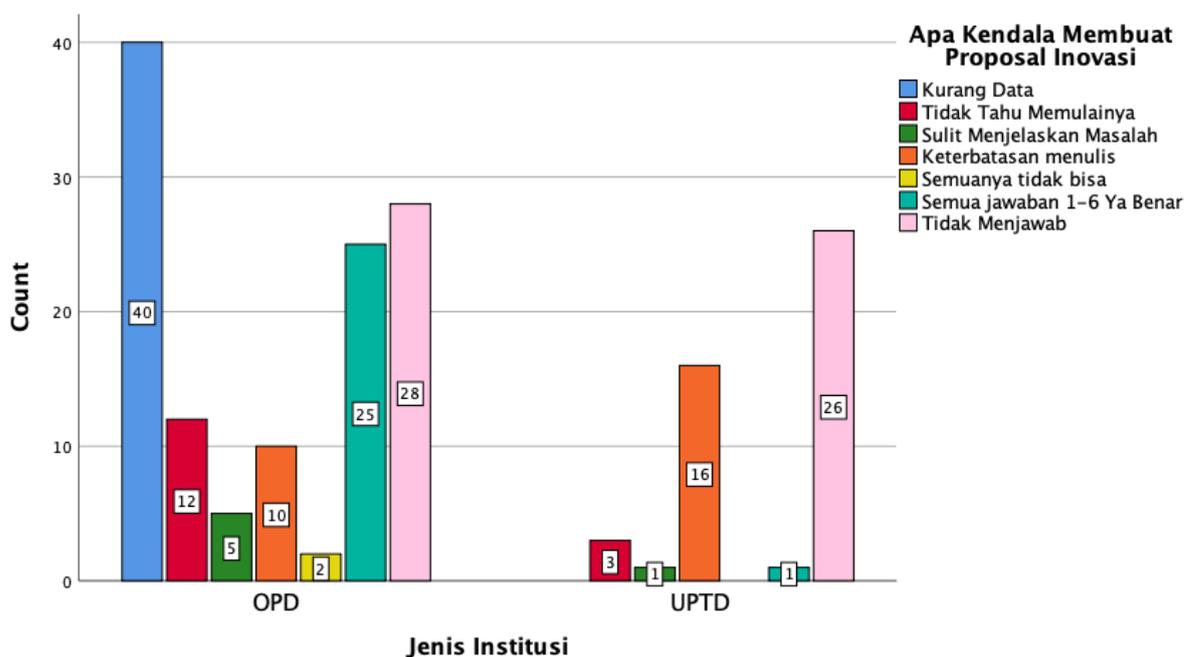


Tabel 30 menyajikan data mengenai hubungan antara jenis institusi dan status proposal inovasi yang dimiliki. Dari total 169 institusi yang disurvei, sebanyak 122 institusi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan 74 di antaranya telah memiliki proposal inovasi, sedangkan 48 institusi OPD belum memilikinya. Sementara itu, dari 47 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terlibat, 38 telah memiliki

proposal inovasi, dan 9 belum memilikinya. Secara keseluruhan, terdapat 112 institusi yang telah memiliki proposal inovasi dan 57 institusi yang belum memilikinya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar institusi, terutama OPD, telah menyusun proposal inovasi, namun masih terdapat sejumlah institusi yang belum melakukannya.

Tabel 31. Jenis Institusi * Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi Crosstabulation

Count		Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi							Total
		Kurang Data	Tidak Tahu Memulainya	Sulit Menjelaskan Masalah	Keterbatasan menulis	Semuanya tidak bisa	Semua jawaban 1-6 Ya Benar	Tidak Menjawab	
Jenis Institusi	OPD	40	12	5	10	2	25	28	122
	UPTD	0	3	1	16	0	1	26	47
	Total	40	15	6	26	2	26	54	169



Tabel 31 menyajikan data mengenai kendala yang dihadapi oleh berbagai jenis institusi dalam membuat proposal inovasi. Data tersebut dikategorikan berdasarkan jenis institusi dan jenis kendala yang dihadapi.

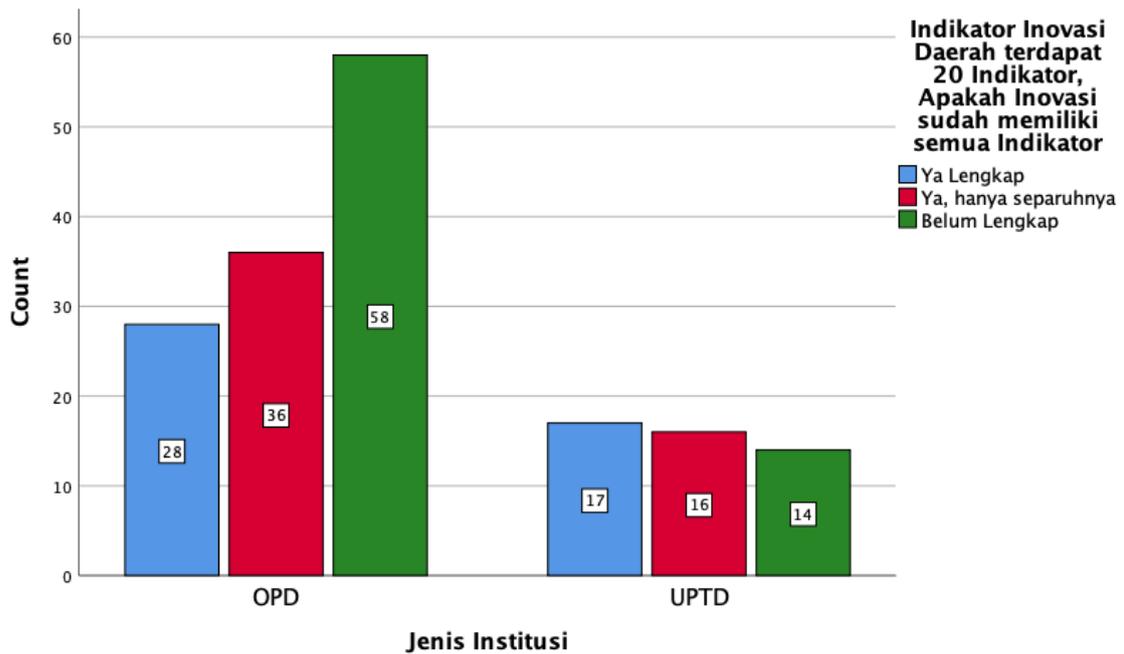
Dari total 169 responden, yang terdiri dari dua jenis institusi, yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), terbagi sebagai berikut:

- a. OPD: Dari 122 responden yang berasal dari OPD, 40 orang melaporkan kendala kurang data, 12 orang tidak tahu bagaimana memulai, 5 orang mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah, 10 orang mengalami keterbatasan dalam menulis, 2 orang mengalami kendala semua aspek, 25 orang merasa semua jawaban dari 1-6 adalah benar, dan 28 orang tidak menjawab.
- b. UPTD: Dari 47 responden yang berasal dari UPTD, 0 orang melaporkan kendala kurang data, 3 orang tidak tahu bagaimana memulai, 1 orang mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah, 16 orang mengalami keterbatasan dalam menulis, 0 orang mengalami kendala semua aspek, 1 orang merasa semua jawaban dari 1-6 adalah benar, dan 26 orang tidak menjawab.

Secara keseluruhan, kendala utama yang dihadapi oleh responden adalah kurang data dan keterbatasan dalam menulis, dengan sebagian besar kendala tersebut terjadi pada institusi OPD. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pembuatan proposal inovasi, OPD menghadapi kendala yang lebih beragam dibandingkan dengan UPTD.

Tabel 32. Jenis Institusi * Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator Crosstabulation

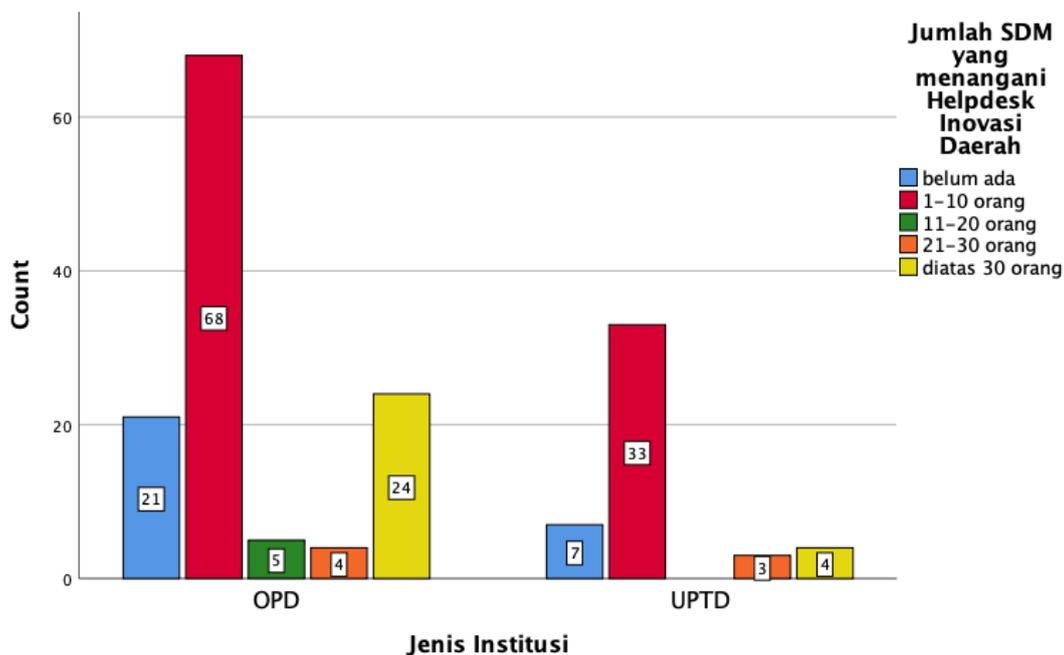
Count		Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator			Total
		Ya Lengkap	Ya, hanya separuhnya	Belum Lengkap	
Jenis Institusi	OPD	28	36	58	122
	UPTD	17	16	14	47
Total		45	52	72	169



Tabel 32 menyajikan distribusi respons mengenai kelengkapan indikator inovasi daerah berdasarkan jenis institusi. Dari total 169 responden, 122 responden berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan 28 di antaranya menyatakan bahwa inovasi yang ada telah mencakup semua 20 indikator, 36 responden merasa hanya separuh indikator yang dipenuhi, dan 58 responden menilai indikatornya belum lengkap. Di sisi lain, dari 47 responden yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), 17 menyatakan inovasi sudah lengkap, 16 merasa hanya separuh indikator yang dipenuhi, dan 14 responden menilai indikatornya belum lengkap. Secara keseluruhan, 45 responden menyatakan bahwa inovasi telah memenuhi semua indikator, 52 responden merasa hanya separuh indikator yang terpenuhi, dan 72 responden menganggap indikatornya belum lengkap. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar institusi merasa inovasi daerah belum sepenuhnya memenuhi semua indikator yang diharapkan, dengan perbedaan pandangan antara OPD dan UPTD.

Tabel 33. Jenis Institusi * Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah
Crosstabulation

Count		Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah					Total
		belum ada	1-10 orang	11-20 orang	21-30 orang	dias 30 orang	
Jenis	OPD	21	68	5	4	24	122
Institusi	UPTD	7	33	0	3	4	47
Total		28	101	5	7	28	169



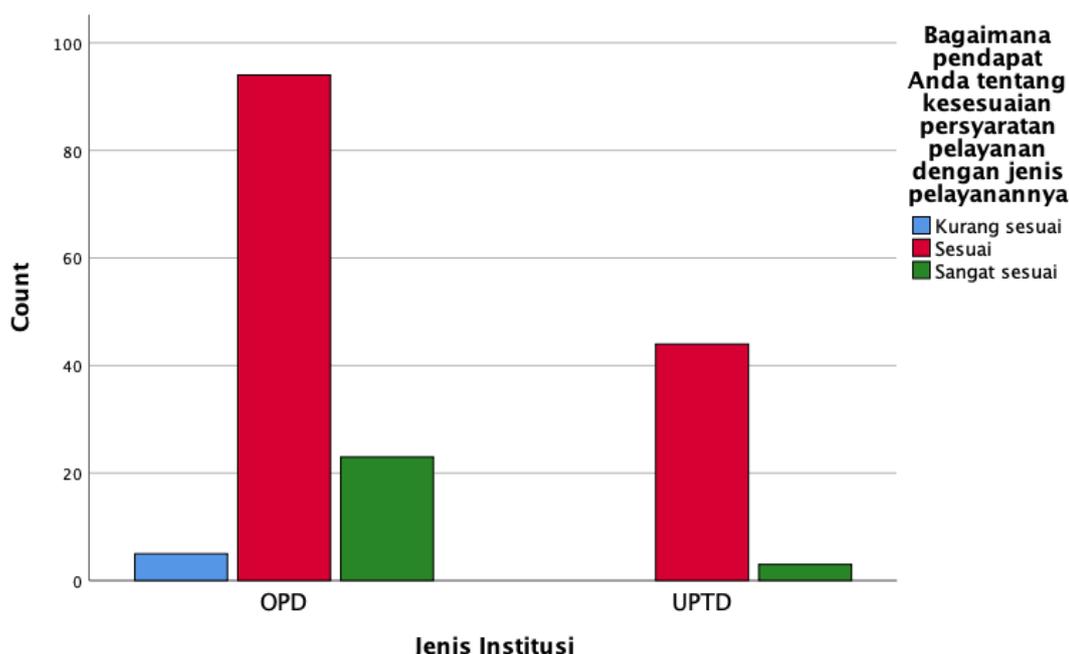
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 33, terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani helpdesk inovasi daerah berdasarkan jenis institusi. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari total 122 institusi, 21 institusi (17,2%) belum memiliki SDM yang khusus menangani helpdesk inovasi daerah. Sebanyak 68 institusi (55,9%) memiliki antara 1 hingga 10 orang SDM, sementara 5 institusi (4,1%) memiliki 11 hingga 20 orang SDM. Hanya 4 institusi (3,3%) yang memiliki 21 hingga 30 orang SDM, dan 24 institusi (19,7%) memiliki lebih dari 30 orang SDM.

Di sisi lain, untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dari total 47 institusi, 7 institusi (14,9%) belum memiliki SDM untuk helpdesk inovasi daerah. Sebanyak 33 institusi (70,2%) memiliki antara 1 hingga 10 orang SDM, sedangkan tidak ada institusi UPTD yang memiliki 11 hingga 20 orang SDM. Ada 3 institusi (6,4%) dengan 21 hingga 30 orang SDM, dan 4 institusi (8,5%) memiliki lebih dari 30 orang SDM.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa baik OPD maupun UPTD sebagian besar mengandalkan jumlah SDM yang relatif kecil, dengan mayoritas institusi memiliki antara 1 hingga 10 orang SDM yang menangani helpdesk inovasi daerah. Namun, OPD cenderung memiliki lebih banyak institusi dengan jumlah SDM yang lebih besar dibandingkan dengan UPTD. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam kapasitas dan sumber daya antara OPD dan UPTD dalam mengelola dan mendukung inovasi daerah.

Tabel 34. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya			Total
		Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai	
		Jenis Institusi	OPD	5	
UPTD	0	44	3	47	
Total		5	138	26	169



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 34, terdapat analisis mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya berdasarkan jenis institusi, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari total 169 responden, 122 di antaranya berasal dari OPD dan 47 dari UPTD.

Dari hasil yang diperoleh, untuk OPD, terdapat 5 responden (4,1%) yang menilai bahwa persyaratan pelayanan kurang sesuai dengan jenis pelayanannya, sedangkan 94 responden (77,0%) merasa sesuai, dan 23 responden (18,9%) menilai sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari OPD merasa bahwa persyaratan pelayanan umumnya sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, dengan sebagian kecil merasa sangat sesuai.

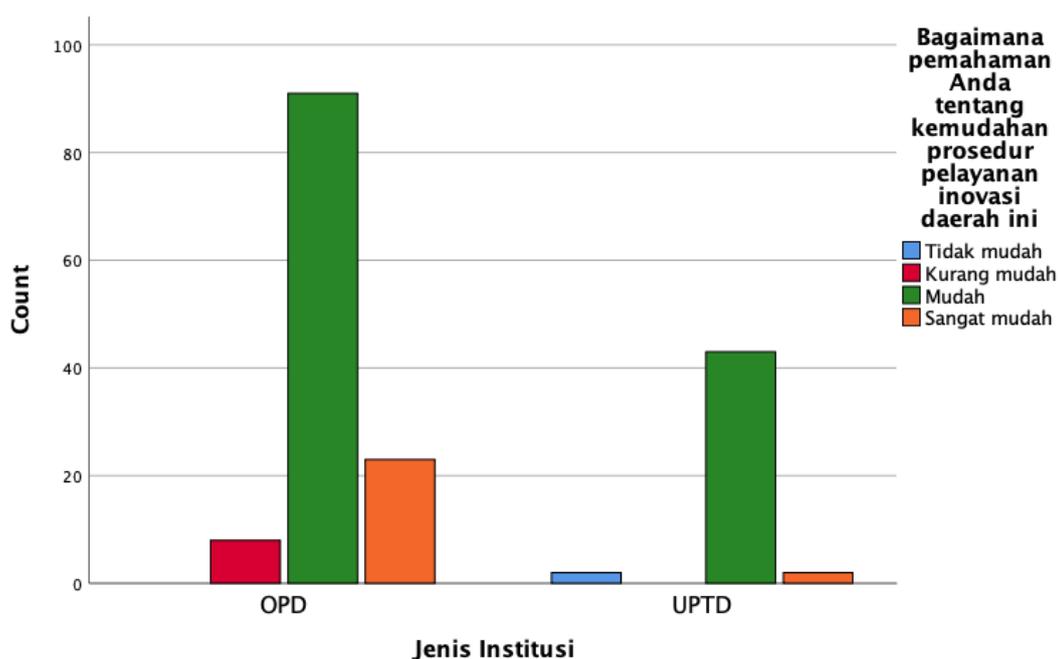
Untuk UPTD, tidak ada responden yang merasa bahwa persyaratan pelayanan kurang sesuai. Sebanyak 44 responden (93,6%) menilai bahwa persyaratan pelayanan

sesuai dengan jenis pelayanannya, dan 3 responden (6,4%) merasa sangat sesuai. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden dari UPTD merasa bahwa persyaratan pelayanan sesuai atau sangat sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, dari total 169 responden, 5 (3,0%) merasa bahwa persyaratan pelayanan kurang sesuai, 138 (81,7%) merasa sesuai, dan 26 (15,4%) merasa sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa persyaratan pelayanan umumnya sesuai atau sangat sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh institusi masing-masing.

Tabel 35. Jenis Institusi * Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini Crosstabulation

Count	Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini				Total
	Tidak mudah	Kurang mudah	Mudah	Sangat mudah	
Jenis Institusi OPD	0	8	91	23	122
UPTD	2	0	43	2	47
Total	2	8	134	25	169

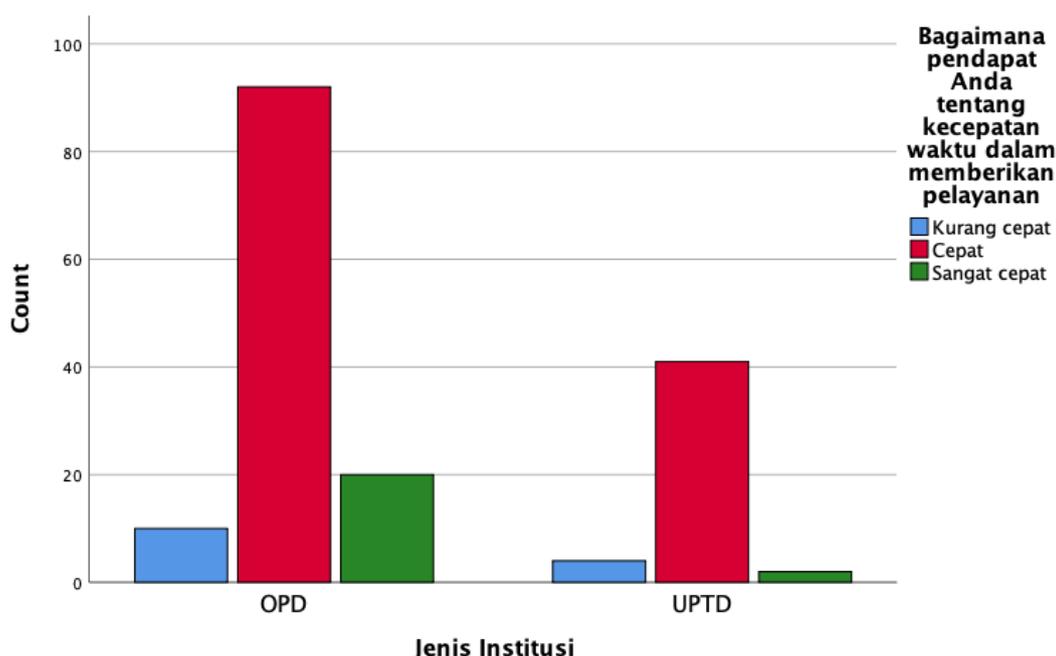


Tabel 35 menyajikan data tentang pemahaman responden dari berbagai jenis institusi mengenai kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah. Dari 169 responden, terdapat dua jenis institusi yang terlibat, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Di antara responden dari OPD, 91 orang (74,6%) menilai prosedur pelayanan sebagai mudah, dan 23 orang (18,9%) merasa sangat mudah. Sebaliknya, tidak ada responden dari OPD yang menganggap prosedur tidak mudah atau kurang mudah. Di sisi lain, responden dari UPTD menunjukkan bahwa 43 orang (91,5%) menganggap prosedur sebagai mudah, sedangkan 2 orang (4,3%) merasa sangat mudah, dan 2 orang (4,3%) menilai prosedur tidak mudah. Secara keseluruhan, mayoritas responden dari kedua jenis institusi merasa bahwa prosedur pelayanan inovasi daerah ini cukup mudah, dengan perbedaan minor dalam persepsi antara OPD dan UPTD.

Tabel 36. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan			Total
		Kurang cepat	Cepat	Sangat cepat	
Jenis Institusi	OPD	10	92	20	122
	UPTD	4	41	2	47
Total		14	133	22	169



Tabel 36 menyajikan hasil crosstabulation antara jenis institusi dan pendapat tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Dari total 169 responden, data menunjukkan bahwa di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 10 responden

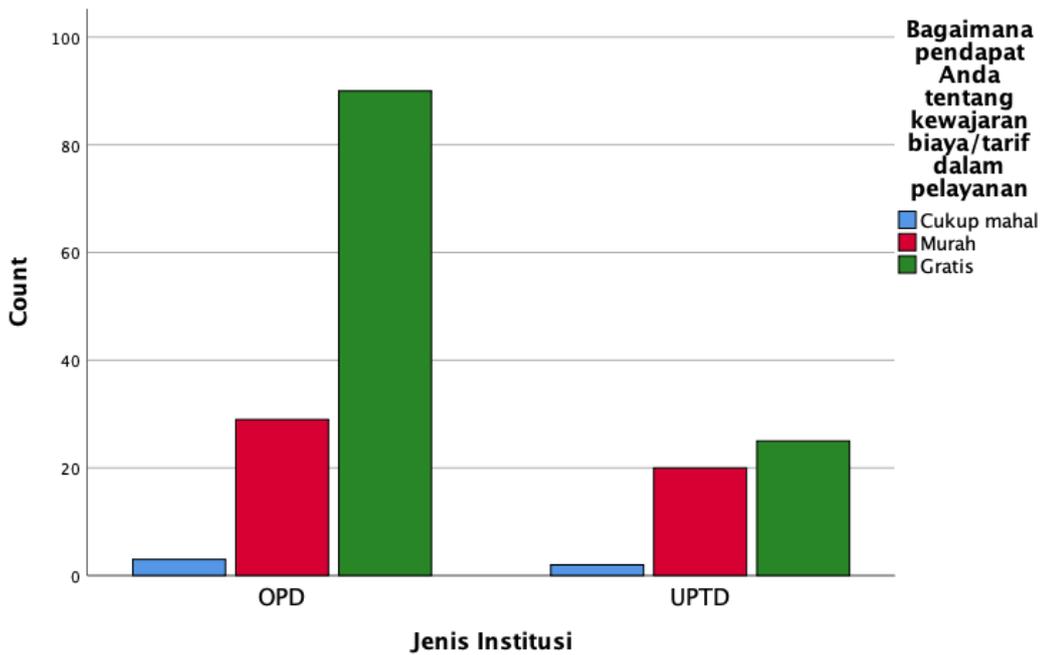
(8,2%) menilai pelayanan sebagai kurang cepat, sementara mayoritas, yaitu 92 responden (75,4%), menilai pelayanan sebagai cepat, dan 20 responden (16,4%) menilai pelayanan sebagai sangat cepat.

Sebaliknya, di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdapat 4 responden (8,5%) yang menilai pelayanan sebagai kurang cepat, 41 responden (87,2%) yang menilai pelayanan sebagai cepat, dan hanya 2 responden (4,3%) yang menilai pelayanan sebagai sangat cepat.

Secara keseluruhan, mayoritas responden dari kedua jenis institusi menilai bahwa pelayanan yang diberikan adalah cepat. Namun, terdapat perbedaan kecil dalam penilaian antara OPD dan UPTD, dengan UPTD menunjukkan proporsi lebih tinggi dalam penilaian pelayanan yang cepat dan proporsi lebih rendah dalam penilaian pelayanan yang sangat cepat dibandingkan dengan OPD. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun pelayanan dianggap efisien di kedua jenis institusi, OPD cenderung mendapatkan penilaian yang lebih tinggi dalam hal kecepatan pelayanan dibandingkan UPTD.

Tabel 37. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan			Total
		Cukup mahal	Murah	Gratis	
Jenis Institusi	OPD	3	29	90	122
	UPTD	2	20	25	47
Total		5	49	115	169



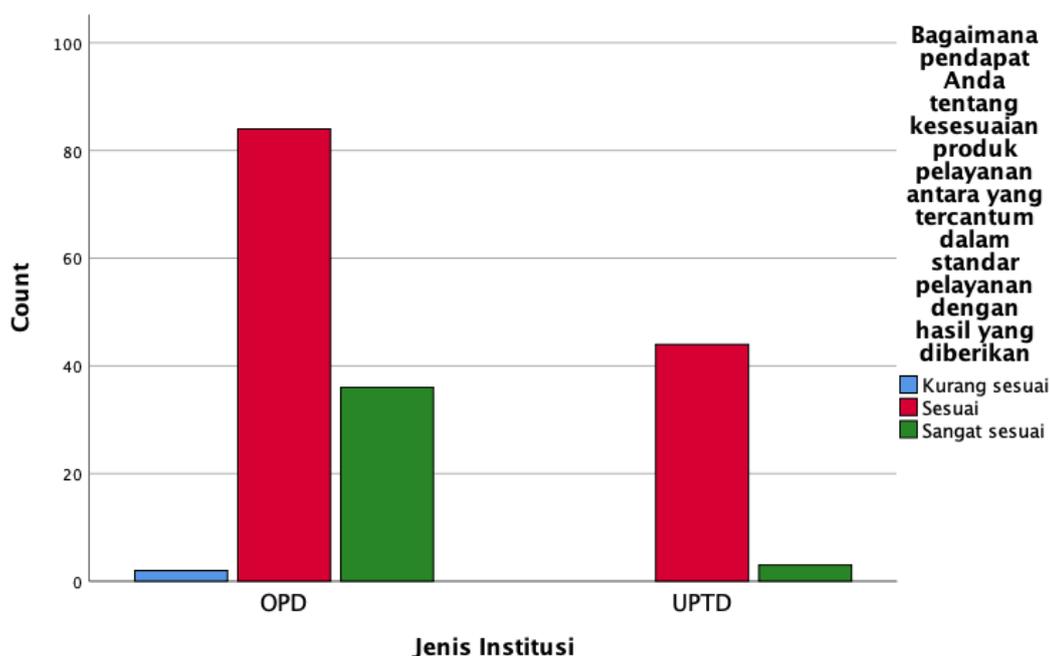
Berdasarkan data dalam Tabel 37 yang menunjukkan distribusi pendapat mengenai kewajaran biaya/tarif pelayanan berdasarkan jenis institusi, terdapat perbedaan yang jelas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari total 122 OPD yang disurvei, sebanyak 3 institusi (2,5%) menganggap biaya/tarif pelayanan cukup mahal, 29 institusi (23,8%) menganggapnya murah, dan mayoritas 90 institusi (73,8%) merasa biaya/tarif tersebut gratis.

Sebaliknya, dari 47 UPTD yang disurvei, hanya 2 institusi (4,3%) yang menganggap biaya/tarif cukup mahal, 20 institusi (42,6%) yang merasa biaya/tarif murah, dan 25 institusi (53,2%) yang menilai biaya/tarif gratis.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sebagian besar OPD dan UPTD merasa biaya/tarif pelayanan yang diberikan adalah gratis. Namun, proporsi institusi yang merasa biaya/tarif murah lebih tinggi di UPTD dibandingkan OPD, yang menunjukkan perbedaan persepsi mengenai kewajaran biaya/tarif antara kedua jenis institusi tersebut.

Tabel 38. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan			Total
		Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai	
Jenis Institusi	OPD	2	84	36	122
	UPTD	0	44	3	47
Total		2	128	39	169



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 38, yang menunjukkan hasil crosstabulation mengenai pendapat tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, terdapat perbedaan signifikan antara dua jenis institusi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

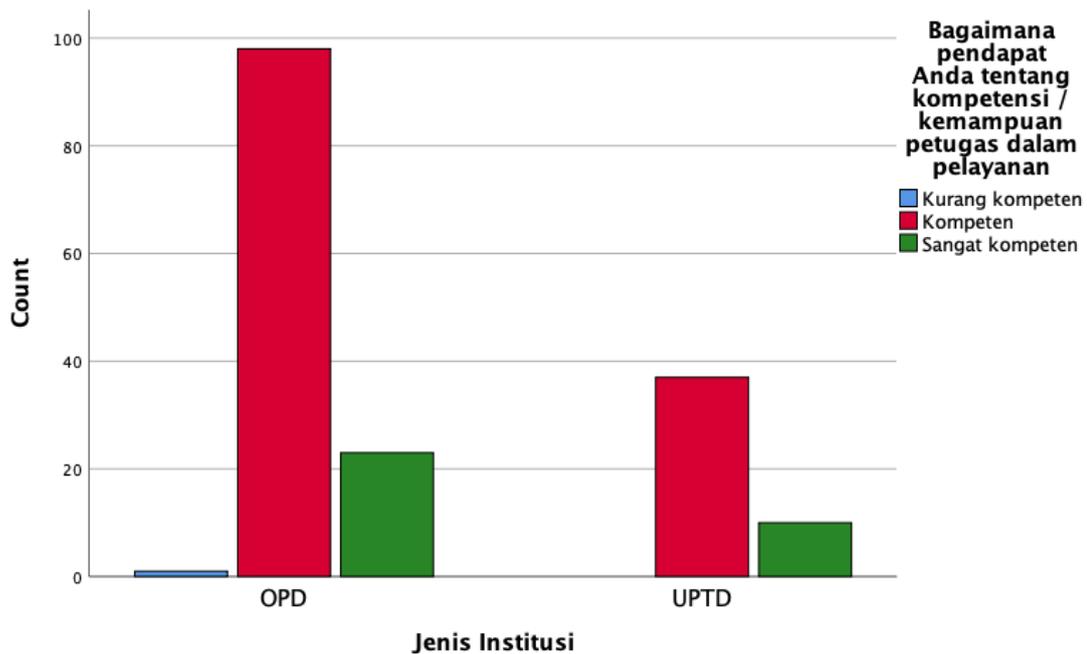
Dari total 122 OPD yang disurvei, mayoritas, yaitu 84 institusi (68,9%), menilai bahwa produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, sedangkan 36 institusi (29,5%) menganggap pelayanan sangat sesuai. Hanya 2 institusi (1,6%) yang merasa produk pelayanan kurang sesuai. Ini menunjukkan bahwa OPD umumnya merasa bahwa hasil pelayanan mereka sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan sebagian besar memberikan penilaian positif mengenai kesesuaian.

Sebaliknya, dari 47 UPTD yang disurvei, 44 institusi (93,6%) menilai bahwa produk pelayanan sesuai dengan standar, sedangkan 3 institusi (6,4%) menganggap pelayanan sangat sesuai. Tidak ada UPTD yang menilai produk pelayanan kurang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD umumnya memiliki penilaian yang sangat positif terhadap kesesuaian produk pelayanan mereka dengan standar yang ada.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa baik OPD maupun UPTD cenderung merasa bahwa produk pelayanan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, meskipun UPTD menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hal kesesuaian tersebut. Data ini memberikan gambaran bahwa standar pelayanan di kedua jenis institusi umumnya dipenuhi, dengan sedikit perbedaan dalam tingkat kepuasan antara OPD dan UPTD.

Tabel 39. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan			Total
		Kurang kompeten	Kompeten	Sangat kompeten	
Jenis Institusi	OPD	1	98	23	122
	UPTD	0	37	10	47
Total		1	135	33	169



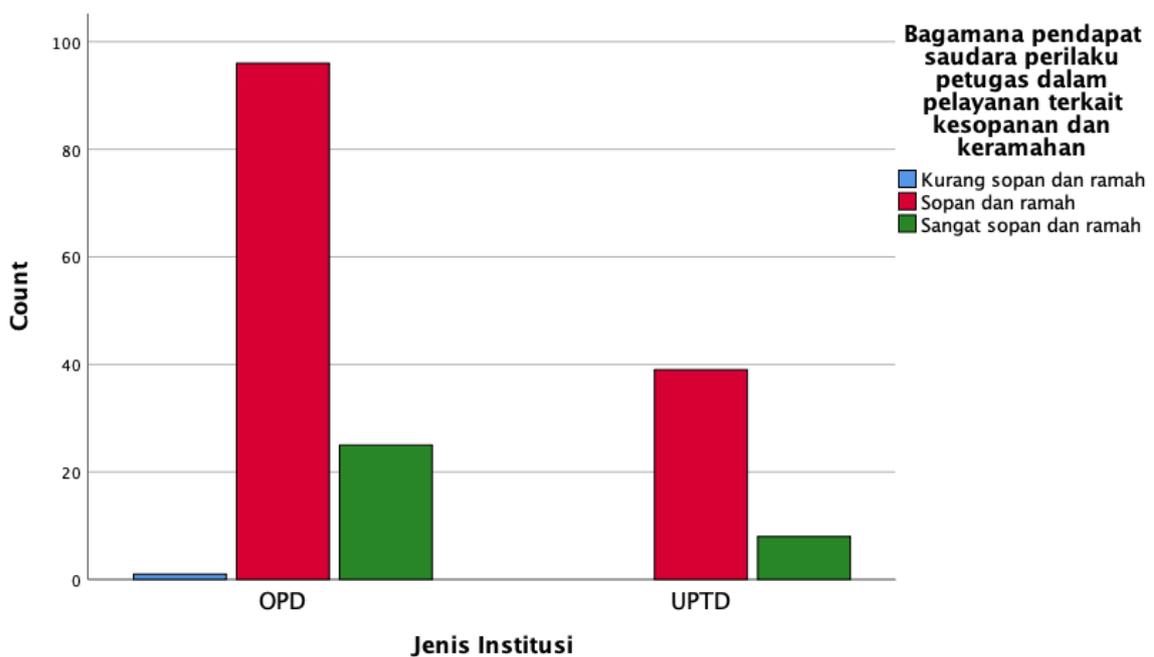
Tabel 39 menyajikan data tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan di berbagai jenis institusi, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari total 169 responden, satu orang menilai petugas di OPD sebagai kurang kompeten, sedangkan 98 orang menilai petugas di OPD sebagai kompeten dan 23 orang menilai sangat kompeten. Secara keseluruhan, 122 responden memberikan penilaian untuk OPD.

Untuk UPTD, tidak ada responden yang menilai petugas sebagai kurang kompeten, 37 orang menilai kompeten, dan 10 orang menilai sangat kompeten, dengan total 47 responden.

Secara kumulatif, data menunjukkan bahwa sebagian besar penilaian terhadap kompetensi petugas di kedua jenis institusi adalah positif, dengan 135 dari 169 responden menilai petugas sebagai kompeten dan 33 responden menilai sangat kompeten. Hanya satu responden yang memberikan penilaian kurang kompeten, yang mencerminkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi terhadap kompetensi petugas di kedua jenis institusi tersebut.

Tabel 40. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan			Total
		Kurang sopan dan ramah	Sopan dan ramah	Sangat sopan dan ramah	
Jenis Institusi	OPD	1	96	25	122
	UPTD	0	39	8	47
Total		1	135	33	169



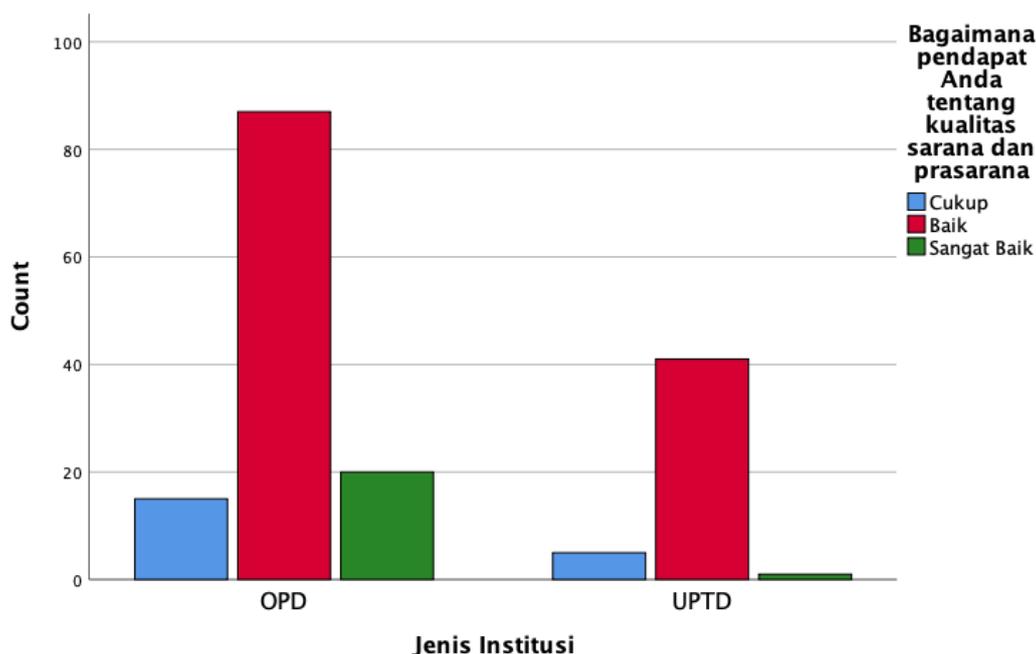
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 40, yang menghubungkan jenis institusi dengan penilaian terhadap perilaku petugas dalam pelayanan, terdapat perbedaan mencolok antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam hal kesopanan dan keramahan.

Dari total 122 institusi OPD, satu institusi menilai perilaku petugas sebagai kurang sopan dan ramah, sedangkan 96 institusi menilai petugas sebagai sopan dan ramah, dan 25 institusi menilai mereka sebagai sangat sopan dan ramah. Sebaliknya, dari total 47 institusi UPTD, tidak ada yang menilai perilaku petugas sebagai kurang sopan dan ramah. Sebanyak 39 institusi menilai petugas sebagai sopan dan ramah, dan 8 institusi menilai mereka sebagai sangat sopan dan ramah.

Secara keseluruhan, dari 169 entitas yang disurvei, satu institusi menilai perilaku petugas sebagai kurang sopan dan ramah, 135 institusi menilai petugas sebagai sopan dan ramah, dan 33 institusi menilai mereka sebagai sangat sopan dan ramah. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar entitas memberikan penilaian positif terhadap perilaku petugas dalam hal kesopanan dan keramahan, dengan lebih banyak penilaian positif berasal dari OPD dibandingkan dengan UPTD. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam praktik pelayanan dan budaya kerja antara kedua jenis institusi tersebut.

Tabel 41. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana			Total
		Cukup	Baik	Sangat Baik	
Jenis Institusi	OPD	15	87	20	122
	UPTD	5	41	1	47
Total		20	128	21	169



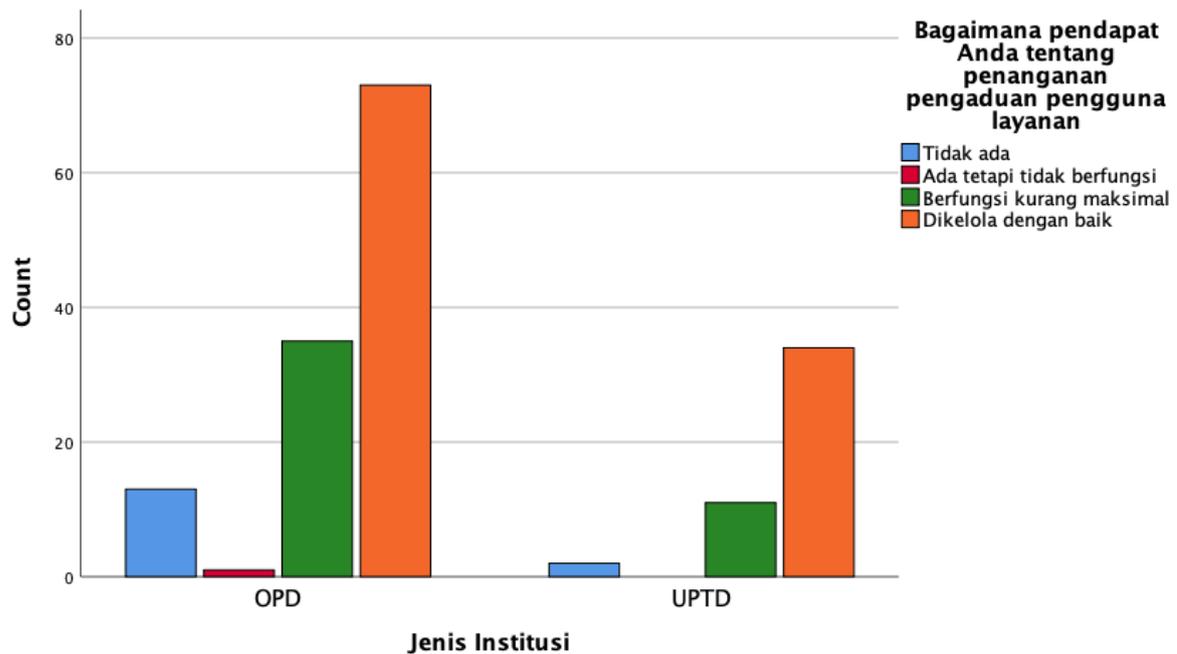
Tabel 41 menyajikan data mengenai kualitas sarana dan prasarana berdasarkan jenis institusi, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari total 169 responden, 122 di antaranya berasal dari OPD dan 47 dari UPTD.

Dalam kategori kualitas sarana dan prasarana yang dianggap "cukup," terdapat 15 responden dari OPD dan 5 dari UPTD, menunjukkan bahwa OPD memiliki lebih banyak tanggapan mengenai kualitas sarana dan prasarana yang dianggap hanya "cukup." Untuk kategori "baik," OPD mencatat 87 responden, sedangkan UPTD mencatat 41 responden. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanggapan positif tentang kualitas sarana dan prasarana datang dari OPD.

Kategori "sangat baik" menunjukkan 20 responden dari OPD dan hanya 1 dari UPTD, menunjukkan bahwa opini tentang sarana dan prasarana yang sangat baik lebih umum di OPD dibandingkan dengan UPTD. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa OPD cenderung mendapatkan penilaian yang lebih positif dibandingkan dengan UPTD dalam hal kualitas sarana dan prasarana, dengan proporsi yang lebih besar menilai sarana dan prasarana mereka sebagai "baik" atau "sangat baik."

Tabel 42. Jenis Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan Crosstabulation

Count	Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan				Total
	Tidak ada	Ada tetapi tidak berfungsi	Berfungsi kurang maksimal	Dikelola dengan baik	
Jenis Institusi OPD	13	1	35	73	122
UPTD	2	0	11	34	47
Total	15	1	46	107	169



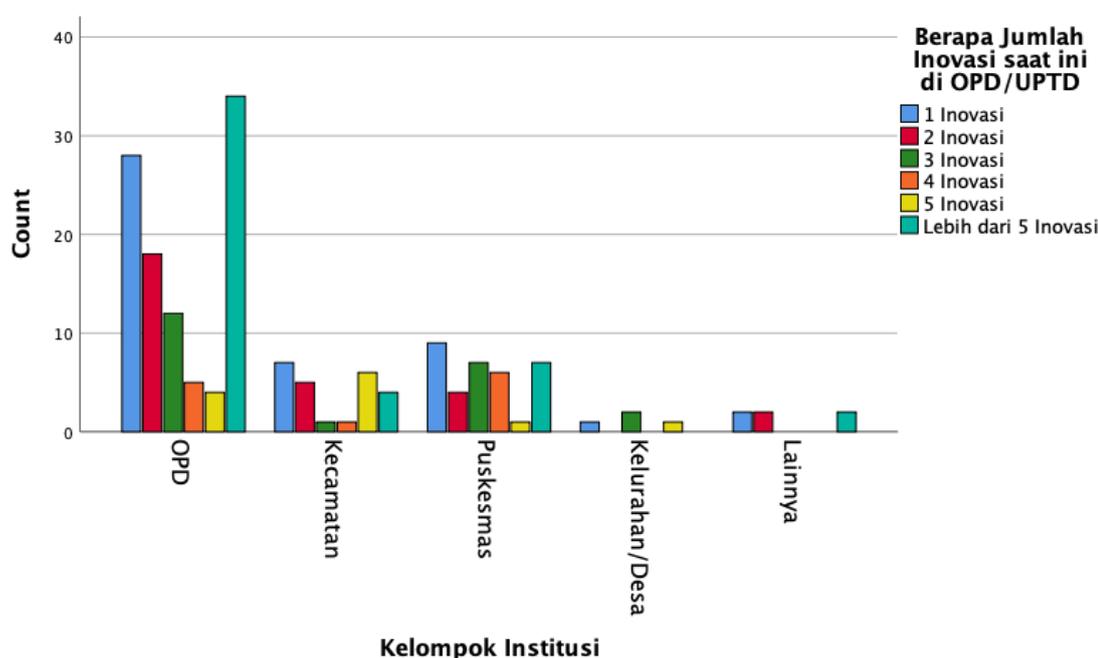
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 42, yang menghubungkan jenis institusi dengan penanganan pengaduan pengguna layanan, terdapat perbedaan yang jelas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dari total 122 OPD yang disurvei, 13 institusi (10,7%) tidak memiliki sistem penanganan pengaduan, sementara hanya 1 institusi (0,8%) melaporkan bahwa sistem tersebut ada tetapi tidak berfungsi. Sebagian besar OPD, yaitu 35 institusi (28,7%), menyatakan bahwa sistem penanganan pengaduan berfungsi namun kurang maksimal, dan 73 institusi (59,8%) melaporkan bahwa penanganan pengaduan dikelola dengan baik.

Di sisi lain, dari total 47 UPTD yang disurvei, hanya 2 institusi (4,3%) yang tidak memiliki sistem penanganan pengaduan, dan tidak ada UPTD yang melaporkan bahwa sistem tersebut ada tetapi tidak berfungsi. Sebanyak 11 institusi (23,4%) merasa bahwa sistem penanganan pengaduan berfungsi kurang maksimal, sementara 34 institusi (72,3%) melaporkan bahwa penanganan pengaduan dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa baik OPD maupun UPTD cenderung memiliki sistem penanganan pengaduan pengguna layanan yang dikelola dengan baik, tetapi ada perbedaan dalam tingkat fungsionalitas dan kepuasan di antara kedua jenis institusi tersebut. OPD memiliki proporsi yang lebih besar dalam kategori "dikelola dengan baik," sedangkan UPTD menunjukkan angka yang tinggi pada kategori yang sama dengan sedikit institusi yang mengalami kendala dalam sistem penanganan pengaduan.

Tabel 43. Kelompok Institusi * Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD
Crosstabulation

Count		Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD					Lebih dari 5 Inovasi	Total
		1 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	4 Inovasi	5 Inovasi		
Kelompok	OPD	28	18	12	5	4	34	101
Institusi	Kecamatan	7	5	1	1	6	4	24
	Puskesmas	9	4	7	6	1	7	34
	Kelurahan/Desa	1	0	2	0	1	0	4
	Lainnya	2	2	0	0	0	2	6
Total		47	29	22	12	12	47	169



Tabel 43 menunjukkan distribusi jumlah inovasi saat ini di berbagai kelompok institusi. Dari total 169 institusi yang disurvei, OPD memiliki jumlah inovasi tertinggi dengan 101 institusi, di mana 28 institusi memiliki satu inovasi, 18 institusi memiliki dua inovasi, dan jumlahnya berkurang pada kategori lebih tinggi, dengan hanya 5 institusi memiliki empat inovasi dan 4 institusi memiliki lima inovasi. Sebanyak 34 institusi OPD melaporkan memiliki lebih dari lima inovasi.

Kecamatan, dengan total 24 institusi, menunjukkan proporsi yang lebih kecil dibandingkan OPD. Di sini, sebagian besar institusi (7) memiliki satu inovasi, dan hanya 1 institusi masing-masing memiliki tiga dan empat inovasi, sementara 6 institusi memiliki lima inovasi. Puskesmas memiliki total 34 institusi, di mana 9 institusi

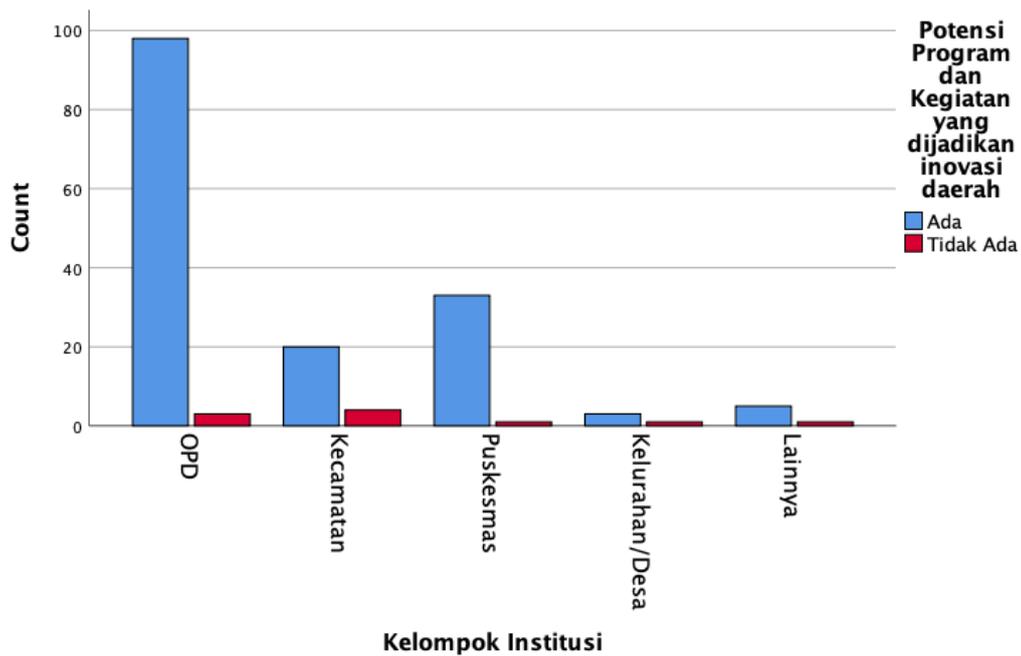
melaporkan satu inovasi, 4 institusi melaporkan dua inovasi, dan 7 institusi memiliki tiga inovasi.

Kelurahan/Desa dan Lainnya memiliki jumlah institusi yang jauh lebih sedikit, dengan masing-masing 4 dan 6 institusi, menunjukkan keterlibatan yang lebih rendah dalam jumlah inovasi. Kelurahan/Desa melaporkan inovasi paling sedikit, dengan hanya 1 institusi memiliki satu inovasi dan 2 institusi melaporkan dua inovasi. Sementara itu, Lainnya juga menunjukkan angka inovasi yang rendah dengan 2 institusi memiliki satu inovasi dan 2 institusi memiliki dua inovasi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa OPD merupakan kelompok institusi dengan jumlah inovasi yang paling banyak dan bervariasi, sedangkan kelompok institusi lainnya seperti Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan/Desa, dan Lainnya memiliki jumlah inovasi yang relatif lebih sedikit.

Tabel 44. Kelompok Institusi * Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah Crosstabulation

Count		Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah		Total
		Ada	Tidak Ada	
Kelompok Institusi	OPD	98	3	101
	Kecamatan	20	4	24
	Puskesmas	33	1	34
	Kelurahan/Desa	3	1	4
	Lainnya	5	1	6
Total		159	10	169



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 44 mengenai kelompok institusi dan potensi program serta kegiatan yang dijadikan inovasi daerah, dapat disimpulkan bahwa dari total 169 institusi, sebagian besar institusi menunjukkan potensi untuk menjadikan program dan kegiatan mereka sebagai inovasi daerah. Dari 101 institusi yang termasuk dalam kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebanyak 98 institusi (97,0%) melaporkan memiliki potensi tersebut, sedangkan hanya 3 institusi (3,0%) yang tidak memiliki potensi.

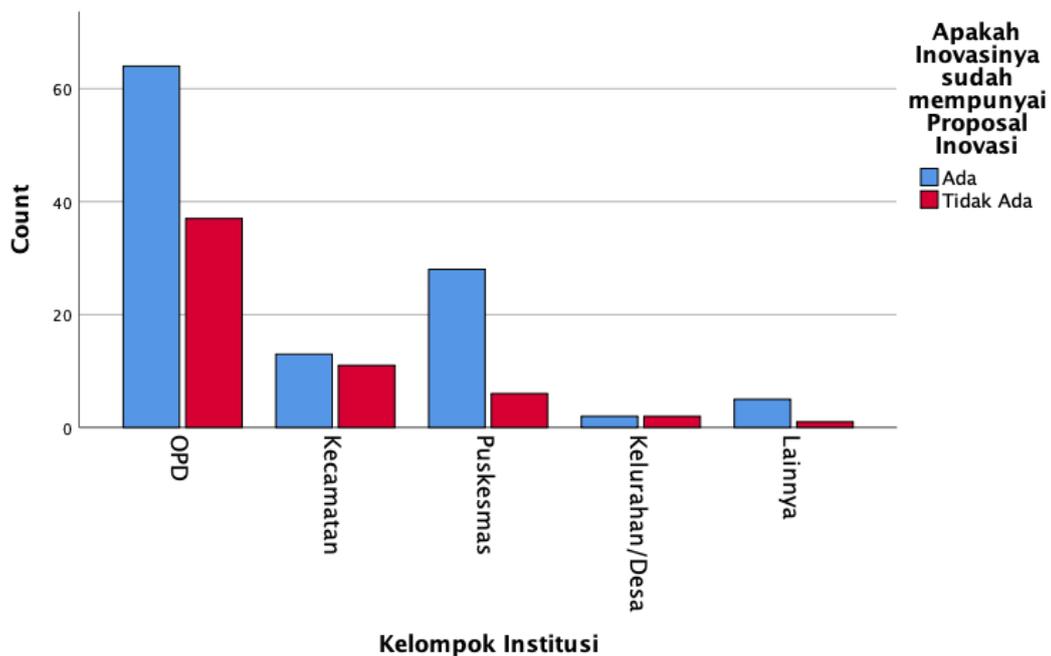
Untuk Kecamatan, dari 24 institusi, 20 institusi (83,3%) melaporkan adanya potensi program dan kegiatan yang dapat dijadikan inovasi, sementara 4 institusi (16,7%) tidak memiliki potensi tersebut. Di tingkat Puskesmas, 33 institusi (97,1%) dari total 34 juga melaporkan adanya potensi, dengan hanya 1 institusi (2,9%) yang tidak.

Kelurahan/Desa menunjukkan angka yang lebih rendah, dengan hanya 3 institusi (75,0%) dari total 4 melaporkan adanya potensi inovasi, sementara 1 institusi (25,0%) tidak. Untuk kategori lainnya, dari 6 institusi, 5 institusi (83,3%) melaporkan potensi inovasi, sedangkan 1 institusi (16,7%) tidak.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas institusi di berbagai kelompok memiliki potensi untuk mengembangkan program dan kegiatan sebagai inovasi daerah, dengan proporsi tertinggi terlihat pada OPD dan Puskesmas.

Tabel 45. Kelompok Institusi * Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi
Crosstabulation

Count		Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi		Total
		Ada	Tidak Ada	
Kelompok Institusi	OPD	64	37	101
	Kecamatan	13	11	24
	Puskesmas	28	6	34
	Kelurahan/Desa	2	2	4
	Lainnya	5	1	6
Total		112	57	169



Berdasarkan data pada Tabel 45, yang menunjukkan distribusi kelompok institusi terhadap status proposal inovasi, terdapat perbedaan yang jelas dalam jumlah institusi yang memiliki atau tidak memiliki proposal inovasi. Dari total 169 institusi yang disurvei, 112 institusi atau 66,3% telah memiliki proposal inovasi, sementara 57 institusi atau 33,7% belum memilikinya.

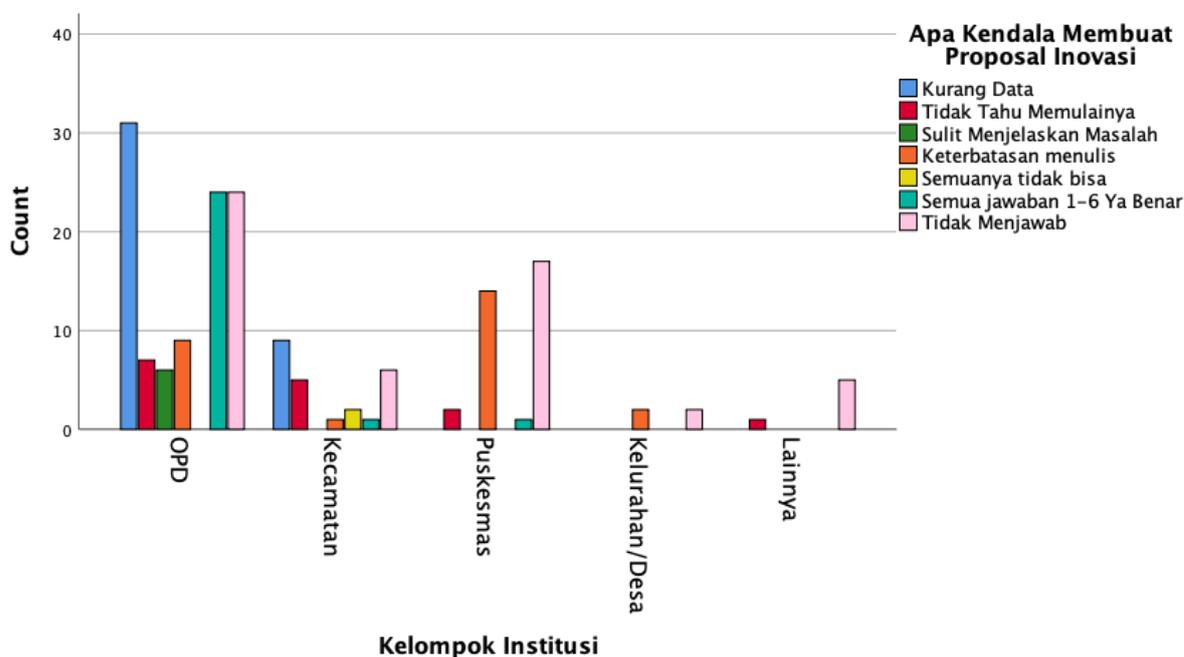
Secara spesifik, di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 64 dari 101 institusi (63,4%) telah memiliki proposal inovasi, sedangkan 37 institusi (36,6%) belum memilikinya. Untuk Kecamatan, 13 dari 24 institusi (54,2%) telah memiliki proposal inovasi, dan 11 institusi (45,8%) belum memilikinya. Puskesmas menunjukkan angka yang lebih tinggi, dengan 28 dari 34 institusi (82,4%) telah memiliki proposal inovasi, sementara 6 institusi (17,6%) belum memilikinya. Kelurahan/Desa serta kategori

lainnya masing-masing memiliki 2 institusi yang memiliki proposal inovasi, dan jumlah yang sama belum memilikinya, dengan total 4 dan 6 institusi untuk masing-masing kategori.

Distribusi ini menggambarkan bahwa Puskesmas memiliki proporsi tertinggi dari institusi yang telah memiliki proposal inovasi, sementara kategori lainnya memiliki jumlah yang lebih kecil dan lebih seimbang dalam hal ini.

Tabel 46. Kelompok Institusi * Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi Crosstabulation

Count		Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi						Total	
		Kurang Data	Tidak Tahu Memulainya	Sulit Menjelaskan Masalah	Keterbatasan menulis	Semua jawaban tidak bisa	Semua jawaban 1-6 Ya Benar		Tidak Menjawab
	Kelompok OPD	31	7	6	9	0	24	24	101
	Kecamatan	9	5	0	1	2	1	6	24
	Puskesmas	0	2	0	14	0	1	17	34
	Kelurahan/Desa	0	0	0	2	0	0	2	4
	Lainnya	0	1	0	0	0	0	5	6
	Total	40	15	6	26	2	26	54	169



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 46 mengenai kendala dalam pembuatan proposal inovasi berdasarkan kelompok institusi, terdapat beberapa temuan penting. Dari total 169 responden, kelompok institusi yang paling banyak mengalami kendala dalam membuat proposal inovasi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 101 responden. Di antara kendala yang dihadapi OPD, sebagian besar mengidentifikasi "Kurang Data" (31 responden) dan "Semuanya tidak bisa" (24 responden) sebagai masalah utama. OPD juga menunjukkan ketidakmampuan dalam beberapa aspek lainnya, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil.

Kecamatan melaporkan kendala utama mereka adalah "Kurang Data" (9 responden) dan "Tidak Tahu Memulainya" (5 responden), dengan beberapa responden juga melaporkan "Keterbatasan menulis" (2 responden). Puskesmas mengalami kendala utama dalam "Keterbatasan menulis" (14 responden), yang menunjukkan bahwa mereka lebih sering menghadapi masalah dalam menjelaskan masalah secara tertulis dibandingkan dengan kelompok institusi lainnya.

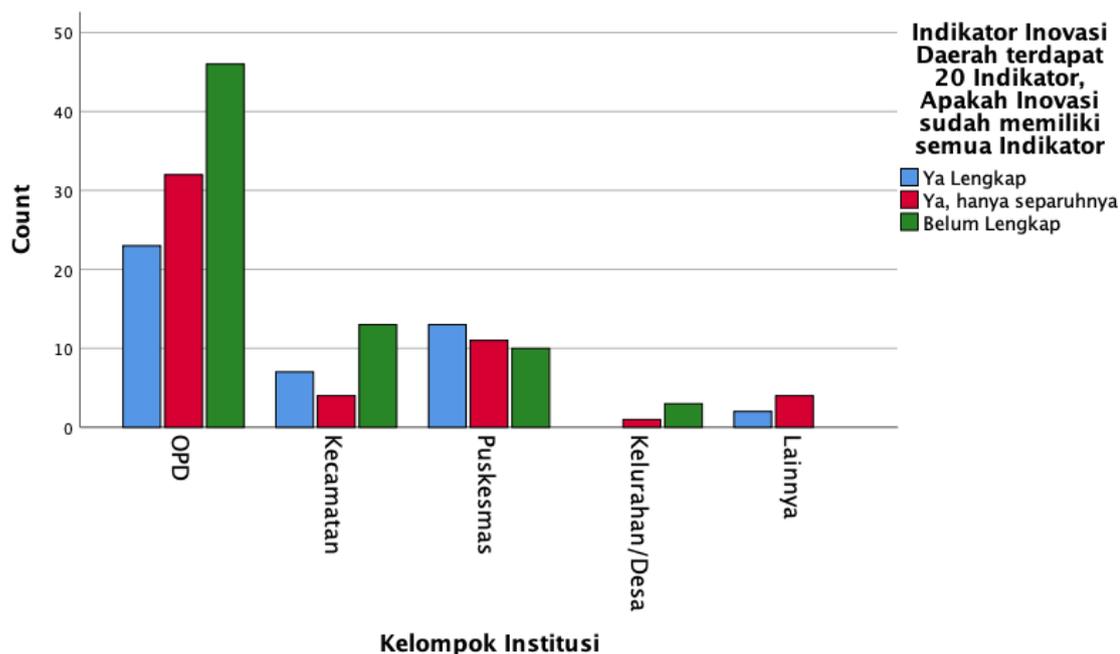
Kelurahan/Desa dan kelompok institusi lainnya melaporkan kendala dalam jumlah yang relatif kecil, dengan Kelurahan/Desa terutama mengalami "Keterbatasan menulis" (2 responden) dan institusi lainnya mengalami "Tidak Tahu Memulainya" (1 responden) sebagai kendala utama.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa kendala dalam pembuatan proposal inovasi sangat bervariasi antar kelompok institusi, dengan OPD dan Puskesmas mengalami tantangan yang lebih signifikan dalam aspek tertentu, sedangkan kelompok institusi lain menunjukkan kendala yang lebih spesifik dan jumlah yang lebih kecil.

Tabel 47. Kelompok Institusi * Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator Crosstabulation

Count		Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator			Total
		Ya Lengkap	Ya, hanya separuhnya	Belum Lengkap	
		Kelompok Institusi	OPD	23	
	Kecamatan	7	4	13	24
	Puskesmas	13	11	10	34
	Kelurahan/Desa	0	1	3	4

Count	Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator			Total
	Ya Lengkap	Ya, hanya separuhnya	Belum Lengkap	
	Lainnya	2	4	
Total	45	52	72	169



Tabel 47 menyajikan data mengenai apakah inovasi daerah sudah mencakup semua 20 indikator yang ditetapkan, berdasarkan kelompok institusi. Dari total 169 responden, kelompok institusi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki jumlah terbesar yang menyatakan bahwa inovasi telah mencakup semua indikator dengan 23 responden (22,8%). Sebanyak 32 responden OPD (31,7%) menyebutkan bahwa inovasi hanya mencakup separuh dari indikator, sementara 46 responden (45,5%) merasa bahwa inovasi belum lengkap.

Kelompok Kecamatan menunjukkan bahwa hanya 7 responden (29,2%) menyatakan inovasi telah lengkap, dengan 4 responden (16,7%) mengatakan inovasi mencakup separuh indikator, dan 13 responden (54,2%) merasa inovasi belum lengkap.

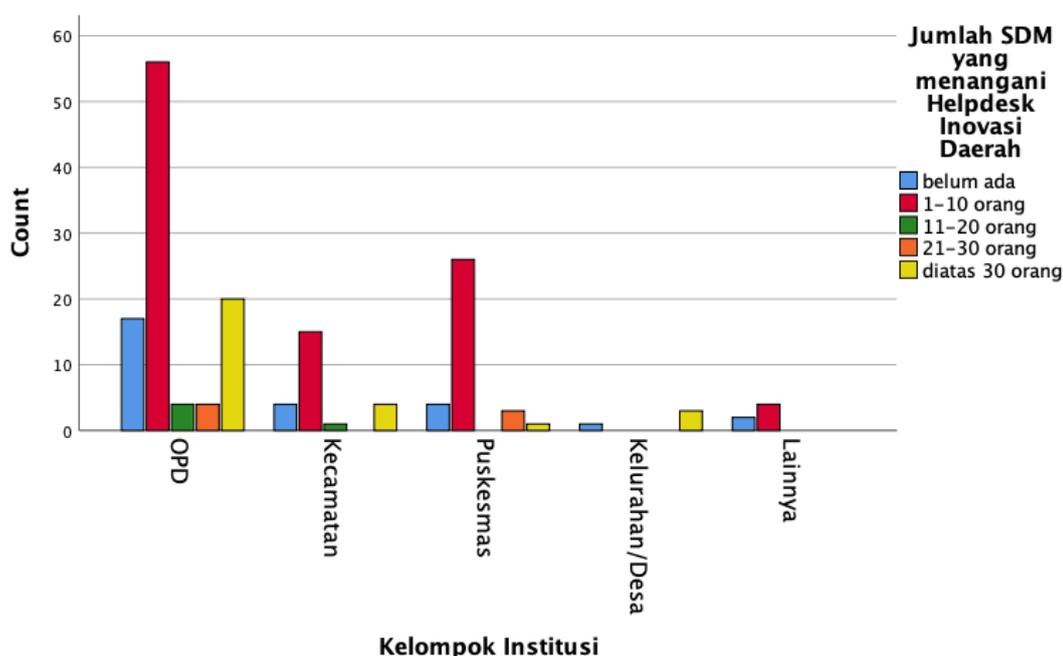
Untuk Puskesmas, 13 responden (38,2%) menyebutkan inovasi sudah lengkap, 11 responden (32,4%) hanya mencakup separuh indikator, dan 10 responden (29,4%) merasa inovasi belum lengkap.

Kelurahan/Desa dan kategori lainnya menunjukkan angka yang lebih kecil, dengan Kelurahan/Desa hanya 4 responden, di mana 3 orang (75%) merasa inovasi belum lengkap, dan kategori lainnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa inovasi belum lengkap.

Secara keseluruhan, dari total 169 responden, 45 orang (26,6%) menyatakan bahwa inovasi telah mencakup semua indikator, 52 orang (30,8%) hanya mencakup separuh indikator, dan 72 orang (42,6%) merasa inovasi belum lengkap. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi indikator, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan inovasi di berbagai institusi.

Tabel 48. Kelompok Institusi * Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah
Crosstabulation

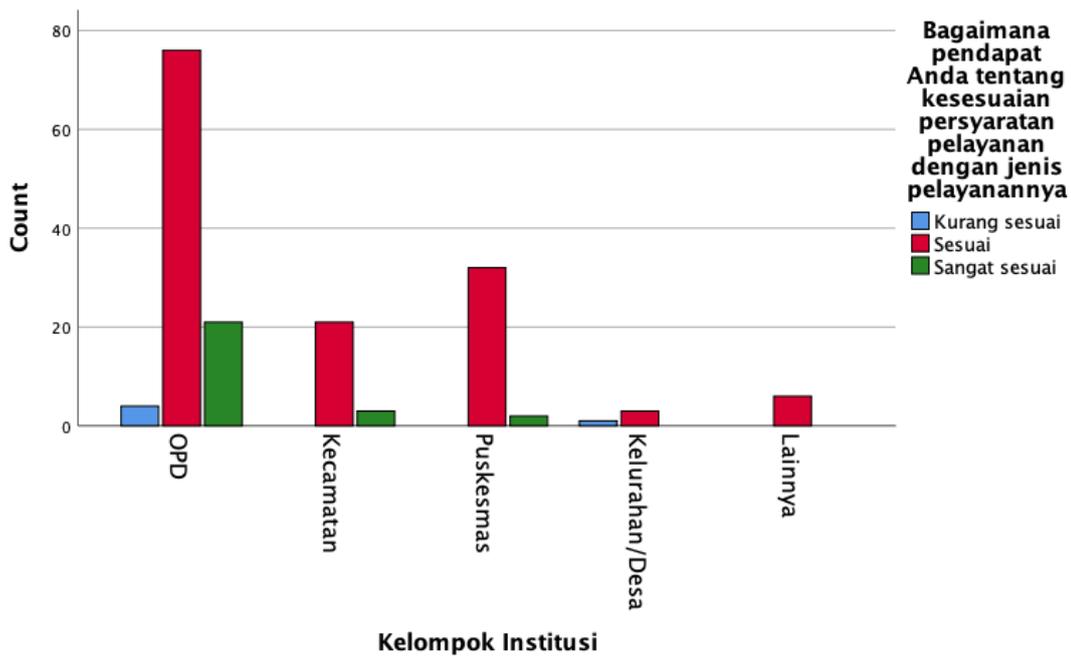
Count		Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah					Total
		belum ada	1-10 orang	11-20 orang	21-30 orang	diatas 30 orang	
Kelompok	OPD	17	56	4	4	20	101
Institusi	Kecamatan	4	15	1	0	4	24
	Puskesmas	4	26	0	3	1	34
	Kelurahan/Desa	1	0	0	0	3	4
	Lainnya	2	4	0	0	0	6
Total		28	101	5	7	28	169



Tabel 48 menggambarkan distribusi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah berdasarkan kelompok institusi. Dari total 169 SDM yang terlibat, mayoritas berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan 56 institusi memiliki 1-10 orang SDM, 17 institusi belum memiliki SDM untuk helpdesk, dan 20 institusi memiliki lebih dari 30 orang SDM. Kecamatan memiliki 15 institusi dengan 1-10 orang SDM dan 4 institusi dengan SDM di atas 30 orang. Puskesmas mencatat 26 institusi dengan 1-10 orang SDM dan 3 institusi dengan 21-30 orang SDM. Kelurahan/Desa serta institusi lainnya menunjukkan jumlah SDM yang relatif kecil, dengan Kelurahan/Desa memiliki hanya 4 institusi dan institusi lainnya memiliki 6 institusi dengan jumlah SDM yang bervariasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar institusi yang menangani helpdesk inovasi daerah terutama terpusat pada OPD dan Puskesmas, sementara institusi lain seperti Kelurahan/Desa dan institusi lainnya memiliki kontribusi yang lebih kecil dalam jumlah SDM untuk tugas ini.

Tabel 49. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya			Total
		Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai	
Kelompok Institusi	OPD	4	76	21	101
	Kecamatan	0	21	3	24
	Puskesmas	0	32	2	34
	Kelurahan/Desa	1	3	0	4
	Lainnya	0	6	0	6
Total		5	138	26	169



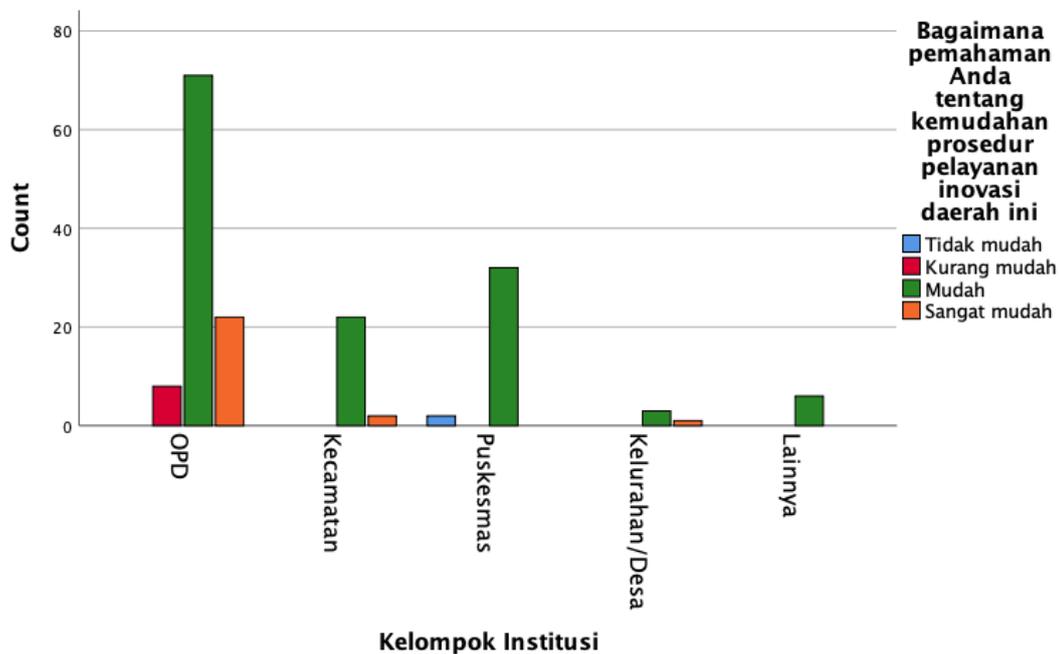
Tabel 49 menunjukkan hasil crosstabulation mengenai pendapat tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya berdasarkan kelompok institusi. Dari total 169 responden, sebanyak 101 di antaranya berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antara responden OPD, 76 (75,2%) menyatakan bahwa persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya, sementara 21 (20,8%) merasa sangat sesuai, dan 4 (4,0%) merasa kurang sesuai.

Kelompok Kecamatan terdiri dari 24 responden, di mana 21 (87,5%) menyatakan bahwa persyaratan pelayanan sesuai, dan 3 (12,5%) merasa sangat sesuai. Puskesmas, dengan 34 responden, menunjukkan bahwa 32 (94,1%) menilai persyaratan pelayanan sesuai dan 2 (5,9%) sangat sesuai, tanpa ada yang merasa kurang sesuai. Kelurahan/Desa, dengan 4 responden, menunjukkan 3 (75,0%) merasa persyaratan pelayanan sesuai dan 1 (25,0%) kurang sesuai. Terakhir, kategori lainnya, dengan 6 responden, menunjukkan 6 (100%) merasa persyaratan pelayanan sesuai, tanpa yang merasa sangat sesuai atau kurang sesuai.

Secara keseluruhan, mayoritas responden dari semua kelompok institusi merasa bahwa persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya, dengan Puskesmas dan OPD menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi.

Tabel 50, Kelompok Institusi * Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini Crosstabulation

Count		Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini				Total
		Tidak mudah	Kurang mudah	Mudah	Sangat mudah	
		Kelompok Institusi	OPD	0	8	
	Kecamatan	0	0	22	2	24
	Puskesmas	2	0	32	0	34
	Kelurahan/Desa	0	0	3	1	4
	Lainnya	0	0	6	0	6
Total		2	8	134	25	169

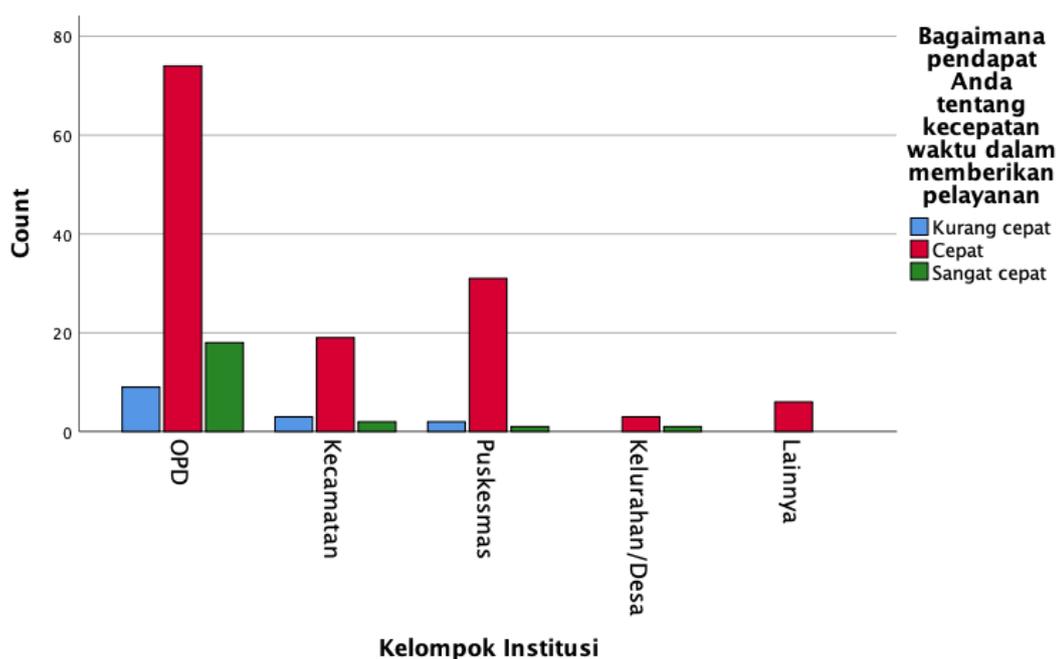


Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 50 mengenai pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah, hasil survei menunjukkan perbedaan yang jelas antara kelompok institusi. Dari total 169 responden, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) merupakan kelompok terbesar dengan 101 responden, di mana mayoritasnya merasa prosedur pelayanan inovasi daerah "Mudah" (71 responden) dan "Sangat mudah" (22 responden). Sementara itu, kelompok Kecamatan terdiri dari 24 responden, dengan sebagian besar merasa prosedur tersebut "Mudah" (22 responden), dan hanya sedikit yang merasa "Kurang mudah" (0 responden). Puskesmas, dengan 34 responden, menunjukkan bahwa sebagian besar merasa prosedur "Mudah" (32

responden), dengan sedikit yang merasa "Tidak mudah" (2 responden). Kelurahan/Desa dan institusi lainnya masing-masing memiliki jumlah responden yang lebih kecil, dengan sedikit variasi dalam persepsi kemudahan prosedur. Secara keseluruhan, mayoritas responden dari OPD dan Puskesmas merasa bahwa prosedur pelayanan inovasi daerah cukup mudah, sedangkan kelompok lain menunjukkan persepsi yang lebih bervariasi.

Tabel 51. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan			Total
		Kurang cepat	Cepat	Sangat cepat	
Kelompok Institusi	OPD	9	74	18	101
	Kecamatan	3	19	2	24
	Puskesmas	2	31	1	34
	Kelurahan/Desa	0	3	1	4
	Lainnya	0	6	0	6
Total		14	133	22	169



Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 51 mengenai pendapat tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di berbagai kelompok institusi, dapat dilihat bahwa dari total 169 responden, mayoritas menilai kecepatan pelayanan sebagai

"cepat". Khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebanyak 74 responden (73,3% dari total 101 responden OPD) menilai kecepatan pelayanan sebagai cepat, dan 18 responden (17,8%) menilai sangat cepat.

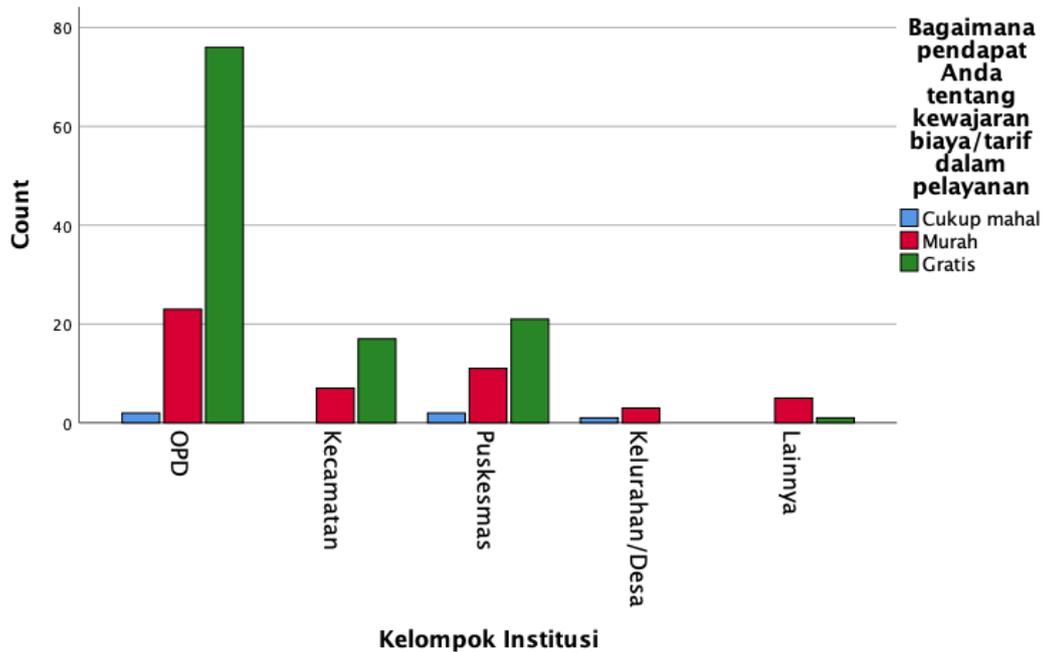
Di tingkat Kecamatan, 19 responden (79,2% dari total 24 responden Kecamatan) juga menilai pelayanan sebagai cepat, namun hanya 2 responden (8,3%) menilai sangat cepat. Puskesmas menunjukkan 31 responden (91,2% dari total 34 responden Puskesmas) menilai pelayanan cepat, dengan 1 responden (2,9%) menilai sangat cepat.

Untuk Kelurahan/Desa, 3 responden (75% dari total 4 responden) menilai cepat, dan 1 responden (25%) menilai sangat cepat. Kategori "lainnya" memiliki 6 responden yang menilai cepat, tetapi tidak ada yang menilai sangat cepat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas institusi di berbagai kelompok mendapatkan penilaian positif terkait kecepatan waktu pelayanan, dengan OPD, Kecamatan, dan Puskesmas mendapatkan penilaian cepat sebagai kategori dominan.

Tabel 52. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan			Total
		Cukup mahal	Murah	Gratis	
Kelompok Institusi	OPD	2	23	76	101
	Kecamatan	0	7	17	24
	Puskesmas	2	11	21	34
	Kelurahan/Desa	1	3	0	4
	Lainnya	0	5	1	6
Total		5	49	115	169



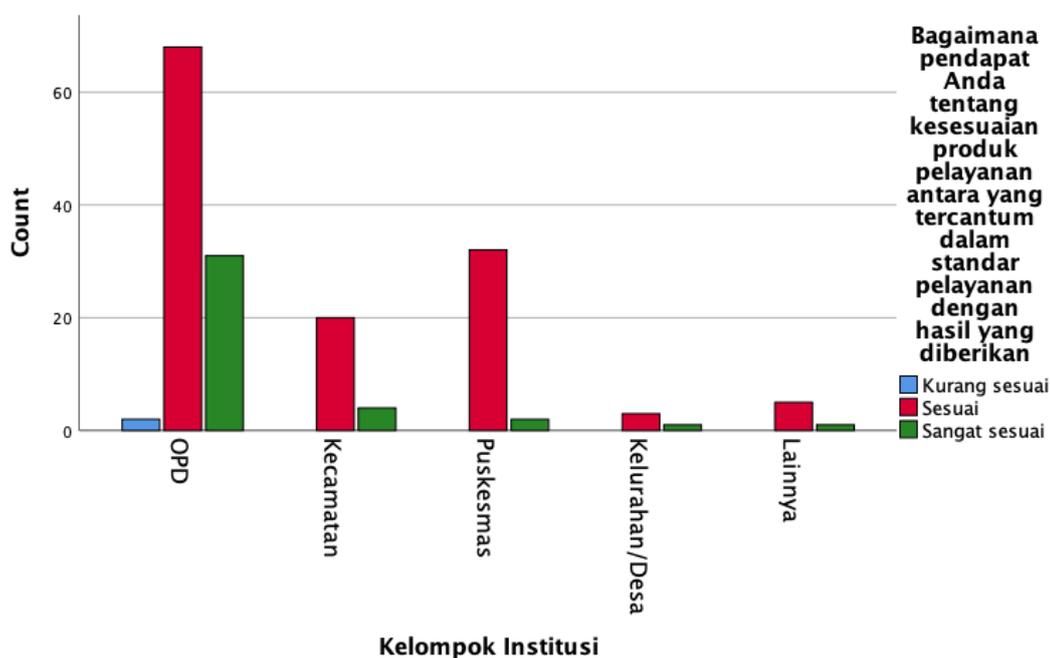
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 52 mengenai pendapat tentang kewajaran biaya atau tarif dalam pelayanan, dapat dilihat distribusi tanggapan berdasarkan kelompok institusi. Dari total 169 responden, sebagian besar (115 atau 68,0%) menilai biaya atau tarif pelayanan sebagai "gratis". Kelompok OPD memberikan tanggapan terbanyak terhadap kategori "gratis" dengan 76 responden, diikuti oleh Puskesmas dengan 21 responden, Kecamatan dengan 17 responden, dan Kelurahan/Desa dengan 0 responden.

Kategori "murah" mendapatkan tanggapan dari 49 responden, dengan OPD (23) dan Puskesmas (11) sebagai yang terbanyak, sedangkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa hanya memberikan sedikit tanggapan dalam kategori ini. Kategori "cukup mahal" direspon oleh 5 orang secara keseluruhan, dengan OPD dan Puskesmas masing-masing 2 tanggapan.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari berbagai kelompok institusi merasa bahwa biaya atau tarif pelayanan dianggap wajar, terutama dalam kategori "gratis". Hal ini mengindikasikan adanya persepsi positif mengenai biaya pelayanan yang diterima dari institusi, khususnya dari OPD.

Tabel 53. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan			Total
		Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai	
Kelompok Institusi	OPD	2	68	31	101
	Kecamatan	0	20	4	24
	Puskesmas	0	32	2	34
	Kelurahan/Desa	0	3	1	4
	Lainnya	0	5	1	6
Total		2	128	39	169



Tabel 53 menyajikan data mengenai pendapat tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, berdasarkan kelompok institusi. Dari total 169 responden, 101 berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 24 dari Kecamatan, 34 dari Puskesmas, 4 dari Kelurahan/Desa, dan 6 dari kategori lainnya.

Dalam kelompok OPD, sebagian besar responden (68 orang) menilai bahwa kesesuaian produk pelayanan adalah "Sesuai," sementara 31 orang menganggapnya "Sangat sesuai," dan hanya 2 orang yang merasa produk pelayanan "Kurang sesuai."

Pada kelompok Kecamatan, 20 responden menganggap produk pelayanan "Sesuai," dengan 4 orang menilai "Sangat sesuai" dan tidak ada yang menilai "Kurang sesuai."

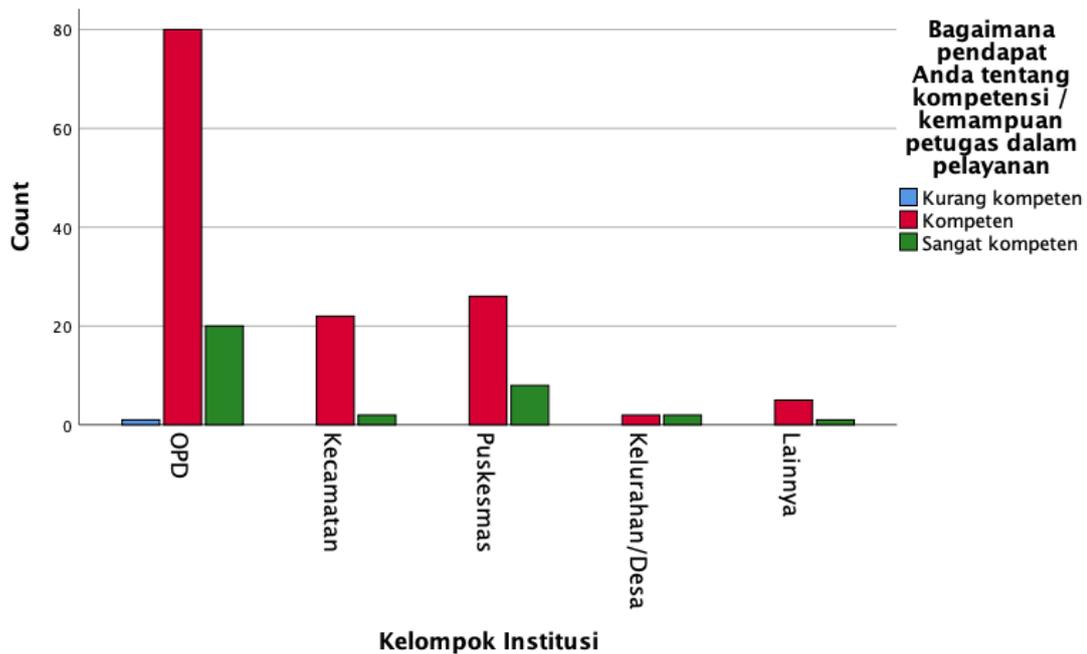
Di Puskesmas, 32 responden menilai "Sesuai," dan 2 orang "Sangat sesuai," tanpa adanya penilaian "Kurang sesuai."

Kelurahan/Desa dan kategori lainnya menunjukkan hasil yang serupa, dengan mayoritas menilai "Sesuai" dan sedikit yang menilai "Sangat sesuai."

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa mayoritas responden dari semua kelompok institusi merasa bahwa produk pelayanan umumnya sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum, dengan sebagian kecil menilai "Sangat sesuai." Penilaian "Kurang sesuai" sangat jarang terjadi.

Tabel 54. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan			Total
		Kurang kompeten	Kompeten	Sangat kompeten	
Kelompok Institusi	OPD	1	80	20	101
	Kecamatan	0	22	2	24
	Puskesmas	0	26	8	34
	Kelurahan/Desa	0	2	2	4
	Lainnya	0	5	1	6
Total		1	135	33	169



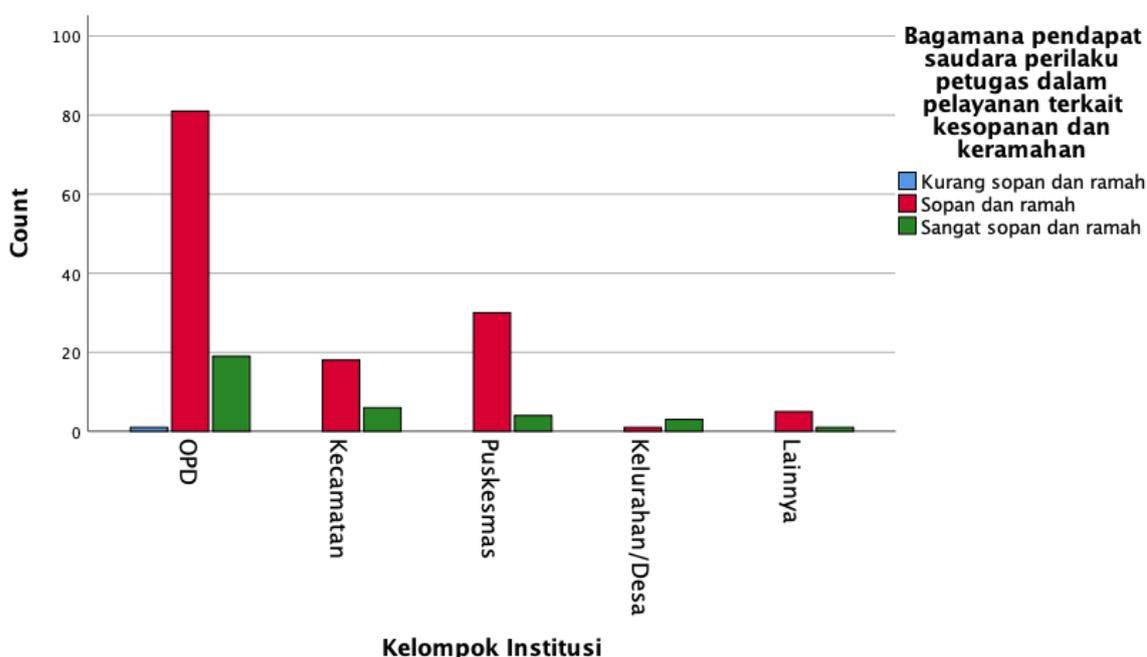
Berdasarkan data pada Tabel 54 yang menunjukkan persepsi tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan berdasarkan kelompok institusi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tanggapan positif berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 101 tanggapan untuk OPD, terdapat 80 entitas yang menilai petugas sebagai kompeten dan 20 entitas yang menilai sangat kompeten, sementara hanya 1 entitas yang menilai kurang kompeten.

Sebaliknya, untuk Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan/Desa, dan institusi lainnya, jumlah entitas yang menilai petugas sebagai kompeten atau sangat kompeten cenderung lebih kecil. Misalnya, dari 24 entitas Kecamatan, 22 menilai kompeten dan 2 menilai sangat kompeten. Pada Puskesmas, 26 menilai kompeten dan 8 menilai sangat kompeten dari total 34 tanggapan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa OPD mendapatkan penilaian yang lebih tinggi dalam hal kompetensi petugas dibandingkan dengan kelompok institusi lainnya, dengan sebagian besar tanggapan positif mengindikasikan tingkat kompetensi yang baik atau sangat baik.

Tabel 55. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan			Total
		Kurang sopan dan ramah	Sopan dan ramah	Sangat sopan dan ramah	
Kelompok	OPD	1	81	19	101
Institusi	Kecamatan	0	18	6	24
	Puskesmas	0	30	4	34
	Kelurahan/Desa	0	1	3	4
	Lainnya	0	5	1	6
Total		1	135	33	169

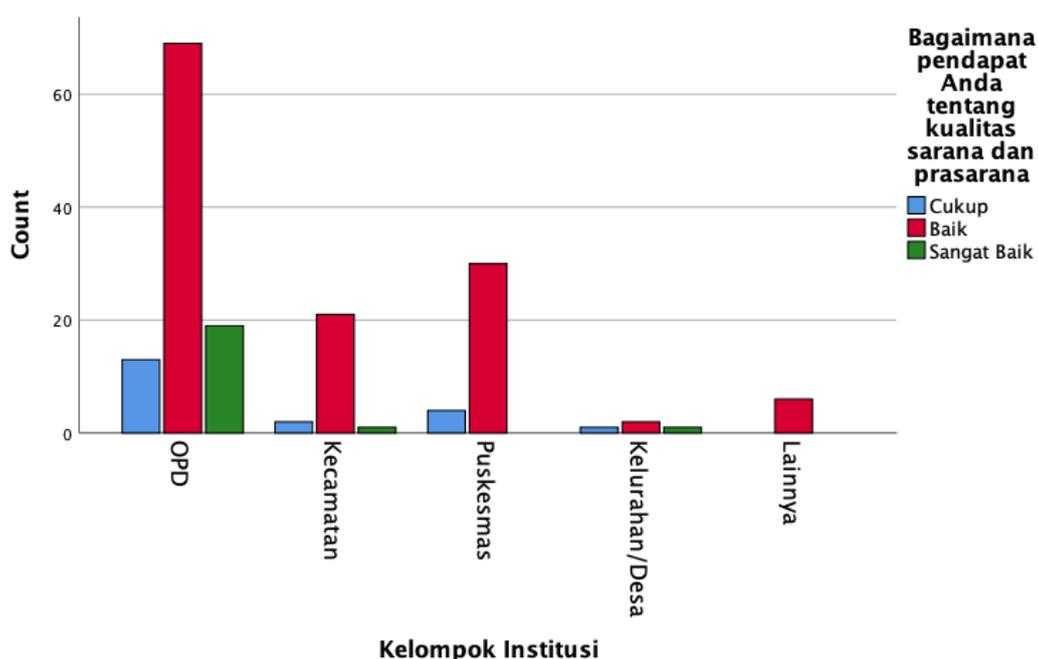


Tabel 55 menyajikan distribusi pendapat mengenai perilaku petugas dalam pelayanan berdasarkan kelompok institusi, dengan fokus pada kesopanan dan keramahan. Dari total 169 responden, mayoritas memberikan penilaian positif terhadap perilaku petugas. Khususnya, 81 responden dari OPD menilai petugas sebagai "sopan dan ramah," sementara 19 dari OPD menilai mereka sebagai "sangat sopan dan ramah." Puskesmas juga mendapatkan penilaian positif dengan 30 responden menilai petugas sebagai "sopan dan ramah" dan 4 responden sebagai "sangat sopan dan ramah." Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan kategori lainnya menunjukkan jumlah yang lebih kecil, tetapi juga mencerminkan penilaian positif terhadap perilaku petugas. Secara

keseluruhan, sebagian besar penilaian adalah positif, dengan 135 dari 169 responden menilai petugas sebagai "sopan dan ramah" atau "sangat sopan dan ramah," mengindikasikan kepuasan umum terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Tabel 56. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana			Total
		Cukup	Baik	Sangat Baik	
Kelompok Institusi	OPD	13	69	19	101
	Kecamatan	2	21	1	24
	Puskesmas	4	30	0	34
	Kelurahan/Desa	1	2	1	4
	Lainnya	0	6	0	6
Total		20	128	21	169

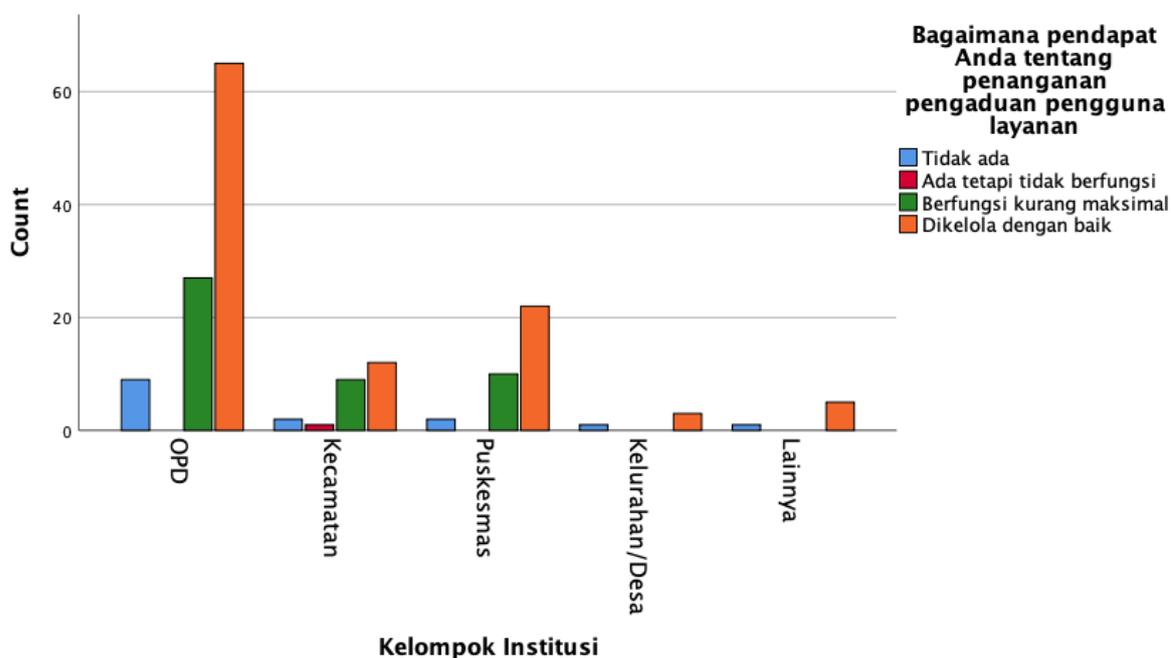


Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 46 mengenai pendapat tentang kualitas sarana dan prasarana menurut kelompok institusi, dapat diobservasi bahwa mayoritas penilaian berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 169 respons, OPD memberikan penilaian yang paling banyak dalam kategori "Baik," dengan jumlah 69 dari 101 respons. Selain itu, OPD juga memberikan 13 penilaian dalam kategori "Cukup" dan 19 penilaian dalam kategori "Sangat Baik." Kecamatan memberikan 21 penilaian dalam kategori "Baik," serta dua penilaian dalam kategori

"Cukup" dan satu penilaian dalam kategori "Sangat Baik." Puskesmas memberikan 30 penilaian dalam kategori "Baik" dan 4 penilaian dalam kategori "Cukup," namun tidak ada penilaian dalam kategori "Sangat Baik." Kelurahan/Desa dan institusi lainnya memberikan penilaian yang lebih terbatas, dengan jumlah keseluruhan penilaian yang relatif kecil. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penilaian kualitas sarana dan prasarana lebih banyak diberikan dalam kategori "Baik," dengan OPD sebagai pemberi penilaian dominan.

Tabel 57. Kelompok Institusi * Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan Crosstabulation

Count		Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan				Total
		Tidak ada	Ada tetapi tidak berfungsi	Berfungsi kurang maksimal	Dikelola dengan baik	
Kelompok	OPD	9	0	27	65	101
Institusi	Kecamatan	2	1	9	12	24
	Puskesmas	2	0	10	22	34
	Kelurahan/Desa	1	0	0	3	4
	Lainnya	1	0	0	5	6
Total		15	1	46	107	169



Tabel 47 menunjukkan hasil crosstabulation mengenai pendapat tentang penanganan pengaduan pengguna layanan berdasarkan kelompok institusi. Dari total

169 tanggapan yang dikumpulkan, sebagian besar institusi mengelola pengaduan dengan baik, dengan 107 tanggapan (63,3%) mengindikasikan bahwa pengaduan dikelola dengan baik. Hanya 46 tanggapan (27,2%) yang menunjukkan bahwa penanganan pengaduan berfungsi kurang maksimal, sementara 15 tanggapan (8,9%) melaporkan tidak ada penanganan atau penanganan yang tidak berfungsi.

Ketika dilihat berdasarkan kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan angka tertinggi dalam kategori "dikelola dengan baik" dengan 65 tanggapan, diikuti oleh Puskesmas dengan 22 tanggapan. Kecamatan dan Kelurahan/Desa memiliki angka yang lebih rendah, masing-masing 12 dan 3 tanggapan, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terkait penanganan pengaduan lebih tinggi pada OPD dibandingkan dengan kelompok institusi lainnya. Data ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan, ada kecenderungan positif terhadap penanganan pengaduan, terutama di OPD, sementara institusi lain seperti Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih perlu perbaikan dalam hal ini.

BAB 6

Penutup



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bulungan, dengan fokus pada pengaruh faktor-faktor kelembagaan terhadap jaringan inovasi dan efektivitasnya. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Pentingnya Peran Institusi:** Institusi memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem inovasi di Kabupaten Bulungan. Mereka memberikan dukungan kepada inovator dan memfasilitasi kolaborasi yang diperlukan untuk mendorong inovasi yang efektif dan berkelanjutan.
- 2) **Sistem Pengukuran Kinerja:** Pentingnya sistem pengukuran kinerja di pemerintahan daerah tidak dapat diabaikan. Sistem ini membantu mengevaluasi dampak faktor kelembagaan terhadap inovasi dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan, memberikan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan kebijakan dan program inovasi.
- 3) **Reformasi Birokrasi dan Integrasi Inovasi:** Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan integrasi inovasi daerah telah mendorong peralihan menuju pendekatan yang lebih efisien dan modern dalam pemerintahan daerah. Kebijakan inovasi kolaboratif sangat penting dalam mengembangkan kebijakan inovatif, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia.
- 4) **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam sistem inovasi perkotaan menunjukkan efek positif dari inovasi yang sukses pada pemerintah daerah dan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan inovasi.
- 5) **Dampak Pandemi COVID-19:** Respon inovatif oleh pemerintah daerah selama krisis, seperti pandemi COVID-19, menekankan pentingnya strategi adaptif dan pembelajaran hasil untuk manajemen krisis yang efektif.

- 6) Tantangan dan Peluang di Era Big Data dan IoT: Di era big data dan Internet of Things, analisis data yang komprehensif dan pengambilan keputusan strategis sangat penting untuk mendorong inovasi dalam administrasi publik.
- 7) Keterkaitan Kebijakan Keuangan dan Inovasi: Dampak utang pemerintah daerah terhadap inovasi perusahaan menunjukkan keterkaitan kompleks antara kebijakan keuangan dan hasil inovasi di daerah.
- 8) Implementasi Sistem Manajemen Inovasi: Implementasi sistem manajemen inovasi di wilayah lain, seperti di wilayah Lubusz, menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Bulungan untuk mendukung dan meningkatkan ekosistem inovasi.
- 9) Kebutuhan Akan Keseimbangan dalam Inovasi: Inovasi membutuhkan keseimbangan antara keragaman dan kolektivitas, yang dipengaruhi oleh pasar dan kekuatan sosial serta organisasi lainnya.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi inovasi di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada inovator dan memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi.
- 2) Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif untuk mengevaluasi dampak faktor kelembagaan terhadap inovasi dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
- 3) Reformasi Birokrasi Berkelanjutan: Melanjutkan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- 4) Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 5) Strategi Adaptif untuk Krisis: Mengembangkan strategi adaptif yang efektif untuk manajemen krisis berdasarkan pembelajaran dari pandemi COVID-19.

- 6) Pemanfaatan Big Data dan IoT: Memanfaatkan teknologi big data dan Internet of Things untuk analisis data yang lebih komprehensif dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mendukung inovasi.
- 7) Peningkatan Kebijakan Keuangan: Mengembangkan kebijakan keuangan yang mendukung inovasi dengan memperhatikan dampak utang pemerintah daerah terhadap hasil inovasi.
- 8) Implementasi Sistem Manajemen Inovasi: Mengadopsi praktik terbaik dari wilayah lain dalam implementasi sistem manajemen inovasi untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Bulungan.
- 9) Mencapai Keseimbangan dalam Inovasi: Menjaga keseimbangan antara keragaman dan kolektivitas dalam inovasi, serta mengintegrasikan kekuatan pasar dan sosial dalam kegiatan inovatif.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Kabupaten Bulungan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi inovasi daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kuisisioner dan Tabel per Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan



B. Pemahaman Inovasi Daerah			
		4. Keterbatasan menulis	4
		5. Semuanya tidak bisa	5
		6. Tidak Mengetahui Inovasi	6
		7. Semua jawaban 1-6 Ya Benar	7
		8. Lainnya	8
10	Indikator inovasi daerah terdapat 20 indikator, Apakah Inovasi Sudah memiliki semua indikator	1. Ya Lengkap 2. Ya, hanya separuhnya 3. Belum Lengkap	1 2 3

C. Deskripsi Inovasi Daerah			
11	Nama Inovasi Daerah		
12	Deskripsi singkat rancang bangun inovasi daerah		
13	Bentuk inovasi daerah	1. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah 2. Inovasi pelayanan publik 3. Inovasi daerah dalam bentuk lainnya	1 2 3
14	Jenis inovasi daerah	1. Digital 2. Non Digital	1 2
15	Jumlah penerima manfaat	1. 1-100 orang 2. 101-200 orang 3. diatas 200 orang	1 2 3
16	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir meliputi keluhan, kritik dan masukan lainnya	1. Jumlah pengaduan 2. Jumlah pengaduan terselesaian	
17	Jumlah SDM yang menangani	1. belum ada	1

C. Deskripsi Inovasi Daerah			
	Helpdesk Inovasi Daerah	2. 1-10 orang	2
		3. 11-20 orang	3
		4. 21-30 orang	4
		5. diatas 30 orang	5

D. Pemahaman Responden tentang Pelayanan Inovasi Daerah			
18	Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	1. Tidak sesuai.	1
		2. Kurang sesuai.	2
		3. Sesuai.	3
		4. Sangat sesuai	4
19	Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan inovasi daerah ini	1. Tidak mudah.	1
		2. Kurang mudah.	2
		3. Mudah.	3
		4. Sangat mudah	4

E. Pendapat Responden tentang Pelayanan Inovasi Daerah			
20	Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1. Tidak cepat.	1
		2. Kurang cepat.	2
		3. Cepat.	3
		4. Sangat cepat	4
21	Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	1. Sangat mahal	1
		2. Cukup mahal	2
		3. Murah	3
		4. Gratis	4
22	Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan	1. Tidak sesuai	1
		2. Kurang sesuai	2
		3. Sesuai.	3
		4. Sangat sesuai	4

E. Pendapat Responden tentang Pelayanan Inovasi Daerah			
	dengan hasil yang diberikan		
23	Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten	1 2 3 4
24	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
25	Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana	1. Buruk. 2. Cukup. 3. Baik 4. Sangat Baik	1 2 3 4
26	Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1. Tidak ada. 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
27	Saran dan masukan		

Tabel per Inovasi Kabupaten Bulungan

Pantau Bulungan

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

TERPANA (Tim Reaksi Cepat Penanganan Gangguan dan Bencana)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Simpati TAPARA (Sistem Pelayanan Administrasi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.78
Mutu Pelayanan	C

Predikat	Kurang Baik
----------	-------------

SILADUPIL (Aplikasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SIMOTIVASI (Sistem Monitoring dan Evaluasi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SI MAK INA GERAM

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B

Predikat	Baik
----------	------

GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pekerja Cinta Sehat)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.00
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

PENDASELWEB (Aplikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Berbasis Website)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.00
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

OPTIKAN (Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22

Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SEKINJAU SEMISA (SATU UNTUK SEMUA)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Gerak Masdulah Sejiwa

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Pemetaan ZNT (Zona Nilai Tanah)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.78

Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

“CODE SOBAT” Quick Response Code Informasi

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

E-Presensi Bulungan

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SS Two (System Support Two)

Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD & LKPD

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4

Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Kopi Janda

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Aplikasi Kerjasama Daerah

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.89
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

Rumah Belajar Desa

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1

Skor Akhir	2.78
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

KAYAN MANTRA (Kampung Nelayan Mandiri dan Sejahtera)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

TRCT GEBER NATA (Tim Reaksi Cepat Tanggap Gerakan Bersih Drainase-Sanitasi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.89
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

DILANKIT (Pelepasan Implant Dengan Teknik Jungkit)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4

Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Permen Bawang Dayak

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

KOPI DI ATI (Kenali Resiko Penyakit Diabetes dan Hipertensi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Optimalisasi Media Penyiaran Radio Sebagai Media KIE Program Bangga Kencana

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	2
Kewajaran Biaya/Tarif	2
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3

Skor Akhir	2.56
Mutu Pelayanan	D
Predikat	Tidak Baik

OLABATIK (Optimalisasi PengeloLAan BARang LogisTIK)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	2
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.78
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

GENTONG MAS SANTUN

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SIDINI (Sistem Pelaporan Bulanan Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4

Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Jebol Anduk LA

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Sikat Stunting

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	1
Kecepatan Waktu Pelayanan	2
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.33
Mutu Pelayanan	D
Predikat	Tidak Baik

Semangka (Segol Lemo Emak Mengka Ane')

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4

Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SIMPELBEL (SISTEM PELAPORAN BELANJA LANGSUNG)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

KEBUN TOBURI (Kebun Tanaman Obat Keluarga, Buah dan Rekreasi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Ayo Bersama

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3

Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Cap Kuda Mas (Cari Pasien, Kumpul Dahak, Dapat Emas)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.67
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

SIPENANGKIS (SINERGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Ayo Baper ODF (Ayo Bareng percepat ODF)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4

Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Tana Hati Acil (pendekATAN pelayANAn keseHATAn di dAerah terpenCIL)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Stop "Wc Terbang" dengan KERBAU JABLAY

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	2
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	2.78
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

AKU NIKAH

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4

Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Pojok ESTEH PTM

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Kalender Sikat TB (Kalender Eliminasi TB bersama Kader dan Masyarakat)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Algosena (Alat Penggorengan Serba Guna)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1

Skor Akhir	2.78
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

Berselimpung Data

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

"RATU SEJAGAT" Rawat, Terapi, sULuh di Sentra JAGa kesehatan HIV AIDS Terpadu

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

GO Pertanian (Gerakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1

Skor Akhir	2.89
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

Transmigrasi Entrepreneur

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.00
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

JEMBATAN SI KANCIL

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Peningkatan Program Sekolah Siaga Kependudukan melalui Pojok Kependudukan

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	2
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2

Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	2.89
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

KONTES CATIN

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	4
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	4.00
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

YA SIAP RAT (Aksi Perubahan Layanan Persiapan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Siyanduk Cerdas

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

AKU Beda (Asap Ku Lepas Bebek Ku Dapat)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

e-SAKIP BULUNGAN

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Kepada Masyarakat

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

GERAKAN BERSAMA PEDULI ODGJ

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	4
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	4.00
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

TUNGGAN (Alat Pertanian)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	2
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	2
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.44
Mutu Pelayanan	D
Predikat	Tidak Baik

Peningkatan Penyimpanan Arsip Di Kecamatan Tanjung Palas Barat

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.56
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

RAPATBANG (Rumah Pendampingan Anak Tumbuh Kembang Gemilang)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Pos Gemas Umi Ayu (Posbindu Pegawai Puskesmas Bumi Rahayu)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Penataan dan Penyimpanan Arsip Dokumen LPJ Keuangan

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

PENA (PENGETAHUAN UNTUK ANAK)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	2
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	2
Kewajaran Biaya/Tarif	2
Kesesuaian Produk Pelayanan	2
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	2
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	2.22
Mutu Pelayanan	D
Predikat	Tidak Baik

MATA CERMAT (Masyarakat Desa Cerdas Menggunakan Obat)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	2
Kewajaran Biaya/Tarif	2
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	2
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	C
Mutu Pelayanan	2.78
Predikat	Kurang Baik

SATARAA (SATUKAN TEKAD, SUARAKAN HAK ANAK)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.00
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

TAKE BULUNGAN HIJAU (Transfer Anggaran Berbasis Ekologi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

JASUKE (Jamban Sehat Untuk Keluarga)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Hi-Pip (Hai Pengawas Intern Pemerintah)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

MATADOR (MAKANAN TAMBAHAN DAUN KELOR)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Pendampingan Izin Langsung Melalui Analisa Identifikasi Solusi (PIL MANIS)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

BELUSA (Bulungan Peduli B2SA)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	1
Skor Akhir	2.78
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

PAK SUKIR (PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR 2022-2023)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.00
Mutu Pelayanan	C
Predikat	Kurang Baik

ROTASI ELEKTRIK (Informasi Obat Pasien dengan Etiket Elektronik)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

PELAUT (Pelayanan Administrasi Umum Kepada Masyarakat)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4

Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SELAP (Sistem Elektronik Retribusi Persampahan)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.56
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

SI PABRIK (Inovasi Sampah Melalui Ecobrick)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PUBLIKASI

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4

Kualitas Sarana dan Prasarana	4
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	4.00
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

Good Fern (Media Tanam Akar Pakis Multiguna Untuk Pertanian Hidroponik dan Organik)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	4
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

PATRIOT Bulungan (Pelayanan Pajak dan Retribusi Online Terpadu)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

KATROL OBH (KAntong konTROL OBat Hipertensi)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3

Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

AMPAU HARAPAN BUNYU "kAMPung HerbaI KelUarga HARAPan kecamatAN BUNYU"

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Smart Farming

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	4
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Bulungan Interaktif

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3

Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.67
Mutu Pelayanan	A
Predikat	Sangat Baik

APEM GELUNG (ALAT PEMISAH JANGGEL JAGUNG)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	4
Kewajaran Biaya/Tarif	3
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	4
Perilaku Petugas	4
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.44
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Asin Manis (SWGB) : pelayanan paSIeN MAINutrisi (Stunting, Wasting dan Gizi Buruk)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Optimalisasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan (OPERA PANGAN)

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4

Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.33
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

Membangun Sistem Informasi Desa

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	2
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.11
Mutu Pelayanan	B
Predikat	Baik

KUNING UNTUK KAYAN SEJIWA (Buku Monitoring untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa) di Puskesmas Antutan

Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3
Kecepatan Waktu Pelayanan	3
Kewajaran Biaya/Tarif	4
Kesesuaian Produk Pelayanan	3
Kompetensi Petugas	3
Perilaku Petugas	3
Kualitas Sarana dan Prasarana	3
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4
Skor Akhir	3.22
Mutu Pelayanan	B

